

JURNAL KAJIAN WILAYAH

Volume 7

Nomor 2, Desember 2016

DAFTAR ISI

MENJAGA KEPERCAYAAN INVESTOR MELALUI KASUS <i>TAX EVASION APPLE INC. DI IRLANDIA: LITERATURE REVIEW</i> Rostamaji Kornawan	87-100
PENGARUH <i>CULTURE SHOCK</i> DAN <i>ADVERSITY QUOTIENT</i> TERHADAP KEPUASAN KERJA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI HONGKONG Muhammad Iqbal dan Anggit Verdaningrum	101-112
TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONTEKS MASYARAKAT TAIWAN YANG MENUA Rita Pawestri Setyaningsih	113-127
WANITA ASIA DALAM IMAJINASI DIGITAL: KAJIAN LITERATUR ATAS ORIENTALISME Iman Zanatul Haeri	129-143
EFEK KEBIJAKAN SATU ANAK TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DI TIONGGOK: SEBUAH IRONI Wabilia Husnah	145-158
RINGKASAN HASIL PENELITIAN KOMODIFIKASI AGAMA-AGAMA DI KOREA SELATAN Saiful Hakam, Cahyo Pamungkas dan Erni Budiwanti	159-168
TINJAUAN BUKU "HERB FEITH: AKADEMISI DAN AKTIVIS" DARI WINA KE YOGYAKARTA: KISAH HIDUP <i>HERB FEITH</i> Dina Srirahayu	169-175

JURNAL
KAJIAN WILAYAH

Volume 7

Nomor 2, Desember 2016

DDC: 336.2

Rostamaji Kornawan

MENJAGA KEPERCAYAAN INVESTOR MELALUI KASUS *TAX EVASION APPLE INC.* DI IRLANDIA: *LITERATURE REVIEW*

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 87-100

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji kasus *Apple Inc.* yang terjadi di Irlandia. Komisi Uni Eropa menemukan adanya indikasi penghindaran pajak (*tax evasion*) yang dilakukan *Apple Inc.* Sebagai salah satu investor di Irlandia, kasus ini tentu menjadi pertimbangan bagi pemerintah Irlandia dalam memelihara iklim investasi yang berkesinambungan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat aspek yang mempengaruhi *Apple Inc.* yang sampai saat ini tetap bertahan di Irlandia ketika permasalahan yang berat telah menggoyahkan kepercayaan perusahaan tersebut. Untuk menemukan aspek tersebut, kasus ini dipelajari dengan menggunakan metode literatur *review* secara sistematis. Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa dukungan kebijakan pemerintah Irlandia menjadi salah satu aspek penting bagi keputusan *Apple Inc.* Dukungan tersebut pada dasarnya merupakan strategi politik hubungan internasional pemerintah Irlandia dan *Apple Inc.* Melalui kasus ini pula, Indonesia dapat mengambil pelajaran yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kata kunci: *tax evasion*, *Apple Inc.*, Irlandia, kepercayaan investor.

DDC: 331.4

Muhammad Iqbal dan Anggit Verdaningrum

PENGARUH *CULTURE SHOCK* DAN *ADVERSITY QUOTIENT* TERHADAP KEPUASAN KERJA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI HONGKONG

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 101-112

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *culture shock* dan *adversity quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong. Penelitian kuantitatif ini melibatkan analisis regresi berganda dengan subjek sebanyak 111 responden. Teknik pengambilan sampel dengan *Non Probability Sampling. Sampling Purposive* dengan kriteria sampel: Warga Negara Indonesia yang bekerja di Hongkong, perempuan,

bekerja pada sektor rumah tangga, minimum lama bekerja di Hongkong 6 bulan, usia minimal 20 tahun, dan pendidikan minimal SD. Alat ukur *culture shock* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari alat ukur milik Mumford, alat ukur *adversity quotient* merupakan hasil modifikasi milik Rachmawati, dan alat ukur kepuasan kerja merupakan hasil adaptasi skala *Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) Short Form*. Berdasarkan analisis regresi berganda pada tabel Anova didapatkan F_h 8.837 dan F_t 3.08. sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai Sig. 0.000 ($p < 0.05$) $R = 0.140$. Hipotesis penelitian diterima.

Kata Kunci: *culture shock*, *adversity quotient*, kepuasan kerja, TKI.

DDC: 307.2

Rita Pawestri Setyaningsih

TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONTEKS MASYARAKAT TAIWAN YANG MENUA

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 113-127

ABSTRAK

Penuaan penduduk Taiwan mendorong tingginya permintaan tenaga perawat. Selama ini tenaga perawat didatangkan dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Sejak 2005 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendominasi pangsa pasar sektor kesejahteraan sosial. Namun, di tahun 2015, Pemerintah Indonesia mencanangkan *zero-maid policy*, yaitu penghentian pengiriman TKI tidak terampil. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi TKI di luar negeri. Taiwan menjadi salah satu target dari kebijakan ini. Kebijakan ini tentu akan berdampak pada ketersediaan tenaga kerja pada sektor kesejahteraan sosial di Taiwan di masa depan. Apalagi Taiwan sudah mencanangkan *national ten-year long-term care*. Lantas, bagaimana respon pemerintah Taiwan terhadap kebijakan ini? akankah TKI digantikan posisinya oleh TKA lainnya? Artikel ini bertujuan untuk *pertama*, memahami posisi TKI di antara tenaga kerja asing lainnya yang bekerja di sektor informal di Taiwan. *Kedua*, memahami upaya pemerintah Taiwan dalam menanggapi rencana pemerintah Indonesia tersebut. Studi ini menggunakan studi literatur dan wawancara. Persoalan ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1992 hingga 2015.

Kata Kunci: *ageing society*, Taiwan, TKI, kebijakan ketenagakerjaan.

DDC: 305.8

Iman Zanatul Haeri

WANITA ASIA DALAM IMAJINASI DIGITAL: KAJIAN LITERATUR ATAS ORIENTALISME

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 129-144

ABSTRAK

Globalisasi ditandai dengan tersebarnya produk teknologi budaya Barat. Salah satu produk budaya Barat yang sangat berpengaruh adalah film Hollywood. Narasi fiktif tersebut menghasilkan beberapa gagasan imajinatif yang berlaku juga pada media sosial komunikatif seperti situs kencan, video porno, hingga iklan. Kesadaran imajinatif barat terhadap geopolitik di luar dirinya atau *other* diungkap oleh

Edward Said dalam orientalisme. Said yang pada awalnya mengkaji praktik imajinatif Barat melalui sastra membuka peluang terbukanya kajian pada media lainnya dengan gagasan bahwa Barat memiliki distorsi pengetahuan tentang Timur, salah satunya menganggap bahwa Timur Eksotis. Gagasan eksotis tetap hadir dalam imajinasi digital Barat ketika memandang Wanita Asia sebagai representasi wanita timur. Beberapa film Hollywood, situs kencan, video porno hingga iklan masih menghadirkan stereotip Wanita Asia yang asing, misterius, aneh, dan sensual. Wanita Asia terjebak pada peran eksotisnya dalam ruang imajinasi digital tersebut. Mereka dieksotiskan dan mengeksotiskan diri di hadapan publik digital. Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dalam imajinasi digital terbukti tidak menghentikan stereotip terhadap Wanita Asia bahwa mereka eksotis. Justru melalui imajinasi digital dan kehendak kapitalisme global, representasi Wanita Asia dipertontonkan, dirayakan, dipromosikan dan diambil keuntungan darinya.

Kata Kunci: imajinasi digital, wanita Asia, pasca-Orientalisme, eksotis.

DDC: 305.4

Wabilia Husnah

EFEK KEBIJAKAN SATU ANAK TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DI TIONGKOK: SEBUAH IRONI

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 145-158

ABSTRAK

Dalam tradisi Tiongkok yang dipengaruhi oleh Konfusianisme, perempuan selalu memiliki posisi lebih rendah daripada laki-laki. Dalam sistem sosial seperti ini, Kebijakan Satu Anak yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping sejak 1979 sebagai program untuk mengontrol populasi, turut mendukung inferioritas wanita Tiongkok. Artikel ini mencoba menganalisis efek Kebijakan Satu Anak di Tiongkok kepada kehidupan perempuan. Sangat penting untuk memahami bagaimana perempuan Tiongkok menjalani hidupnya pascakehidupannya telah dipengaruhi oleh kebijakan ini, dengan cara yang baik maupun yang buruk. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa Kebijakan Satu Anak memiliki dampak negatif dalam kehidupan perempuan. Kebijakan ini tidak hanya menyebabkan pandangan diskriminatif terhadap perempuan, tapi juga secara tidak langsung melanggar hak asasi dalam kehidupan sosial, kultural, dan ekonomi perempuan Tiongkok. Kasus kriminal pun membayangi perempuan Tiongkok, mulai dari penyiksaan, pengabaian anak perempuan, aborsi, adopsi ilegal, penjualan manusia, penculikan, bahkan prostitusi. Di lain pihak, semua kasus kriminal ini telah membuat perempuan menjadi objek yang “langka” dan “spesial” di Tiongkok. Ironisnya, kelangkaan perempuan di Tiongkok menyebabkan nilai tawar perempuan menjadi lebih tinggi. Sekarang, dalam kehidupan mereka, perempuan Tiongkok bisa pergi ke sekolah, bekerja, memilih pasangan hidup, bahkan menuntut cerai. Status sosial perempuan dalam masyarakat Tiongkok pun sudah meningkat sekarang. Ini berarti, perempuan Tiongkok juga telah mendapatkan efek positif dari Kebijakan Satu Anak.

Kata Kunci: perempuan, konfusianisme, kebijakan satu anak.

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

DDC: 305.6

Saiful Hakam, Cahyo Pamungkas dan Erni Budiwanti

KOMODIFIKASI AGAMA-AGAMA DI KOREA SELATAN

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 159-168

ABSTRAK

Komodifikasi agama di Korea Selatan mengungkapkan bagaimana aspek-aspek agama dikomersialkan dan menjadi *marketplace* sangat dinamis. Komodifikasi agama memperkuat pandangan bahwa agama masih sangat signifikan dalam era *post-modern* dan neo-liberalisme. Agama semakin hadir di ruang publik dan ruang pasar di Korea Selatan. Dalam konteks agama Budha, komodifikasi agama telah mengubah vihara, kehidupan vihara dan ritual Budha menjadi objek pariwisata sangat menarik sehingga menopang pariwisata Budha secara masif. Dalam konteks agama Kristen, komodifikasi memperlihatkan bagaimana institusi gereja memanfaatkan ilmu manajemen dan *marketing* dalam mengelola gereja dan menjalankan ritual sehingga lebih sesuai dengan minat jemaat. Dalam konteks Islam, doktrin halal di dunia Islam telah mendorong industri makanan Korea Selatan memproduksi produk-produk halal untuk diekspor ke negara-negara Islam yang merupakan pangsa pasar potensial.

Kata kunci: komodifikasi agama, religiusitas, dan ruang pasar.

TINJAUAN BUKU

DDC: 320.9

Dina Srirahayu

“HERB FEITH: AKADEMISI DAN AKTIVIS”

DARI WINA KE YOGYAKARTA: KISAH HIDUP HERB FEITH

Purdey, Jemma. 2014. *Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith*. Diterjemahkan oleh Santi Budiman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 169-175

JURNAL
KAJIAN WILAYAH

Volume 7

Nomor 2, Desember 2016

DDC: 336.2

Rostamaji Kornawan

KEEPING INVESTORS' CONFIDENCE THROUGH APPLE'S TAX EVASION CASE IN IRELAND: A LITERATURE REVIEW

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 87-100

ABSTRACT

This paper studies about the Apple Inc. case in Ireland. The European Commission found out indications of tax evasion by Apple Inc. As one of important investors in Ireland, the case becomes a consideration for the Ireland government to maintain a conducive investment climate. This paper aims to understand how did Apple Inc. withstand the severe trust problem they are facing in Ireland. In order to do that, literature review method is used systematically in this paper. Overall, the study finds that one of the important aspects is the Irish government policy support. The support basically is the international relation political strategy between the Irish government and Apple Inc. From this case, Indonesia should take lesson learned to improve investors' confidence in Indonesia, especially after the implementation of ASEAN Economic Community.

Keywords: tax evasion, Apple Inc., Ireland, investor trust.

DDC: 331.4

Muhammad Iqbal dan Anggit Verdaningrum

INFLUENCE OF CULTURE SHOCK AND ADVERSITY QUOTIENT ON WORK SATISFACTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN HONGKONG

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 101-112

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the influence of culture shock and adversity quotient to work satisfaction of Indonesian Labor Forces in Hong Kong. This quantitative research includes multiple regression analysis with 111 respondents. The sampling technique is using Nonprobability Sampling. Purposive Sampling with sample criteria: Indonesian citizen who works in Hongkong, female, working in domestic sector, has been working for a minimum of 6 months in Hongkong. Her age must be 20 years old or older, and she must have an education at least of an Elementary School level. Measurement for

Culture Shock is the result of the adaptation of Mumford, the measurement for Adversity Quotient is the result of a modification of Rachmawati, and the measurement for work satisfaction is the result of the adaptation of Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) Short Form scale. According to analysis from the double regression analysis of the Anova tabl 8.837 Fb and Ft 3.08. so that F count > F table e , we got p= 0.000 (p < 0.05), R= 0.140. Research hypothesis is accepted.

Keywords: culture shock, adversity quotient, job satisfaction, TKI.

DDC: 307.2

Rita Pawestri Setyaningsih

INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN THE CONTEXT OF TAIWAN AGEING SOCIETY

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 113-127

ABSTRACT

Taiwan's ageing population has boosted the high rate of demand for caretakers. Many caretakers came from Southeast Asian countries such as the Philippines, Vietnam, Thailand, and Indonesia. Since 2005 Indonesian Workers have dominated the market share of the welfare sector. However in 2015 the Indonesian government launched a zero-maid policy, in order to terminate the sending of unskilled workers. The other goal is to provide better protection for migrant workers abroad. Taiwan becomes one of the targets of this policy. In fact, this policy will certainly create great impact on the supply of labor in the welfare sector in the future. Moreover, Taiwan has launched a national ten-year long-term care. So, how the Taiwanese government respond to this policy? Will the Indonesian workers' shalt position be replaced by other Southeast Asian workers? This article aims firstly, to understand the position of migrant workers among other foreign workers working in the welfare sector in Taiwan. Secondly, to understand the Taiwan government's efforts in response to the Indonesian government's plan. This study uses literature study and interviews. This issue will be analyzed using economic and social approaches. The data used are from the range of 1992 to 2015.

Keywords: ageing society, Taiwan, Indonesian workers, employment policy.

DDC: 305.8

Iman Zanatul Haeri

**ASIAN WOMEN IN DIGITAL IMAGINATION:
LITERATURE STUDY OF ORIENTALISM**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 129-144

ABSTRACT

Globalization is marked with the spread of Western culture technology products. One of the Western cultural products that are very influential was Hollywood movies. Fictitious narratives produced the some imaginative ideas that apply also on social media communicative as dating site, video porn sites, until advertising. The awareness of imaginative west of geopolitics outside himself or Other revealed by Edward Said in Orientalism. Said that initially examines the practice of West imaginative through Literature opens up the possibility of resumption of studies on other media with the idea that the West has distortion of the knowledge of the East, one considers that the exotic East. Exotic ideas still present in western digital imagination when respect women Asia as the representation of the women of the east.

Some Hollywood movies, dating site, video porn sites until the advertisements still presents stereotypes Asian women foreign, mysterious, strange and sensual display. Asian women trapped in exotic role in the Digital imagination space. They exoticization and exoticed themselves before the digital public. Globalisation and the development of communications technology in digital imagination proved does not stop the stereotypes against Asian women that they exotic. Thus through digital imagination and the will of the global capitalism, representation Asian women shown, celebrated, promoted and taken advantage of it.

Keywords: digital imagination, women Asia, post-Orientalism, exotic.

DDC: 305.4

Wabilia Husnah

THE EFFECT OF ONE CHILD POLICY ON WOMEN'S LIVES IN CHINA: AN IRONY

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 145-158

ABSTRACT

In the Chinese tradition that is influenced by the Confucianism, women are seen to have lower positions than men. In such a social system, the One-Child policy initiated by Deng Xiaoping since 1979 as a program to control the population, underpin the inferiority perception upon Chinese women. This article aims analyze the effects of the China's One Child Policy towards Chinese women's lives. It is important to understand how Chinese Women live after their lives have been affected by this Policy, in a good or a bad way. The results show that One Child Policy has negative impacts on Chinese women's lives. It does not only lead to discrimination views againts women, but also indirectly violate a Chinese woman's social, cultural and economic rights. Criminal cases overshadow the Chinese women, ranging from torture, neglect of children, abortion, illegal adoption, human trafficking, kidnapping, and even prostitution. On the other hand, all criminal cases makes women become "rare " and "special" objects in China. Ironically, the scarcity of women in China actually cause the higher bargaining power of women. Now in their lives, Chinese women can go to school, work, choosing a spouse, or even file for divorce. Women's social status in Chinese society has increased now. It means that women also obtain the positive impact of One-Child Policy.

Keywords: women, confucianism, the one child policy.

RESEARCH SUMMARY

DDC: 305.6

Saiful Hakam, Cahyo Pamungkas dan Erni Budiwanti

COMMODIFICATION OF RELIGION IN SOUTH KOREA

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 159-168

ABSTRACT

Commodification of Religion in South Korea reveals how religious aspects are commercialized and become a very dynamic marketplace. The commodification of religions reinforces the notion that religions are still strongly significant in the era of post-modern and neo-liberalism. Religions increasingly present in the public space and marketplace in South Korea. In the context of Buddhism, the commodification of religions has changed Buddhist temples, monasteries, and rituals become attractive and massive tourist destination. In the context of Christianity, commodification shows how church's institutions utilize

science of marketing and management in managing the church and the rituals in line with the interests of congregation. Thirdly, in the context of Islam, the doctrine of halal increasingly to be institutionalized in the Islamic world has prompted the Korean food industries producing halal products for export to Islamic countries that are a potential and big market.

Keywords: *Commodification of religions, religiosity, and marketplace.*

BOOK REVIEW

DDC: 320.9

Dina Srirahayu

“HERB FEITH: ACADEMICS AND ACTIVISTS”

FROM WINA TO YOGYAKARTA: THE LIFE OF HERB FEITH

Purdey, Jemma. 2014. *Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith*. Diterjemahkan oleh Santi Budiman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 (2) Desember 2016: 169-175

MENJAGA KEPERCAYAAN INVESTOR MELALUI KASUS *TAX EVASION APPLE INC.* DI IRLANDIA: *LITERATURE REVIEW*

Rostamaji Kornawan

Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa, Univeristas Indonesia
Email: *Rostamaji_k@yahoo.com*

Diterima: 5-10-2016

Direvisi: 21-12-2016

Disetujui: 11-1-2017

ABSTRACT

This paper studies about the Apple Inc. case in Ireland. The European Commission found out indications of tax evasion by Apple Inc. As one of important investors in Ireland, the case becomes a consideration for the Ireland government to maintain a condusive investment climate. This paper aims to understand how did Apple Inc. withstand the severe trust problem they are facing in Ireland. In order to do that, literature review method is used systematically in this paper. Overall, the study finds that one of the important aspects is the Irish government policy support. The support basically is the international relation political strategy between the Irish government and Apple Inc. From this case, Indonesia should take lesson learned in order to improve investors' confidence in Indonesia, especially after the implementation of ASEAN Economic Community is implemented.

Keywords: *tax evasion, Apple Inc., Ireland, investor trust.*

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji kasus *Apple Inc.* yang terjadi di Irlandia. Komisi Uni Eropa menemukan adanya indikasi penghindaran pajak (*tax evasion*) yang dilakukan *Apple Inc.* Sebagai salah satu investor di Irlandia, kasus ini tentu menjadi pertimbangan bagi pemerintah Irlandia dalam memelihara iklim investasi yang berkesinambungan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat aspek yang mempengaruhi *Apple Inc.* yang sampai saat ini tetap bertahan di Irlandia ketika permasalahan yang berat telah menggoyahkan kepercayaan perusahaan tersebut. Untuk menemukan aspek tersebut, kasus ini dipelajari dengan menggunakan metode literatur *review* secara sistematis. Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa dukungan kebijakan pemerintah Irlandia menjadi salah satu aspek penting bagi keputusan *Apple Inc.* Dukungan tersebut pada dasarnya merupakan strategi politik hubungan internasional pemerintah Irlandia dan *Apple Inc.* Melalui kasus ini pula, Indonesia dapat mengambil pelajaran yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kata kunci: *tax evasion, Apple Inc., Irlandia, kepercayaan investor.*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memberikan manfaat kepada masyarakat (Radu, 2014). Namun, pajak juga dapat memberikan permasalahan kepada pemerintah. Penghindaran pajak (*tax evasion*) menjadi salah satu bentuk dari permasalahan pajak yang ada. Secara garis

besar, *tax evasion* dapat diartikan sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak (Măgureanu, 2011). Sedangkan dalam implementasinya, *tax evasion* pada umumnya terjadi karena adanya celah dan lemahnya aspek regulasi pajak (Rizea, 2010) yang berlaku di suatu negara. Lemahnya aspek

regulasi tersebut yang menyebabkan wajib pajak sering melakukan penghindaran pajak secara legal yang seharusnya mereka bayarkan.

Salah satu kasus *tax evasion* yang paling banyak dibicarakan di Eropa pada tahun 2016 adalah kasus *tax evasion* yang dilakukan oleh *Apple Inc.* Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak di Irlandia setelah Komisi Uni Eropa menemukan adanya ketidaksesuaian implementasi tarif pajak keuntungan perusahaan *Apple Inc.* sejak tahun 2014. Namun demikian, permasalahan *tax evasion* ini tidak menyurutkan minat pemerintah Irlandia untuk tetap menarik investasi, khususnya investasi asing ke Irlandia. Pemerintah Irlandia tampaknya ingin menjaga kepercayaan *Apple Inc.* sebagai salah satu investor potensial di Irlandia. Menjaga kepercayaan investor memiliki nilai tersendiri karena kapasitasnya yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Dalam pemahamannya, kepercayaan (*trust*) memiliki makna kondisi psikologi seseorang yang sangat kompleks. Dalam situasi yang penuh dengan tekanan, *trust* dan *distrust* dapat menjadi bias (Hartnett, 2010). Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor dalam situasi yang tidak menguntungkan perlu untuk ditindaklanjuti.

Dukungan pemerintah Irlandia terhadap *Apple Inc.* sebagai investor potensial Irlandia di tengah isu besar yang menimpa perusahaan tersebut menjadi perhatian utama di dalam tulisan ini. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menemukan beberapa indikasi yang digunakan pemerintah Irlandia dalam memberikan kepercayaan *Apple Inc.* sebagai investor di tengah isu yang tidak menyenangkan yang menimpa perusahaan tersebut. Indikasi-indikasi yang digunakan pemerintah Irlandia dalam memberikan kepercayaannya kepada investor tersebut dapat menjadi rekomendasi pemerintah Indonesia dalam menerapkan strategi yang serupa dalam mendukung kebijakan investasi di Indonesia, terlebih setelah diberlakukannya Komunitas Masyarakat ASEAN. Setelah sub bab pendahuluan ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan menjelaskan sejarah dan mobilitas *Apple Inc.* di Eropa.

SEJARAH DAN MOBILITAS *APPLE Inc.* DI EROPA

Apple Inc. merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh dua inventor yang bekerja pada dua perusahaan yang berbeda. Mereka adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Sebelum *Apple Inc.* didirikan, perusahaan ini pertama kali bernama *Apple Computer Inc.* *Apple Computer Inc.* berdiri karena inovasi Steve Jobs dan Steve Wozniak dalam menemukan satu fitur *personal computer*. Fitur tersebut yang akhirnya menjadi paten bagi produk komputer yang dibuat oleh kedua inventor komputer *Apple* tersebut. *Apple Computer Inc.* terus berkembang dan memberikan banyak perubahan baik dari sisi produksi maupun dari sisi manajemen pengelolaan perusahaan tersebut (Beahm, 2014, 48 - 54). *Apple Computer Inc.* beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan dan pada tahun 2007, perusahaan ini mengganti namanya menjadi *Apple Inc.* Mobilitas perusahaan ini terus berkembang meskipun salah satu inventor *Apple Inc.*, Steve Jobs telah wafat pada beberapa tahun yang lalu. Sampai dengan pertengahan tahun 2016, pengelolaan *Apple Inc.* telah dipercayakan pengelolannya di bawah kepemimpinan Tim Cook yang dulunya juga merupakan salah satu inventor yang bekerja di lingkungan perusahaan *Apple Inc.* (Beahm, 2014, 161).

Apple Inc. menjadi perusahaan dunia yang dikenal dengan produk *smartphone*-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum produk *smartphone* berkembang pesat, *Apple Inc.* merupakan inventor dari produk *personal computer*. Kejayaan *Apple Inc.* pada produk *smartphone* muncul ketika salah satu produknya, yaitu *iPod* (2001), menjadi *viral* di dalam masyarakat. Setelah kemunculan produk *iPod*, *iPhone* (2007) dan *iPad* (2010) menjadi produk unggulan yang mengulang kesuksesan produk *iPod* sebelumnya (Beahm, 2014, 172). Dilihat dari proses bisnisnya, *Apple Inc.* tidak hanya berkembang oleh karena inovasi produknya semata. Tetapi perusahaan ini juga dapat berkembang karena adanya dukungan ekspansi dan diversifikasi pasar. Negara-negara Eropa dan negara-negara Asia adalah pasar yang

menguntungkan bagi produk *Apple Inc.* Pada tahun 2000-an, *Apple* mulai melihat potensi pasar tersebut. Sampai pada akhirnya, *Apple Inc.* memutuskan untuk mengembangkan proses bisnisnya di Irlandia dan membuka cabang produksi dan penjualan di beberapa negara Eropa maupun Asia. Sejak *Apple Inc.* berkembang di Eropa, perusahaan ini mampu menciptakan *job creation* sebanyak 1,46 juta tenaga kerja (*Apple's Job Creation*, 2016). Sedangkan tenaga kerja langsung yang berkerja di 19 negara Eropa di bawah koordinasi *Apple Inc.* adalah sebanyak 18.300 tenaga kerja. Tidak hanya tenaga kerja langsung yang bekerja di bawah koordinasi *Apple Inc.*, investasi *Apple Inc.* di Eropa bahkan telah mendorong terciptanya 672.000 pekerjaan serta 530.000 pekerjaan yang terkait dengan pengembangan sistem aplikasi iOS (*Apple Press Info*, 2015). Sementara untuk perkembangan bisnis yang berjalan di negara-negara Eropa, kehadiran *Apple Inc.* setidaknya berkontribusi positif bagi pendapatan pengembang Eropa sebanyak €10,2 milyar (*Apple's Job Creation*, 2016).

Apple Inc. bukan merupakan pemain pemula dari sebuah perusahaan yang memiliki keunggulan produksi di bidang teknologi. Kehadiran *Apple Inc.* setidaknya telah menjadi legenda dan inspirasi bagi perkembangan teknologi di seluruh dunia. Namun di tengah inspirasi yang positif, kehadiran produk *Apple* juga selalu diiringi dengan konflik persaingan antar perusahaan yang memiliki produk sejenis. *Google Inc.* adalah salah satu kompetitor *Apple Inc.* yang bersaing dalam menguasai pasar untuk perkembangan produk yang berbasis android. Demikian pula dengan *Samsung Electronics Co., Ltd.* yang juga merupakan kompetitor terberat bagi *Apple Inc.* Di samping Samsung, beberapa produsen pengembang produk berbasis teknologi informasi di Asia, seperti Cina, juga menjadi pesaing produk-produk yang dikembangkan oleh *Apple Inc.* Bahkan pada perkembangan beberapa tahun terakhir, *Apple Inc.* harus menghadapi tuntutan yang dijatuhkan oleh perusahaan Somaltus LLC akibat pelanggaran hak paten atas produk baterai pengisian *Apple*. Persaingan timbul karena strategi kompetitor yang selalu membuat produk

imitasi dengan memodifikasi produk *Apple* yang sudah ada. Perlu diketahui bahwa modifikasi produk dalam proses bisnis tidak selalu dilakukan oleh para produsen yang mengembangkan produk yang berbasis teknologi informasi. Dari pengamatan yang ada, semua bisnis yang dijalankan hampir semuanya melakukan peniruan dengan memodifikasi produk agar produk yang ditawarkan tersebut berbeda dari yang lain. Walaupun demikian, ada juga yang seratus persen meniru secara total dari produk yang dibuat oleh industri pesaingnya.

Tingginya kompetisi yang dihadapi *Apple Inc.* tidak menyurutkan *Apple Inc.* untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif yang berbeda (Nonaka and Kenney, 1991). Di tengah cepatnya pertumbuhan inovasi dan perubahan selera konsumen yang sangat cepat, *Apple Inc.* harus berjuang menghadapi tuntutan sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Uni Eropa. Tuntutan tersebut terjadi akibat adanya dugaan *tax evasion* yang dilakukan *Apple Inc.* di dalam mekanisme sistem perpajakan yang berlaku di Irlandia. Tuntutan hukum ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi *Apple Inc.* yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan *Apple Inc.* terhadap investasi yang diberikan perusahaan ini kepada Irlandia maupun di negara-negara Eropa lainnya (Edwards, 2016).

KASUS 'TAX EVASION' APPLE Inc. DI IRLANDIA

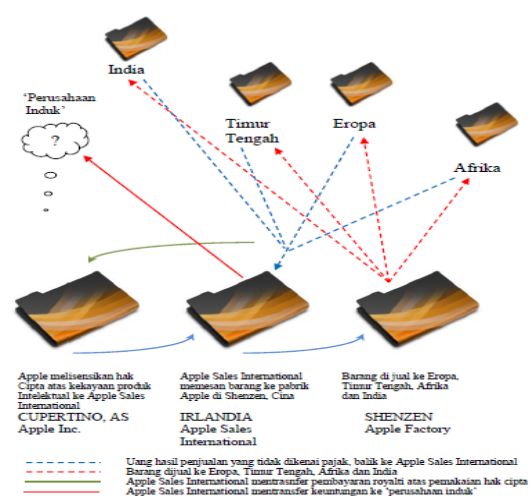
Kasus pajak yang melibatkan *Apple Inc.* di Irlandia menjadi catatan tersendiri bagi usaha yang dijalankan oleh *Apple Inc.* Sebagai perusahaan yang telah memberikan kepercayaan kepada Irlandia melalui pemberian lisensi produk, kasus pajak yang dituduhkan Komisi Uni Eropa kepada perusahaan ini akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di kawasan Uni Eropa. Kasus ini muncul ke permukaan akibat adanya bantuan stimulus yang diberikan pemerintah Irlandia kepada *Apple Inc.* Secara spesifik, bantuan stimulus tersebut diwujudkan pemerintah Irlandia melalui bentuk stimulus fiskal dengan menurunkan tarif pajak. Bantuan ini menjadi polemik karena diberikan pemerintah Irlandia kepada *Apple Inc.* secara khusus. Hasil

laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa pada bulan Juni 2014 menyebutkan bahwa pemerintah Irlandia memberikan bantuan pengurangan tingkat pajak kepada *Apple Inc.* Pengurangan tarif pajak tersebut tentu menyalahi ketentuan Uni Eropa yang menilai bahwa *Apple Inc.* telah membayar pajak perusahaan di bawah kesepakatan yang berlaku. Pada tahun 2003, pajak *Apple Inc.* yang dibayarkan adalah sebesar 1% dari keuntungan perusahaan. Namun pada tahun 2014 diketahui bahwa *Apple Inc.* mendapatkan perlakuan khusus di mana pajak yang harus mereka bayarkan hanya sebesar 0.005% dari keuntungan perusahaan. Perlakuan ini dinilai Komisi Uni Eropa telah melanggar ketentuan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan di negara-negara Uni Eropa (Hufbauer and Lu, 2016).

Press Release Uni Eropa tanggal 30 Agustus 2016 (*European Union*, 2016) menguraikan secara singkat strategi yang dilakukan *Apple Inc.* dalam melakukan penghindaran pajak perusahaannya yang ada di Irlandia. Irlandia menjadi pusat *Apple Sales International* karena adanya daya tarik yang ada di negara ini. *Apple Sales International* yang bermarkas di Irlandia ini tidak memproduksi produk *Apple Inc.* secara riil. Seluruh produk yang seharusnya diproduksi oleh *Apple Inc.* di Irlandia ini disubkontrakkan kepada perusahaan manufaktur *Apple* yang ada di Shenzhen, yaitu salah satu wilayah yang terletak di negara Cina. Produk *Apple* yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur *Apple* yang ada di Shenzhen tersebut kemudian didistribusikan ke dalam pasar yang telah menjadi target perusahaan *Apple Sales International* yang berada di Irlandia.

Figure 1 memperlihatkan peta distribusi produk *Apple* hasil produksi perusahaan manufaktur *Apple* yang berada di Shenzhen. Produk *Apple* tersebut didistribusikan ke dalam pasar yang ada di India, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Di wilayah Eropa, Irlandia bukan termasuk target pasar dari produk *Apple* yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur *Apple* yang berada di Shenzhen tersebut. Setelah produk *Apple* berhasil dipasarkan di wilayah India, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, hasil penjualannya diserahkan kepada *Apple Sales International*

yang berada di Irlandia. Keuntungan yang dikumpulkan oleh *Apple Inc.* di Irlandia tersebut kemudian dialihkan kepada perusahaan induk yang keberadaannya tidak diketahui secara pasti. *Apple Inc.* diyakini menggunakan *the Irish—Dutch Sandwich Strategy* (Knobel, 2015) untuk menjalankan praktik *tax evasion*-nya ketika mengalirkan hasil keuntungannya kepada perusahaan induk tersebut. Lebih jauh, perusahaan induk yang tidak diketahui keberadaannya itu diduga berada di negara yang mempunyai wilayah *Tax Haven* atau *Offshore Financial Center* (OFC). Dugaan ini menjadi indikasi bagi Komisi Uni Eropa bahwa telah terjadi adanya tindakan kecurangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Apple Inc.* Sementara itu, perusahaan induk yang terletak di kota Cupertino yang merupakan bagian wilayah Amerika Serikat hanya mendapatkan pembayaran lisensi atas pemberian hak lisensi yang diberikan perusahaan induk *Apple Inc.* kepada *Apple Sales International* yang berada di Irlandia.



Sumber: Siregar (2016). Uni Eropa Perangi Penghindar Pajak

Figure 1. Strategi *Tax Evasion*—*Apple Inc.* di Irlandia

Strategi penghindaran pajak hasil keuntungan perusahaan *Apple Sales International* yang ada di Irlandia tersebut mendapat respon yang negatif dari Komisi Uni Eropa. Respon yang negatif tersebut dibuktikan dengan adanya bukti perlakuan khusus pemerintah Irlandia terhadap *Apple Inc.* Bukti tersebut memperlihatkan

perlakuan khusus berupa tarif pajak keuntungan perusahaan yang berbeda di mana *Apple Inc.* yang seharusnya membayar pajak sebesar 1% dari keuntungan perusahaannya ternyata hanya membayar sebesar 0.005% dari keuntungan perusahaan tersebut. Atas dasar bukti tersebut, *Apple Inc.* dianggap banyak mengambil keuntungan tanpa membayar kewajiban yang seharusnya mereka bayarkan.

Perlakuan khusus terhadap *Apple Inc.* dinilai dapat mengganggu iklim kompetisi usaha di negara-negara Eropa. Pemberlakuan tarif pajak yang rendah yang berbeda dengan tarif pajak yang berlaku secara umum adalah wujud dari kompetisi usaha yang tidak sehat. Dasar pembenaran dari adanya kompetisi usaha yang tidak sehat ini karena harmonisasi legislasi pajak yang diberlakukan Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya. Harmonisasi legislasi pajak di Uni Eropa sendiri sudah diatur di dalam *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Dalam *Article* 110 sampai dengan 113 TFEU, harmonisasi legislasi pajak digunakan untuk menciptakan kompetisi *internal market* Uni Eropa yang sehat (Remeur, 2015). Tidak hanya itu, secara umum perlakuan harmonisasi legislasi pajak juga diciptakan untuk melindungi situasi ekonomi yang kurang menguntungkan dari perilaku anti diskriminasi, ketidakseimbangan, ketidakjelasan di dalam hukum, ketidakadilan dalam memperoleh harta kekayaan maupun praktik *money laundering*. Khusus *money laundering*, Komisi Uni Eropa bahkan semakin cermat dalam mengatasi permasalahan ini karena Komisi Uni Eropa melihat hal ini semakin hari semakin dekat dengan perilaku seseorang yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Berghel, 2014).

Pengalaman ekonomi yang kurang menguntungkan pernah dialami negara-negara anggota Uni Eropa ketika *underground economy* terjadi di tahun 2000-an. Di dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan tersebut, praktik penggelapan pajak, diskriminasi maupun kompetisi usaha yang tidak sehat merupakan perilaku negatif yang mengganggu stabilitas ekonomi di negara-negara Eropa. Dari pengalaman tersebut, Uni Eropa akhirnya membangun sistem pajak yang kredibel dengan

didukung institusi yang dapat memberikan informasi pajak yang transparan (Grinberg, 2016; Hug and Spörri, 2011; Osmani, 2015) dan membangun efisiensi kinerja pemerintah (Cristea, 2012), khususnya efisiensi kinerja pemerintah dalam mengelola fiskal (Manea, 2015). Komisi Uni Eropa mendorong semua negara anggotanya untuk memiliki sistem pajak yang terbuka dan antidiskriminasi setelah sistem ini menjadi hak dan kewajiban yang fundamental (Denman, 2014).

Perjalanan kasus *Apple Inc.* akhirnya memberikan keputusan hukum yang cukup berat. Sidang Komisi Uni Eropa memutuskan kewajiban bagi *Apple Inc.* untuk membayar denda sebesar €13 milyar atas kekurangan pajak yang hilang akibat perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah Irlandia pada *Apple* pada beberapa tahun yang lalu (Barber, 2016; *European Union*, 2016).

Dalam keputusan tersebut, *Apple Inc.* masih mencoba untuk melakukan gugatan kembali. Keputusan tersebut dirasakan manajemen *Apple Inc.* sangat berat. Sebelum keputusan dikeluarkan, *Apple Inc.* membantah adanya tindakan *tax evasion* yang mereka lakukan melalui kegiatan *transfer pricing* di negara-negara Eropa lainnya. *Apple Inc.* menilai bahwa peristiwa ini lebih bermotifkan politik dibandingkan karena adanya kesalahan dalam proses administrasi perpajakan di Irlandia (Kollewe, 2016). Walaupun demikian, *Apple Inc.* tetap berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Irlandia sebagai tuan rumah yang memberikan fasilitas dan kemudahan ketika mereka menjalankan usahanya di Irlandia. Di lain sisi, Pemerintah Irlandia juga berkomitmen untuk tetap mempertahankan status mereka sebagai negara *Offshore Financial Center* (OFC) dengan tingkat pajak yang rendah yang ditawarkan bagi para investor (*Apple Tax Case*, 2016). Walaupun dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Irlandia tampak keberatan dengan status Irlandia yang dikatakan sebagian besar masyarakat sebagai negara Tax Haven (Campbell, 2016).

OFFSHORE FINANCIAL CENTER (OFC)

Offshore Financial Center (OFC) adalah salah satu kelebihan yang ditawarkan Irlandia kepada para investor. OFC sendiri merupakan suatu wilayah yang dibentuk oleh negara dengan tujuan menarik investor asing melalui daya tarik penurunan tingkat pajak. *International Monetary Fund* (IMF) bahkan menilai bahwa OFC dibentuk untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil di suatu negara (Zoromé, 2016).

Tidak hanya Irlandia, beberapa negara di dunia juga memiliki OFC. Hampir semua negara yang terletak di beberapa benua di dunia ini memiliki OFC. Di benua Asia, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura adalah negara-negara Asia yang memiliki wilayah *Offshore Financial Center* (OFC). Sedangkan negara-negara anggota Uni Eropa yang membentuk OFC adalah Irlandia, Jerman, Hongaria, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugis, dan Inggris. Di luar dari negara-negara Uni Eropa itu, beberapa negara yang terletak di benua Eropa juga memiliki OFC, seperti Swiss salah satunya (*Tax justice network*, 2007).

Negara-negara yang telah membentuk OFC tersebut melihat banyak manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan OFC. OFC tidak hanya menciptakan sistem keuangan yang stabil bagi negara-negara tersebut. Namun, OFC yang dibentuk juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi akibat *capital inflow* yang dimanfaatkan untuk memberikan stimulus bagi pergerakan ekonomi riil. Dampak ekonomi riil yang nyata terlihat adalah penyerapan tenaga kerja dan penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi rakyat yang berkembang di sekitar wilayah tersebut. Dalam penelitiannya, Abbott (2000) bahkan menyimpulkan bahwa OFC mampu mendorong iklim usaha yang berkembang, seperti usaha perhotelan, restoran, perlengkapan kantor, dan jasa konstruksi. Bahkan kehadiran perusahaan multinasional di wilayah OFC mampu mendorong perbaikan sosial melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan multinasional tersebut (Fisher, 2014; Preuss, 2012). Tidak hanya mengembangkan perekonomian yang telah disebutkan sebelumnya. Pembentukan OFC, apabila ditambahkan dalam situasi

ekonomi yang berkembang saat ini, juga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor bisnis properti maupun sektor bisnis pariwisata. Sektor properti dan pariwisata akan berkembang seiring dengan peningkatan keyakinan investor dan komunikasi yang intensif dari para pelaku usaha dan pemerintah.

Meskipun OFC memberikan manfaat, OFC juga membawa dampak buruk. *Tax evasion* yang merupakan dampak negatif dari pembentukan OFC karena sebagian wajib pajak menghindari pembayaran pajak di negaranya yang menilai tarif pajak di negaranya lebih besar dibandingkan dengan tarif pajak yang diberlakukan di negara yang memiliki OFC. *Tax evasion* menjadi bukti bahwa OFC ternyata memberikan dampak buruk bagi potensi penerimaan pajak. OFC pada umumnya menjadi wilayah pelarian dana dari wajib pajak yang mencoba menghindar dari pembayaran pajak yang diberlakukan di negara si wajib pajak tersebut. Pada kasus *tax evasion* di beberapa negara Eropa, Afrăsinei (2013) dan Manea (2015) melihat adanya potensi kerugian dalam penerimaan pajak di Romania akibat *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajaknya. Untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal, wajib pajak tersebut akan memanfaatkan 'Tax Haven' sebagai tempat pelarian dana mereka. Contoh lainnya adalah Republik Kroasia yang mengalami kerugian akibat perilaku korupsi dan *tax evasion* yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahannya (Bejaković, 2014).

Kasus *Apple Inc.* di Irlandia sangat berbeda dengan kasus *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak dari negara-negara Eropa lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada keistimewaan yang didapat *Apple Inc.* melalui tarif pajak perusahaan yang rendah yang telah diberikan oleh pemerintah Irlandia. Keistimewaan ini yang akhirnya disalahgunakan oleh *Apple Inc.* dengan cara melakukan *tax evasion* melalui mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* sendiri merupakan strategi perusahaan dengan memanfaatkan celah dan kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Oleh sebab itu, *transfer pricing* dapat dikatakan sebagai

wujud kekurangan dari OFC yang perlu untuk ditindaklanjuti melalui penegakan dan kerjasama aspek hukum dan keuangan internasional yang memadai (Dumitrescu, 2010; Erdős, 2010). Bagi *Apple Inc.*, tuduhan *transfer pricing* ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang. *Apple Inc.* tetap bertahan dan menyangkal telah melakukan tindakan *tax evasion* tersebut. Menurut manajemen *Apple Inc.*, tuduhan ini tidak beralasan karena *Apple Inc.* tidak membuat kesepakatan dalam menurunkan pajak yang seharusnya dibayarkan *Apple Inc.* kepada pihak otoritas pengelola penerimaan pajak di Irlandia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan permasalahan pajak yang sangat serius. Permasalahan ini selalu akan tertuju kepada peran perusahaan multinasional di mana perusahaan multinasional memiliki hubungan transaksi keuangan internasional yang sangat kompleks. Transaksi keuangan internasional yang kompleks tersebut yang akhirnya dapat menjadi celah bagi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Needham, 2013).

Permasalahan ini juga dialami *Apple Inc.* sebagai perusahaan multinasional yang memiliki jaringan bisnis di beberapa negara. Peristiwa yang menimpa *Apple Inc.* ini tentu akan mempengaruhi iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja (Edwards, 2016). Situasi politik di Irlandia dinilai juga turut mempengaruhi polemik permasalahan yang ada. Tidak hanya situasi politik Irlandia saja, politik Uni Eropa tampaknya juga mempengaruhi keputusan penilaian ada atau tidak adanya *tax evasion* yang dilakukan oleh *Apple Inc.* Hingga pada akhirnya, pada pertengahan tahun 2016, Komisi Uni Eropa memutuskan untuk memberi sanksi kepada *Apple Inc.* Sanksi yang harus dihadapi oleh *Apple Inc.* tersebut tentu harus membayar denda penghindaran pajak sebesar €13 milyar.

MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN INVESTOR DI IRLANDIA

Kasus *Apple Inc.* yang terjadi di Irlandia secara langsung sedikit mempengaruhi tingkat kepercayaan investor, khususnya *Apple Inc.*

sebagai investor yang telah lama mengembangkan usahanya di Irlandia. Walaupun demikian, kepercayaan *Apple Inc.* terhadap Irlandia tampaknya masih tetap terjaga meskipun Tim Cook sebagai CEO *Apple Inc.* melihat kasus ini lebih banyak bermotifkan politik dibandingkan motif kesalahan teknis atas pembayaran pajak yang dibayarkan oleh *Apple Inc.* (Kollewe, 2016; *Apple Tax Case*, 2016).

Dalam situasi yang semakin sulit ini, pemerintah Irlandia tetap memberikan keyakinan kepada *Apple Inc.* bahwa Irlandia masih memberikan manfaat kepada para investor untuk dapat berbisnis kembali di Irlandia. Menteri Keuangan Irlandia, Michael Noonan, melalui pernyataannya memberikan keyakinan kepada *Apple Inc.* bahwa OFC di Irlandia masih memberikan tingkat pajak yang rendah bagi para investor (Kollewe, 2016). Pembentukan OFC di Irlandia setidaknya telah meningkatkan penerimaan pajak Irlandia. Meskipun penerimaan pajak yang diterima pemerintah Irlandia tidak selalu mengalami peningkatan secara signifikan. Sebagai gambaran, pajak langsung untuk pajak pendapatan perusahaan pada tahun 2002 adalah sebesar 12.8% dari total pajak yang diperoleh pemerintah Irlandia. Pada tahun 2011, jumlah pajak langsung untuk pajak pendapatan perusahaan tersebut menurun hingga mencapai 7.9% dari total pajak yang diterima. Namun pada tahun 2014, jumlah persentase pajak langsung untuk pajak pendapatan perusahaan kembali meningkat hingga mencapai 8.3% dari total pajak (*DG Taxation and Customs Union*, 2016)

Pernyataan dari pemerintah Irlandia untuk *Apple Inc.* merupakan bentuk instrumen kebijakan konvensional yang secara eksplisit tidak mengacu kepada suatu ketentuan tertentu. Namun pernyataan tersebut menjadi bentuk kebijakan yang secara langsung mendukung perkembangan investasi di Irlandia. Selain kebijakan pemerintah Irlandia melalui *opinion leader* yang disampaikan para pejabat pemerintahan di Irlandia, indikator ekonomi yang berkembang di Irlandia juga menjadi faktor pendukung keyakinan *Apple Inc.* untuk tetap berinvestasi di Irlandia. Kasus *Apple Inc.* yang terjadi di Irlandia setidaknya tidak menyurutkan investasi dan perkembangan *capital inflow* yang

ada di Irlandia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejak krisis keuangan yang terjadi di Irlandia pada tahun 2008 menjadi indikator perbaikan ekonomi bagi stimulus investasi yang berlangsung di Irlandia. Tahun 2013, tingkat pertumbuhan GDP Irlandia (*worldbank statistics*) mencapai 1.3%. Namun pada tahun 2015, tingkat pertumbuhan GDP mengalami peningkatan yang sangat tajam, yaitu 7.8%. Indikator ekonomi inilah yang menjadi salah satu penyebab bertahannya *Apple Inc.* untuk melakukan reinvestasi di Irlandia.

Dukungan politik dari pemerintah maupun indikator ekonomi yang berkembang di Irlandia menjadi alat pendukung untuk menyakinkan investor bahwa Irlandia masih menjadi tempat yang layak untuk berinvestasi. Menteri Keuangan Irlandia, Michael Noonan, bahkan telah memberi sinyal bahwa pemerintah Irlandia akan mengajukan banding atas keputusan Komisi Uni Eropa yang telah menjatuhkan sanksi kepada *Apple Inc.* untuk membayar denda sebesar €13 milyar (Barber, 2016). Dukungan ini membuktikan bahwa Irlandia tetap konsisten dalam membangun kepercayaan investor, khususnya investor dari Amerika Serikat.

Dalam perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang terakhir, Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat untuk membentuk *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP). TTIP sebelumnya bahkan diprediksi mampu membangun hubungan kepercayaan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat (Müftüleri-Baç and Cihangir, 2012). Namun, permasalahan *Apple Inc.* yang terjadi di Irlandia tampaknya sedikit akan mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam memutuskan proses kelanjutan kesepakatan tersebut. Di satu sisi, salah satu petinggi negara Uni Eropa, yaitu Francois Hollande, Presiden Perancis, menilai bahwa proses perjanjian ini belum dapat diputuskan sampai dengan akhir Desember 2016 (Kirton, 2016). Sedangkan di sisi yang berbeda sejak terpilihnya presiden terpilih Donald Trump, presiden terpilih tersebut tampaknya juga harus menunda pembicaraan kesepakatan TTIP dengan Uni Eropa (Sapiro, 2016). Tertundanya kesepakatan TTIP ini tentu akan mempengaruhi

investasi dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Kasus *Apple Inc.* hanya menjadi salah satu pemicu dari konflik yang mungkin saja timbul di kedua belah pihak. Namun satu hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan perusahaan multinasional Amerika Serikat adalah kasus hukum yang terjadi karena adanya pelanggaran kesepakatan regulasi di dalam perjanjian sebuah bisnis. Tidak sedikit dari beberapa kasus yang terjadi, baik pemerintahan Amerika Serikat maupun pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa akan mengambil alih kepentingan kasus perusahaan multinasional tersebut. Kekuatan politik tampaknya menjadi tameng perusahaan multinasional dalam menjalankan usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penentuan investasi yang diperbicangkan dalam forum resmi pemerintahan antardua negara atau lebih pada umumnya akan banyak mempengaruhi keputusan seberapa besar investasi dan perdagangan yang akan mereka tawarkan.

FINDINGS—KEPERCAYAAN BAGI INVESTASI DI INDONESIA

Findings dalam kasus *Apple Inc.* ini dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki banyak kesempatan dalam membentuk kepercayaan para investor. Dalam perkembangan investasi di Indonesia, peluang investasi asing sudah sejak lama ada di negara ini. Tidak hanya investasi asing, investasi dalam negeri bahkan memiliki kesempatan yang sama dalam menggali potensi pembangunan sektor ekonomi di Indonesia.

Kasus *Apple* menarik banyak kesimpulan yang penting mengingat Indonesia mengalami kasus serupa dengan investor asing dari Amerika Serikat, yaitu dengan perusahaan *Google Inc.* *Google* merupakan perusahaan teknologi informasi raksasa dari Amerika Serikat. Produk *Google* telah menjangkau pasar yang sangat luas, termasuk pasar di Indonesia. Jangkauan bisnis yang dikembangkan sampai ke Indonesia tersebut dinilai masyarakat internasional sebagai

mata rantai bisnis dengan adaptasi yang sangat baik. Adaptasi yang telah dilakukan oleh *Google Inc.* tersebut adalah dengan melalui strategi dengan menarik simpati, selera, dan kemampuan konsumen di Indonesia. Strategi tersebut yang telah menjadi keunggulan di dalam mekanisme kerja *Google* untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Di tengah kemampuannya untuk menjangkau pasar yang cukup luas hingga mencapai Indonesia, *Google Inc.* dinilai telah melanggar kewajiban badan usaha yang ada di Indonesia. Kewajiban yang dilanggar adalah tidak melakukan pembayaran pajak perusahaan secara benar. Pelanggaran pembayaran pajak yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada *Google Inc.* tersebut disikapi oleh manajemen *Google* dengan reaksi bahwa proses bisnis yang mereka lakukan di Indonesia bukan merupakan badan usaha tetap seperti halnya badan usaha lainnya yang dikenakan pajak badan usaha. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersikeras untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penolakan *Google Inc.* terhadap kewajibannya untuk membayar pajak di Indonesia.

Secara substansi, kasus *Google Inc.* di Indonesia berbeda dengan kasus *Apple Inc.* yang terjadi di Irlandia. Pada kasus *Apple Inc.*, perusahaan ini merupakan investor yang secara resmi beroperasi di Irlandia. Sedangkan usaha *Google Inc.* di Indonesia hanya merupakan kepanjangan tangan dari *Google Asia Pasifik* yang terletak di Singapura. Namun kasus *Apple* setidaknya dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mempertimbangkan implementasi sebuah kebijakan untuk menjembatani konflik dan mempertahankan kepercayaan investor yang ada di Indonesia. Diharapkan, kebijakan yang diambil dapat berguna bagi negara dalam proses meningkatkan kembali kepercayaan para investor.

Salah satu temuan yang menarik dalam kasus *Apple* adalah bentuk dukungan hukum dan moril yang diberikan pemerintah Irlandia kepada *Apple*. Dukungan hukum dan moril tersebut menjadi *finding pertama* dalam kasus *Apple* ini. Bagi Indonesia, perwujudan dukungan hukum

dan moril kepada para investor di Indonesia pada dasarnya juga sudah cukup memadai. Program *tax amnesty* yang dijalankan pemerintah pada tahun 2016 menjadi salah satu contoh bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepercayaan wajib pajak yang merupakan calon investor di Indonesia. Namun beberapa kondisi masih memperlihatkan adanya kelemahan, yaitu untuk mewujudkan langkah hukum yang lebih pasti dan adil.

Selain memberikan dukungan hukum dan moril, situasi ekonomi yang stabil dan berkembang menjadi daya tarik bagi investor untuk tetap mempercayakan pengelolaan usaha mereka di Irlandia. Temuan ini menjadi temuan *kedua* yang tentunya juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga ekonomi yang lebih stabil. Stabilitas ekonomi di Indonesia secara umum sejak tahun 2010 mengalami perkembangan yang sangat positif. Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2015 menghasilkan angka pertumbuhan di atas 5%. Dari tahun 2010 sampai dengan 2012, angka pertumbuhan memang mengalami peningkatan. Tetapi sejak tahun 2012, angka pertumbuhan tersebut mengalami penurunan. Situasi ekonomi dunia yang kurang baik menjadi faktor determinan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi di dunia.

Temuan *ketiga* yang menjadi bahan pelajaran bagi Indonesia melalui kasus *Apple Inc.* ini adalah implementasi dari *Offshore Financial Center* (OFC). Apabila dilihat dari produk dan tujuan yang ditawarkan OFC, maka OFC sendiri merupakan perwujudan dari insentif fiskal. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tujuan OFC adalah memberikan manfaat bagi negara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui *capital inflow*. *Capital inflow* yang masuk pada dasarnya berasal dari perusahaan multinasional dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Tidak hanya FDI, tetapi *Foreign Indirect Investment* (FII) juga menjadi *input* dalam menyeimbangkan arus masuk dana asing di suatu negara.

OFC dapat saja diterapkan di Indonesia. Hanya saja, kesepakatan negara anggota G20 pada

pertemuan negara anggota G20 beberapa waktu yang lalu yang telah sepakat membuat program pertukaran data dan informasi perpajakan maupun perbankan yang akan diterapkan pada akhir 2017 menjadikan inisiatif pemerintah Indonesia untuk membentuk OFC kurang memberikan daya tarik yang lebih spesifik bagi investor. Pemerintah Indonesia dapat membentuk OFC, namun dengan konsep yang tentunya berbeda. Perbedaan tersebut dapat saja dilakukan dengan menawarkan manfaat yang berkelanjutan tanpa memberikan stimulus yang mendorong seseorang untuk melakukan penghindaran pajak yang harus dia bayarkan (Fuest, 2011). Manfaat tidak selalu direalisasikan dalam bentuk memperbesar keuntungan semata. Akan tetapi, manfaat juga dapat diperoleh dengan mengembangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

Perubahan *mindset* perusahaan multinasional dalam menjalankan usahanya di Indonesia tidak hanya dimotivasi oleh target pasar Indonesia yang luas. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak yang dapat dimanfaatkan sebagai target pemasaran, tujuan berdirinya perusahaan multinasional saat ini lebih difokuskan kepada pengembangan produk baru dan efisiensi biaya. Untuk efisiensi biaya, biaya tenaga kerja dengan standar upah kerja yang murah juga bukan menjadi alternatif perusahaan multinasional untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi adanya perubahan orientasi perusahaan multinasional untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia.

Pelajaran penting lainnya yang menjadi *finding keempat* dalam kasus *Apple Inc.* ini adalah hilangnya kedaulatan fiskal di Irlandia akibat integrasi ekonominya dengan Uni Eropa. Sebagai negara yang tergabung di dalam keanggotaan Uni Eropa, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah Irlandia tentu harus mensinkronkan dengan kesepakatan negara anggota Uni Eropa yang telah dibuat di dalam Traktat *Maastricht* maupun Traktat lainnya. Kasus *Apple Inc.* ini menjadi beban pemerintah Irlandia karena Komisi Uni Eropa menilai adanya penyimpangan jumlah pajak yang dibayarkan oleh *Apple Inc.* di Irlandia. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya perlakuan khusus pemerintah Irlandia terhadap

Apple Inc. Meskipun Uni Eropa tidak mengatur secara langsung jumlah dan tingkat pajak di negara-negara anggotanya (Taxation, 2016), Komisi Uni Eropa telah membuat keputusan adanya pelanggaran pajak yang dibayarkan *Apple Inc.* kepada pemerintah Irlandia. Menurut Komisi Uni Eropa, pelanggaran *Apple Inc.* timbul karena pajak *Apple Inc.* yang dibayarkan hanya sebesar 0.005% dari keuntungan perusahaan. Pembayaran tersebut jauh lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu sebesar 1% dari keuntungan perusahaan. Keputusan Komisi Uni Eropa akhirnya menjadi perdebatan dan konflik. Permasalahan ini menjadi dasar bahwa kedaulatan dalam memutuskan tingkat pajak di Irlandia harus diputuskan oleh Uni Eropa. Bantuan pemerintah Irlandia kepada *Apple Inc.* yang menjadi dasar pembuktian adanya pelanggaran tersebut.

Bagi Indonesia, kasus ini dapat menjadi pertimbangan bagi kedaulatan bangsa Indonesia pula. Sebagai negara anggota ASEAN yang telah masuk ke dalam tahap integrasi ekonomi di dalam komunitas masyarakat ASEAN, Indonesia harus mengantisipasi langkah dalam melihat kebijakan dan regulasi yang telah disepakati secara bersama-sama oleh negara anggota ASEAN. Antipasi dilakukan untuk mengeliminasi tindakan ketidakkonsistenan kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Kebijakan dan regulasi seringkali diabaikan ketika persaingan antar negara-negara anggota ASEAN semakin terbuka. Oleh sebab itu, langkah tepat dalam mengatasi permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak di negara ASEAN adalah dengan membuat iklim usaha yang kondusif di tanah air agar kontribusi dan manfaat yang diperoleh para pelaku usaha dapat lebih optimal. Langkah antisipasi ini akan dapat mendorong para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan usaha yang tidak hanya menciptakan produk dan cara yang inovatif semata tetapi juga memiliki strategi yang komunikatif dalam membangun jaringan industri nasional maupun industri internasional.

Empat temuan di atas yang merupakan hasil evaluasi kasus *Apple Inc.* di Irlandia menjadi identitas pembuka bagi pemerintah dan

masyarakat Indonesia dalam menentukan langkah dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan para investor. Kasus penghindaran pajak selalu dilakukan oleh siapa pun, baik itu individu, badan usaha yang memiliki skala usaha yang kecil, sampai dengan badan usaha yang memiliki skala usaha yang sangat besar. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk meningkatkan kepercayaan investor yang berkontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak seperti program *tax amnesty* sebagai contoh. Program *tax amnesty* yang dijalankan pemerintah Indonesia di tahun 2016 ini merupakan langkah lanjutan dari program fiskal pemerintah sebelumnya. Dengan program ini, pemerintah berharap *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak dapat kembali ke tanah air untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah berjalan saat ini.

PENUTUP

Hasil pembahasan mengenai *tax evasion Apple Inc.* di Irlandia menyimpulkan bahwa kepercayaan *Apple Inc.* sebagai investor di Irlandia masih berjalan sangat baik. Dukungan hukum, politik, dan moral dari Irlandia kepada *Apple Inc.* menjadi pertimbangan *Apple Inc.* untuk tetap bertahan dan menanamkan investasinya di Irlandia. Kondisi ekonomi di Irlandia yang membaik sejak masa krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu juga mendukung tingkat kepercayaan investor kepada Irlandia. Sebagai negara yang mendukung pelaksanaan *Offshore Financial Center (OFC)*, Irlandia tentu tidak akan melepaskan kepercayaan investor yang telah diberikan mereka kepada negara ini. Hal ini juga berlaku ketika pemerintah Irlandia tidak ingin melepas kepercayaan yang diberikan *Apple Inc.* kepada Irlandia.

Kasus *Apple Inc.* di Irlandia menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menyikapi hal yang sama apabila kasus ini terjadi di Indonesia. Pelajaran yang diambil adalah sikap dan kriteria yang diperlukan untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor kepada Indonesia. Sebagai anggota komunitas masyarakat ASEAN yang sudah berjalan sejak awal 2016, pemerintah Indonesia telah

mengambil sikap terhadap permasalahan pajak yang terjadi di Indonesia. Permasalahan pajak yang melibatkan perusahaan multinasional adalah salah satu masalah pajak yang menarik perhatian pemerintah karena perusahaan multinasional seringkali didapat melakukan tindakan kecurangan seperti *tax evasion* dengan cara *transfer pricing* atau selalu melaporkan keuangannya yang telah mengalami kerugian. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia saat ini berusaha keras menegakkan peraturan yang ada, namun dengan tetap memberikan komitmen untuk menjaga kepercayaan para investor.

Komunitas masyarakat ASEAN yang telah berjalan semakin jauh ini memberikan kesempatan dan tempat luas bagi perusahaan multinasional untuk mencari celah dan kekurangan atas kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan multinasional yang melakukan hal tersebut biasanya terdorong karena motivasi untuk mengoptimalkan keuntungan yang mereka peroleh. Namun di posisi yang berbeda, pemerintah Indonesia juga tidak ingin melepas kepercayaan yang diberikan perusahaan multinasional kepada pemerintah Indonesia.

Tax evasion atau penghindaran pajak memang permasalahan yang sangat sulit untuk dibuktikan kesalahannya dan banyak dialami oleh hampir setiap negara (Ciupitu, 2013). Menguras harta kekayaan dari orang yang memiliki kekayaan lebih banyak untuk meningkatkan penerimaan pajak tampaknya bukan merupakan satu-satunya cara yang efektif (Carbone, 2012). Sedangkan semua aparat pemerintah pengumpul pajak mengetahui bahwa penghindaran pajak lebih banyak dilakukan karena adanya motivasi untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Sampai saat ini, teknik penghindaran pajak sudah semakin luas hingga menjangkau ke seluruh negara. Dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan penanggulangan *tax evasion* tidak hanya melibatkan pemerintah, parlemen, dan organisasi jaringan bisnis semata. Namun, pemerintah perlu untuk terus membuka peluang kerjasama lanjutan dengan negara lain terutama untuk membuka jaringan informasi keuangan yang dilakukan

oleh perusahaan multinasional. Pemerintah tidak perlu khawatir terhadap kepercayaan investor. Yang perlu ditekankan adalah kesepakatan dan kerjasama perusahaan multinasional untuk mendorong ekonomi bangsa. Kepercayaan investor akan meningkat secara otomatis karena adanya kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya dari kompetitor yang saat ini mulai tumbuh dan berkembang sangat meningkat.

ACKNOWLEDGMENT

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Komara Djaja, S.E., M.Sc., Ph.D, Ibu Rofikoh Rokhim, S.E., SIP., DEA., Ph.D, dan Ibu Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia, M.A. yang telah memberikan pengarahan dalam mengajukan tema penulisan artikel ini. Di samping nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa jajaran staf di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan artikel ini.

PUSTAKA ACUAN

- Abbott, J. (2000). Treasure island or desert island? offshore finance and economic development in small island economies: the case of Labuan. *Development Policy Review*. Vol. 18. No. 2: p.157-175.
- Afrăsinei, M. (2013). The problem of tax havens and the Romanian tax authorities' Reaction. *Centre For European Studies (CES) Working Papers*, 5(2), 149-159.
- Apple's Job Creation in Europe. *Apple.com*. 2016
<<http://www.apple.com/uk/job-creation/>>
- Apple Press Info. (2015). *Apple to invest €1.7 billion in New European data centres*. [Press Release]
<<https://www.apple.com/pr/library/2015/02/23Apple-to-Invest-1-7-Billion-in-New-European-Data-Centres.html>>
- BBC. (2016). Apple tax case: why is Ireland refusing billions?
<<http://www.bbc.com/news/world-europe-37299430>>
- Barber, L. (2016). €13 billion tech giant Apple hits back after Brussels demands enormous irish tax payment. *Cityam.com*. 31 Agustus 2016. Issue 2, 671.
<<http://www.cityam.com/assets/uploads/content/2016/08/cityam-2016-08-31-1-57c61cc69273d.pdf>>
- Beahm, G. (2014). *Steve Jobs' life by design*. Terjemahan: Anshor, Z. (2014). *Belajar dari life by design, pidato Steve Jobs paling terkenal sepanjang Masa*. Jakarta: PT Gramedia, 48-54.
- _____ (2014). *Steve jobs' life by design*. Terjemahan: Anshor, Z. (2014). *Belajar dari life by design, pidato Steve Jobs paling terkenal sepanjang masa*. Jakarta: PT Gramedia, 161.
- _____ (2014). *Steve jobs' life by design*. Terjemahan: Anshor, Z. (2014). *Belajar dari life by design, pidato Steve Jobs paling terkenal sepanjang masa*. Jakarta: PT Gramedia, 172.
- Bejaković, P. (2014). Corruption and tax evasion in Croatia, institutional settings and practical experiences. *Middle East Law and Governance*. 6, 141-165.
- Berghel, H. (2014). The future of digital money laundering. *Computer*, 47(8), 70-75.
- Campbell, J. (2016). Apple tax ruling 'a serious blow' to Irish investment. *BBC*.
<<http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-37219372>>
- Carbone, V. (2012). The role of tax relief in a time of crisis. *Juridical Current*, 15(3), 76-80.
- Ciupitu, S. A. (2013). Analysis of tax evasion in Romania in the period 2009-2012. *Knowledge Horizonz/Orizonturi Ale Cunoasterii*, Special Issue, 87-91.
- Cristea, I. (2012). Reflections regarding the concept, forms, causes and effects of tax evasion. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*. 4(1), 431-439.
- Denman, D. (2014). The EU charter of fundamental rights: how sharp are its teeth?. *Judicial Review*, 19(3), 160-172.
- DG Taxation and Customs Union. (2016). Taxation trends in the European Union: data for the EU Member States, Iceland and Norway. *European Union: European Commission*.
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2016/econ_analysis_report_2016.pdf>
- Dumitrescu, C. D. (2010). Tax fraud—specific forms of manifestation in the underground economy. *Annals Of DAAAM & Proceedings*, 435-436.

- Edwards, J. (2016). Apple: you can have taxes or you can have jobs but you can't have both. *Business Insider*.
<<http://www.businessinsider.co.id/apple-eu-tax-ruling-profound-harmful-effect-investment-job-creation-2016-8/?r=US&IR=T>>
- European Union. (2016). State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to €13 billion. *European Commission, Press Release Database*.
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm>
- Erdős, É. (2010). Tax optimization, tax avoidance or tax evasion? contributions to the offshore companies' legal background. *Curentul Juridic*. 13(3), 54-67.
- Fisher, J. M. (2014). Fairer shores: tax havens, tax avoidance, and corporate social responsibility. *Boston University Law Review*, 94(1), 337-365.
- Fuest, C. (2011). Tax havens: shady deals. *the world today*, 67(7), 16-18.
- Grinberg, I. (2016). The New International Tax Diplomacy. *Georgetown Law Journal*, 104(5), 1137-1196.
- Hartnett, N. (2010). Trust and the financial planning relationship. *JASSA*, (1), 41-46.
- Hufbauer, G. C. and Lu, Z. L. (2016). Apple's tax dispute with Europe and the need for reform. Policy Brief. Peterson Institute for International Economics.
<<https://piie.com/system/files/documents/pb16-16.pdf>>
- Hug, S., & Spörri, F. (2011). Referendums, trust, and tax evasion. *European Journal Of Political Economy*, 27(1), 120-131.
- Kirton, H. (2016). Hollande casts doubt on EU-US trade negotiations. Cityam.com. 31 Agustus 2016. Issue 2, 671.
<<http://www.cityam.com/assets/uploads/content/2016/08/cityam-2016-08-31-1-57c61cc69273d.pdf>>
- Knobel, A. (2015). The next rising tax haven. *World Policy Journal*, 32(1), 43-52.
- Kollewe, J. (2015). 'Political crap': tim cook condemns Apple tax ruling. *The Guardian*.
<<https://www.theguardian.com/business/2016/sep/01/political-crap-tim-cook-apple-tax-ruling>>
- Măgureanu, G. (2011). Considerations on tax evasion. *Romanian Economic and Business Review*, 6 (4), 55-58.
- Manea, C. hA. (2015). Tax evasion in Romania—a national security issue. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*. 8(57) No. 1, 163-172.
- Müftüler-Baç, M and Cihangir, D. (2012). European integration and transatlantic relations. *Transworld Working Papers* 5,1—2.
<http://www.transworld-fp7.eu/wp-content/uploads/2012/11/TW_WP_05.pdf>
- Needham, C. (2013). Corporate tax avoidance by multinational firms. Library Briefing. Library of the European Parliament.
<[http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130574/LDM_BRI\(2013\)130574_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130574/LDM_BRI(2013)130574_REV1_EN.pdf)>
- Nonaka, I. and Kenney, M. (1991). Towards a new theory of innovation managenebt: a case study comparing Canon, Inc. and Apple Computer, Inc. *Journal of Engineering and Technology Management*, 8(1), 67-83
- Osmani, R. (2015). The level of the shadow economy, tax evasion and corruption: the empirical evidence for SEE countries. *SEEU Review*, 11(2), 6-22.
- Preuss, L. (2012). Responsibility in paradise? the adoption of CSR Tools by companies domiciled in tax havens. *Journal of Business Ethics*. 110(1), 1-14.
- Radu, C. F. (2014). About tax compliance: some reasons why people pay their taxes. *The Scientific Journal of Humanistic Studies*. 6(10), 107-112.
- Remeur, C. (2015). Tax policy in the EU. *European Parliamentary Research Service, In-Depth Analysis*.
<[http://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/IDAN/2015/549001/EPRS_IDA\(2015\)549001_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/IDAN/2015/549001/EPRS_IDA(2015)549001_EN.pdf)>
- Rizea, M., Croitoru, E.L., and Ungureanu, M.D. (2010). Acts of tax evasion and fraud and financial impact of these phenomena in the European Union. *Romanian Economic and Business Review*, 5 (3), 116-125.
- Sapiro, M. (2016). US election note: trade policy after 2016. *Chatham House The Royal Institute of International Affairs. Research Papers*, 1-13.
<<https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-08-31-us-election-note-trade-sapiro.pdf>>
- Siregar, B. (2016). Uni Eropa perang penghindar pajak. *Majalah Gatra*. 8—14 September 2016(45), 28-32.
- Taxation. (2016). European Union <https://europa.eu/european-union/topics/taxation_en>

Tax Justice Network. (2007). *Identifying tax havens and offshore financial centres*.

<http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf>

Zoromé, A. 30 Agustus 2016. *Concept of offshore financial centers in search of an operational definition*. International Monetary Fund Working Paper.

< <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf>>

PENGARUH *CULTURE SHOCK* DAN *ADVERSITY QUOTIENT* TERHADAP KEPUASAN KERJA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI HONGKONG

**Muhammad Iqbal
Anggit Verdaningrum**

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana
Email: iqbal.ukm@gmail.com

Diterima: 30-6-2016

Direvisi: 27-7-1026

Disetujui: 18-8-2016

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the influence of culture shock and adversity quotient to work satisfaction of Indonesian Labor Forces in Hong Kong. This quantitative research includes multiple regression analysis with 111 respondent. The sampling technique is using Nonprobability Sampling. Purposive Sampling with sample criteria: Indonesian citizen who works in Hongkong, female, working in domestic sector, has been working for a minimum of 6 months in Hongkong. Her age must be 20 years old or older, and she must have an education at least of an Elementary School level. Measurement for Culture Shock the result of the adaptation of Mumford, the measurement for Adversity Quotient the result of a modification of Rachmawati, and the measurement for work satisfaction is the result of the adaptation of Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) Short Form scale. According to analysis from the double regression analysis of the Anova tabl 8.837 Fb and Ft 3.08. so that F count > F table e , we got $p = 0.000$ ($p < 0.05$), $R = 0.140$. Research hypothesis is accepted.

Keywords: *culture shock, adversity quotient, job satisfaction, TKI.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *culture shock* dan *adversity quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong. Penelitian kuantitatif ini melibatkan analisis regresi berganda dengan subjek sebanyak 111 responden. Teknik pengambilan sampel dengan *Non Probability Sampling. Sampling Purposive* dengan *criteria sampel*: Warga Negara Indonesia yang bekerja di Hongkong, perempuan, bekerja pada sektor rumah tangga, minimum lama bekerja di Hongkong 6 bulan, usia minimal 20 tahun, dan pendidikan minimal SD. Alat ukur *culture shock* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari alat ukur milik Mumford, alat ukur *adversity quotient* merupakan hasil modifikasi milik Rachmawati, dan alat ukur kepuasan kerja merupakan hasil adaptasi skala *Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) Short Form*. Berdasarkan analisis regresi berganda pada tabel Anova didapatkan Fh 8.837 dan Ft 3.08. sehingga F hitung > F tabel, dan nilai Sig. 0.000 ($p < 0.05$) $R = 0.140$. Hipotesis penelitian diterima.

Kata Kunci: *culture ahook, adversity quotient, kepuasan kerja, TKI.*

PENDAHULUAN

Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja keluar negeri merupakan sebuah fenomena dan sudah terjadi sejak lama, khususnya pada Tenaga Kerja Indonesia Perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ada banyak faktor Tenaga Kerja Indonesia Perempuan yang bekerja pada sektor rumah tangga, menurut Iqbal & Gusman (2015) ada faktor pendorong dan faktor penarik Tenaga Kerja Indonesia Perempuan yang bekerja di luar negeri. Kisah sukses tetangga, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki ekonominya merupakan faktor pendorong, sedangkan faktor penarik adalah jumlah gaji yang tinggi di negara tujuan, peluang kerja yang terbuka dan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Migrasi tenaga kerja keluar negeri setiap tahunnya terus meningkat, Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2011, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada sektor formal 2010 saat ini terdapat kurang lebih 6 juta TKI di luar negeri, sekitar 4,3 juta orang tercatat pada pemerintahan serta sisanya merupakan TKI tidak tercatat alias tidak berdokumen resmi. TKI yang tertarik dengan Hongkong adalah karena gaji Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang juga cukup besar. Selain gaji yang besar Pemerintahan Hongkong pun membuat kontrak kerja yang menguntungkan bagi TKI seperti, (1) hari istirahat: satu hari setiap tujuh hari kerja (tidak kurang dari 24 jam); (2) Hari Libur Nasional: 12 hari setiap tahun, cuti tahunan yang dibayar, cuti pulang kampung dan cuti melahirkan.

Berdasarkan keuntungan-keuntungan tersebut, membuat banyaknya TKI khususnya berjenis kelamin perempuan yang memilih Hongkong sebagai negara tujuan dengan jumlah sekitar 150 ribu orang sebagai penata laksana rumah tangga (dalam BNP2TKI, 2011). Kenaikan gaji tersebut dari upah sebelumnya HK\$4110 menjadi HK\$4210/bulan, sedangkan untuk tunjangan uang makan PRT migran di Hongkong sebesar HK\$964 dan naik menjadi HK\$995/bulan Peningkatan upah minimum pekerja dan tunjangan untuk makan akan mulai berlaku untuk PRT migran yang menandatangani kontrak per 1 Oktober 2015.

Berkaitan dengan tingginya gaji yang didapatkan oleh TKI di Hongkong daripada TKI di negara tujuan lainnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong mencatat setidaknya ada 1.500 tenaga kerja Indonesia yang sudah melebihi batas tinggal mereka atau *overstayer* di negara itu. Demi tetap bisa tinggal di Hongkong, sebagian mereka pun mengandalkan *recognition paper* atau pengganti paspor yang diterbitkan imigrasi setempat. Berdasarkan penelitian Xue Bai (2012), lamanya tinggal di Hongkong termasuk dalam bagian yang memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja, sedangkan menurut Tongsing (2010) bagi para imigran yang baru bermigrasi dengan alasan apapun mereka terlibat dalam perubahan besar kehidupan bermasyarakat seperti meninggalkan negara mereka, serta perubahan yang dihasilkan dari kontak dengan budaya baru.

Dalam OXFAM-HK & ILO-Indonesia (2007), terdapat 41% buruh migran Hongkong yang belum memiliki pengalaman bekerja di luar negeri, dan Hongkong merupakan negara pertama yang dikunjunginya. Dengan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Hongkong, Kebebasan TKI di Hongkong mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri, banyak di antara TKI yang mengalami ketidaksiapan akan budaya yang berbeda yang menyebabkan TKI mengalami kejutan budaya (*culture shock*), beberapa juga merasa kesepian (*Lonliness*), perasaan kehilangan akan keluarga, anak, suami, dan saudara yang lainnya. Beberapa TKI gagal dalam menyimpan uangnya (gaji), karena mencoba gaya hidup yang berlebih-lebihan.

Menurut Oberg (2004), *culture shock* menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustrasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya baru. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), mengakui banyaknya pengaduan dari TKI soal hak dasar yang tidak dipenuhi. "Seperti gaji tidak tepat waktu, pekerjaan yang *overload*, kerja tanpa batas waktu yang jelas hingga tidak ada hak cuti. Berikut 10 masalah yang paling banyak diajukan para TKI per Januari 2015: (1) Gaji tidak dibayar (55 kasus), (2) Overstay (43 kasus), (3) TKI

ingin dipulangkan (43 kasus), (4) Meninggal dunia di negara tujuan (42 kasus), (5) TKI Gagal berangkat (37 kasus), (6) Putus Hubungan Komunikasi (30 kasus), (7) TKI sakit/rawat inap (14 kasus), (8) Tindak kekerasan dari majikan (13 kasus), (9) Pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja (11 kasus), (10). Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai (9 kasus)

Dalam hal lain, TKI bukan hanya berhadapan dengan *culture shock* saja, masih banyak permasalahan-permasalahan lain, menurut data Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJR) Tahun 2004 ada beberapa permasalahan yang dialami TKI yaitu (1) Dokumen tidak lengkap (2.87%), (2) Gaji tidak dibayar (4.17%), (3) Kecelakaan kerja (1.67%), (4) Komunikasi tidak lancar (1.03%), (5) Majikan bermasalah (20.43%), (6) Majikan meninggal dunia (1.42%), (7) Membawa anak (0.78%), (8) Pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (1.70%), (9) Pelecehan seksual (5.28%), (10) Penganiayaan (5.55%), (11) PHK sepihak (22.91%), (12) Sakit akibat kerja (17.53), Depresi (1.16%), (13) Sakit bawaan (4.80%), (14) Tidak mampu bekerja (0.98%), (15) TKI hamil (1.14%), (16) Tanpa keterangan (tidak diisi keterangan apapun) (2.51%).

Berdasarkan data di atas permasalahan yang di alami oleh TKI sangat banyak dan cukup rumit. Akan tapi, saat individu memiliki sikap pantang menyerah yang tinggi, maka individu tersebut akan mampu melewatinya dengan baik. Sikap pantang menyerah disebut dengan daya juang. Daya juang atau *Adversity Qoutient* (Paul G. Stoltz, 2000).

Permasalahan-permasalahan yang ada di atas, memang tidak sepenuhnya dialami oleh seluruh TKI, namun setiap TKI pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Dalam kenyataannya, TKI dituntut untuk mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik, baik dalam permasalahan keagetan budaya (*culture shock*) ataupun permasalahan-permasalahan yang berat seperti di atas. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkannya sikap pantang menyerah dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi permasalahan. Sikap

demikian disebut *adversity quotient*. Stoltz (2000) mendefinisikan *adversity quotient* sebagai kecerdasan menghadapi rintangan atau kesulitan.

Selain itu, menurut Stoltz (2000), saat individu memiliki *adversity quotient* yang tinggi, maka individu tersebut berani menyambut tantangan-tantangan dan dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, memiliki semangat yang tinggi, serta berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap Kepuasan Kerja TKI di Hongkong.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan Kerja

Kepuasan Kerja menurut Weiss, Dawis, England dan Lofquist (dalam Putri, 2013) menjelaskan kepuasan kerja sebagai melakukan perbandingan yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai serta memelihara kesesuaian antara diri dan lingkungan mereka. Kesesuaian dengan lingkungan dapat diartikan sebagai karyawan memenuhi keinginan organisasi dan organisasi memenuhi keinginan karyawan (Cook, Hepworth, Wall & Warr, 1981). Karyawan akan mengalami kepuasan kerja, jika mereka merasa bahwa kapasitas, pengalaman, dan nilai-nilai yang mereka miliki dapat dimanfaatkan oleh organisasi dan lingkungan kerja menawarkan keuntungan serta *reward* pada mereka (Dawis, 1992; Roberts & Roseanne, 1998). Aspek kepuasan kerja yaitu kepuasan ekstrinsik, kepuasan intrinsik, dan kepuasan umum.

Kepuasan kerja menurut As'ad (1999) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Sedangkan Locke (2008) menjabarkan bahwa perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan atau ketidakpuasan kerja cenderung lebih mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau daripada harapan-harapan untuk masa yang akan datang. Sedangkan Moorse (2002) mengemukakan bahwa pada dasarnya, kepuasan kerja tergantung kepada apa

yang diinginkan seseorang dari pekerjaannya dan apa yang mereka peroleh.

Menurut Rivai (2004) faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja adalah: (a) isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan; (b) pengawasan; (c) organisasi dan manajemen; (d) kesempatan untuk maju; (e) gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya insentif; (f) rekan kerja; dan (g) kondisi pekerjaan. Berdasarkan faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja yang diungkapkan oleh Rivai tersebut, gaji merupakan salah satu aspek yang mampu mengukur seberapa puas seseorang atas pekerjaannya.

Teori Kepuasan kerja ada tiga macam yang lazim dikenal menurut Wexley dan Yukl (dalam Sunyoto, 2012) yaitu:

1. *Discrepancy Theory* (Teori Ketidaksesuaian)
Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter (1961). Ia mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kemudian Locke (1969) menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada *discrepancy* antara *should be (expectation needs or value)* dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah diperoleh melalui pekerjaan. Menurut penelitian yang dilakukan Wanous dan Lawer (1972) yang dikutip dari Wexley dan Yukl, menemukan bahwa sikap karyawan terhadap pekerjaan tergantung bagaimana *discrepancy* itu dirasakan.
2. *Equity Theory* (Teori Keadilan)
Teori ini dikembangkan oleh Adams tahun 1963, pendahulu dari teori ini adalah Zalzenik tahun 1958 yang dikutip dari Locke (1969). Prinsip teori ini adalah bahwa orang akan merasakan puas dan tidak puas, tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (*equity*). Perasaan *equity* dan *inequity* atas situasi diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor dan perintah dipengaruhi oleh motivasi.

3. *Two Factor Theory*

Prinsip teori ini bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda, artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan tidak merupakan variabel yang kontinu. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Frederick Herzberg tahun 1959. Ia membagi situasi yang memengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaan menjadi dua kelompok, yakni: (a) *Satisfiers* atau motivator adalah situasi yang membuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja, yang terdiri dari *achievement, recognition, work it self, responsibility and advecement*. (b) *Dissatisfier (hygiene factors)* adalah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan kerja yang terdiri dari *company policy and administration, supervision, technical, salary, interpersonal, relation, working condition, job security and status*.

Menurut teori ini perbaikan *salary* dan kondisi kerja tidak akan mengurangi ketidakpuasan tetapi hanya mengurangi ketidakpuasan kerja. Selanjutnya Herzberg mengemukakan bahwa yang dapat memacu orang bekerja dengan baik dan bergairah hanyalah kelompok *Satisfiers*.

Culture Shock

Culture shock memiliki banyak istilah ada yang menyebutnya sebagai guncangan budaya, gegar budaya, benturan budaya, ataupun adaptasi budaya. Namun, semua istilah tersebut menjelaskan bahwa *culture shock* berasal dari kekagetan individu atas perbedaan budaya suatu tempat yang individu tersebut datang dengan budaya asal (budaya yang dibawa oleh individu tersebut). *Culture shock* (kejutan kebudayaan) merupakan proses guncangan kebudayaan sebagai akibat terjadinya perpindahan secara tiba-tiba dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya (Basrowi, 2005).

Culture shock menurut Oberg (2004) menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustrasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya baru. Oberg

(2004) terdapat enam aspek dari *culture shock*, yaitu: (1) Ketegangan karena adanya usaha untuk beradaptasi secara psikis, (2) Perasaan kehilangan dan kekurangan keluarga, teman, status, dan kepemilikan, (3) Penolakan terhadap dan dari orang-orang di lingkungan baru, (4) Adanya kebingungan mengenai peran, harapan terhadap peran tersebut, nilai yang dianut, perasaan, dan identitas diri, (5) Tidak menyukai adanya perbedaan bahasa, kebiasaan, nilai atau norma, sopan-santun di daerah asal dengan di daerah baru, (6) Perasaan tidak berdaya yang disebabkan oleh ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Menurut Oberg (2004), menyatakan bahwa derajat empat tahap dalam *culture shock* yaitu: (1) *Honeymoon stage*, terjadi selama minggu-minggu pertama dan dapat berlangsung sampai enam bulan. Mahasiswa terpesona oleh hal-hal dan situasi baru pertama kali dialaminya. (2) *Christ stage*, terjadi pada saat mereka harus menghadapi situasi kehidupan yang sebenarnya dan kemudian mereka menyadari akan perbedaan-perbedaan dalam bahasa, tidak kuat, frustrasi, dan marah. Jika mereka dapat mengatasi tahapan krisis ini, mereka biasanya dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun demikian, mungkin saja menjadi individu gagal. (3) *Recovery Stage*, menggunakan beberapa metode untuk memecahkan permasalahan mereka dalam tahap krisis. Misalnya, dengan mengembangkan suatu sikap tertentu. (4) *Adjusment Stage*, mereka mulai menikmati budaya yang baru, walaupun kecemasan dan ketegangan masih kadang-kadang terjadi.

Adversity Qoutient

Adversity Qoutient (AQ) diukur dan ditafsirkan dalam bentuk *adversity qoutient* untuk memahami keadaan dan pola dari individu yang bersangkutan dalam menghadapi kehidupan dan mengembangkan dirinya menuju kearah pencapaian tingkatan kehidupan. *Adversity Qoutient* mempunyai tiga bentuk yaitu, *Pertama*, AQ adalah suatu kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan kesuksesan. *Kedua*, AQ adalah suatu ukuran untuk mengetahui respons terhadap kesulitan.

Ketiga, AQ adalah serangkaian perlatan yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respons terhadap kesulitan.

Adversity Quotient menurut Paul G Stoltz (2008) mendefinisikan hal ini sebagai kecerdasan menghadapi rintangan atau kesulitan. Aspek *Adversity Quotient* yaitu *Control*, *Origini*, *Ownership*, *Reach*, dan *Endurance*. Aspek-aspek *Adversity Quotient*, dikemukakan oleh Paul G. Stoltz sering disingkat menjadi CO2RE, yaitu: (1) *Control/Kendali*: sejauh mana seseorang mampu mengelola sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan di masa mendatang. (2) *Origin/Asal Usul*: sejauh mana seseorang mempersalahkan dirinya tidak mendapati bahwa kesalahan tersebut berasal dari dirinya, atau sejauh mana seseorang mempersalahkan orang lain atau lingkungan yang menjadi sumber kesulitan atau kegagalan seseorang. (3) *Owenership/Pengakuan*: sejauh mana seseorang mengakui akibat-akibat kesulitan dan kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan tersebut. (4) *Reach/Jangkauan*: sejauh mana kesulitan ini akan merambah kehidupan seseorang, menunjukkan bagaimana suatu masalah mengganggu aktivitas lainnya, sekalipun tidak berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. (5) *Edurance/ Daya Tahan*: makin tinggi daya tahan seseorang, makin mampu menghadapi berbagai kesukaran yang dihadapinya.

Paul G. Stoltz (2010) mengelompokkan individu menjadi 3 yaitu: 1) *Quitters: Quitters* bekerja sekedar cukup untuk hidup. Mereka memperlihatkan sedikit ambisi, semangat yang minim dan mutu di bawah standar. Mereka mengambil risiko sesedikit mungkin dan biasanya tidak kreatif, kecuali saat mereka harus menghindari tantangan-tantangan besar. 2) *Campers: Campers* masih menunjukkan sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan beberapa usaha. Mereka akan bekerja keras dalam hal apa pun yang bisa membuat mereka merasa lebih aman dibandingkan dengan yang telah mereka miliki. Mereka mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. 3) *Climbers: Climbers* menyambut baik tantangan-tantangan dan mereka hidup dengan pemahaman bahwa ada hal-hal yang mendesak dan harus segera dibereskan. Mereka bisa memotivasi diri sendiri, memiliki semangat

tinggi dan berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Climber merupakan katalisator tindakan; mereka cenderung membuat segala sesuatunya terwujud.

Stoltz (2008) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi *Adversity Quotient* yaitu: (1) Daya saing, menurut Martin Seligman (Stoltz, 2000) seseorang yang memiliki *Adversity Quotient* rendah ketika mengalami ketidakberdayaan, akan kehilangan kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut. (2) Produktivitas, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2004) menunjukkan bahwa seseorang yang merespon kesulitan secara konstruktif memiliki peningkatan kinerja lebih baik ketimbang orang yang merespon secara destruktif. (3) Motivasi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Stoltz (2000) menemukan bahwa orang-orang yang memiliki *Adversity Quotient* (AQ) tinggi merupakan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. (4) Mengambil risiko, Satterfield dan Seligman (2000) menemukan bahwa orang-orang yang merespon kesulitan secara lebih konstruktif bersedia mengambil lebih banyak risiko sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan dengan lebih baik. (5) Perbaikan, perbaikan secara terus-menerus akan membantu seseorang bertahan mengalami kegagalan-kegagalan yang dihadapi. (6) Ketekunan, ketekunan adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha (Daryanto, 1997). (7) Belajar, menurut Carol Dweck (Stoltz) membuktikan bahwa anak-anak yang merespon secara optimis akan banyak belajar dan lebih berprestasi dibandingkan anak-anak yang memiliki pola lebih pesimistis. (8) Merangkul perubahan, dalam penelitian Stoltz menemukan bahwa orang-orang yang memeluk perubahan cenderung merespon kesulitan secara lebih konstruktif, (9) Keuletan, psikolog anak Emmy Werner (Stoltz) menemukan bahwa anak-anak yang ulet adalah rencana-perencana, mereka yang mampu menyelesaikan masalah dan mereka yang bisa memanfaatkan peluang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan teknik *Non Probability Sampling*

(dalam Sugiyono, 2010) yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*. Menurut Sugiyono (2010), *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan responden dalam penelitian adalah: (1) Warga Negara Indonesia yang bekerja di Hongkong, (2) Perempuan, (3). Bekerja pada sektor Rumah Tangga, (4). Minimum lama bekerja di Hongkong 6 bulan, (5) Usia minimal 20 tahun, (6). Pendidikan minimal SD.

Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan media online yaitu dengan *google.doc* dan menyebarkan kuesioner langsung dengan bantuan lembaga SBMI (Serikat Buruh Migrant Indonesia). Skala Kepuasan Kerja menggunakan MSQ *Short Form* dan Skala *Culture Shock* milik Mumford merupakan skala yang diadaptasi. Alat ukur diadaptasi oleh dengan cara diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Lalu setelah didapatkan terjemahannya diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris, hal ini dilakukan demi mengetahui apakah proses penerjemahan masih sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengukuran atau tidak. Sedangkan Skala *Adversity Quotient* merupakan skala modifikasi oleh Rachmawati, modifikasi dilakukan dengan melakukan perubahan kalimat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi subjek dalam penelitian ini yaitu TKI.

Skala MSQ memiliki 5 alternatif jawaban yaitu dari sangat tidak puas hingga sangat puas, Skala *Culture Shock* memiliki 3 alternatif jawaban yaitu tidak pernah, kadang-kadang dan sering, dan Skala *Adversity Quotient* memiliki 4 alternatif jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil *try out* menggunakan 30 subjek didapatkan nilai reabilitas alat ukur sebagai berikut:

Tabel 1. Alpha Crombach

Skala	Jumlah Aitem	Alpha Crombach	Keterangan
Kepuasan Kerja (MSQ Short Form)	20	0.698	Reliabel
Culture Shock	12	0.763	Reliabel
Adversity Quotient	34	0.938	Sangat Reliabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja (variabel terikat), sehingga menggunakan metode analisis regresi untuk melakukan pengujian dan pembuktian secara statistik pengaruh antara *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja. Penghitungan metode ini diolah program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 17.0.

HASIL PENELITIAN

Data diperoleh melalui kuesioner online menggunakan *google.doc* dan bantuan penyebaran kuisisioner langsung oleh SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia). Sehingga di dapatkan total responden yang di olah sebanyak 111 responden 100 % perempuan.

Tabel 2. Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
6 Bulan – 36 Bulan (3 Tahun)	50	45.05 %
37 Bulan – 67 Bulan	30	27.03 %
68 Bulan - 98 Bulan	16	14.41 %
99 Bulan – 129 Bulan	8	7.21 %
130 Bulan – 160 Bulan	4	3.60 %
161 Bulan – 191 Bulan	3	2.70 %
Total	111	100 %

Tabel 3. Demografi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
20 – 25 Tahun	27	24.32 %
26 – 31 Tahun	46	41.44 %
32 – 37 Tahun	28	25.23 %
38 – 43 Tahun	10	9.01 %
Total	111	100 %

Tabel 4. Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	8	7.21 %
SMP/ Sederajat	45	40.54 %
SMA/ Sederajat	51	45.95 %
D3	3	2.70 %
S1	4	3.60 %
Total	111	100 %

Berdasarkan ketiga tabel di atas didapatkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini lama bekerjanya berkisar antara 6 bulan sampai 36 bulan sebanyak 50 orang dengan persentase sebesar 45.05%, berdasarkan usia berkisar antara 26-31 tahun sebanyak 46 orang dengan persentase sebesar 41.44% dan berdasarkan pendidikan terakhir yaitu SMA/ Sederajat sebanyak 51 orang dengan persentase sebesar 45.95%. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel maka didapatkan:

Tabel 5. Skor Kategorisasi *Culture Shock*

Kategori	Rentang	Frekuensi	%
Rendah	<6	13	11.72 %
Sedang	6-14	92	82.88 %
Tinggi	>14	6	5.4 %
TOTAL		111	100 %

Tabel 6. Skor Kategorisasi *Adversity Quotient*

Kategori	Rentang	Frekuensi	%
Rendah	<87	14	12.61 %
Sedang	87-105	85	76.58 %
Tinggi	>105	12	10.81 %
TOTAL		111	100

Tabel 7. Skor Kategorisasi Kepuasan Kerja

Kategori	Rentang	Frekuensi	%
Rendah	<63	13	11.71 %
Sedang	63-85	79	71.17 %
Tinggi	>85	19	17.12 %
TOTAL		111	100

Berdasarkan Tabel 5, 6 dan 7 diketahui bahwa gambaran *Culture Shock* yang dirasakan oleh TKI di Hongkong dalam penelitian ini masuk pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 92 responden dengan persentase 82.88%, gambaran *Adversity Quotient* yang dilakukan oleh TKI di Hongkong dalam penelitian ini masuk pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 85 responden dengan persentase 76.58%, dan untuk kepuasan kerja yang dirasakan oleh TKI di Hongkong dalam penelitian ini dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 79 responden dengan persentase 71.17%.

Hasil uji normalitas didapatkan nilai Sig. sebesar 0.855. di mana $p > 0.05$. sehingga dapat disimpulkan data yang diuji berdistribusi normal. Analisis regresi ganda antara *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong, dilakukan dengan menggunakan uji regresi ganda pada program SPSS versi 17.00. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel Anova, diketahui bahwa nilai Sig. 0.000 ($p < 0.05$) sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan F hitung 8.837 dan F tabel 3.08. sehingga F hitung $>$ Ftabel, maka terdapat pengaruh yang Signifikan dengan R Square 0,141 atau 14.1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* sebesar 14.1 %, sedangkan sisanya 85.9 % dipengaruhi oleh variabel lain, di luar variabel penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis di atas didapatkan hasil **H1 diterima**, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong.

Analisis regresi sederhana antara *Culture Shock* dengan kepuasan kerja pada program SPSS versi 17.00. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel Anova, diketahui bahwa nilai Sig. 0.038 ($p < 0.05$) sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan F hitung 4.421 dan F tabel 3.08. sehingga F hitung $>$ F tabel, maka terdapat pengaruh yang Signifikan. Dengan nilai R Square sebesar 0.039 atau 3,9 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh *Culture Shock* terhadap kepuasan kerja sebesar 3,9 %.

Analisis regresi sederhana antara *Adversity Quotient* dengan kepuasan kerja pada program SPSS versi 17.00. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel Anova, diketahui bahwa nilai Sig. 0.000 ($p < 0.05$) sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan F hitung 17.392 dan F tabel 3.08. sehingga F hitung $>$ F tabel, maka terdapat pengaruh yang Signifikan. Dengan nilai R Square sebesar 0.138 atau 13,8 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja sebesar 13,8 %.

PEMBAHASAN

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut hasil pengolahan data mulai dari *Culture Shock* berdasarkan tabel 4.8 didapatkan bahwa TKI yang bekerja di Hongkong dalam penelitian ini mengalami tingkatan *culture shock* dengan kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 92 orang (82.88%), kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 13 orang (11.72%), dan kategori tinggi dengan frekuensi 6 orang (5.4 %).

Oberg (2004) menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustrasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya baru. Dalam penelitian ini, didapati bahwa tidak semua TKI di Hongkong mengalami *Culture Shock* yang tinggi atas terjadinya perpindahan budaya, karena hanya sebesar 5.4% yang mengalami *Culture Shock* dengan kategori tinggi.

Taft (1977) (dalam Mumford, 1998) menjelaskan aspek-aspek *Culture Shock* seperti: (a) Ketegangan atau tekanan sebagai akibat dari tenaga yang dibutuhkan untuk beradaptasi secara psikologis. (b) Perasaan kehilangan dalam hal teman, status, profesi, dan posesi, (c) Ditolak oleh anggota kebudayaan baru, (d) Kebingungan dalam peran, ekspektasi peran, nilai, perasaan, dan identitas diri, (e) Kekagetan, kecemasan dan bahkan perasaan jijik dan marah setelah sadar akan perbedaan budaya, (f) Perasaan ketidakmampuan karena tidak bisa mengatasi atau beradaptasi dengan lingkungan baru.

Berdasarkan aspek *Culture Shock* yang dijabarkan oleh Taft, diketahui bahwa sebesar 5.4% TKI di Hongkong mengalami *Culture Shock* yang tinggi dengan tingginya ketegangan atau tekanan sebagai akibat dari tenaga yang dibutuhkan untuk beradaptasi secara psikologis, tingginya perasaan kehilangan dalam hal teman, status, profesi dan posesi, tingginya perasaan ditolak oleh anggota kebudayaan baru, tingginya kebingungan dalam peran, ekspektasi peran, nilai, perasaan dan identitas diri, tingginya kekagetan, kecemasan dan bahkan perasaan jijik dan marah setelah sadar dengan adanya perbedaan budaya antara Indonesia dengan Hongkong, serta tingginya perasaan ketidakmampuan karena tidak bisa mengatasi atau beradaptasi dengan lingkungan baru.

Menurut Stoltz, *Adversity Quotient* sebagai kecerdasan menghadapi rintangan atau kesulitan. Berdasarkan tabel 7 didapatkan bahwa TKI yang bekerja di Hongkong dalam penelitian ini memiliki *Adversity Quotient* dengan kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 85 orang (76.58 %) yang paling dominan, dibanding kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 14 orang (12.61 %), dan kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 12 orang (10.81%).

Mengacu pada klasifikasi Stoltz, didapati bahwa sebagian besar TKI di Hongkong memiliki *Adversity Quotient* dalam kategori *Campers* sebanyak 85 orang (76.58 %) di mana TKI menunjukkan sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan beberapa usaha. Mereka akan bekerja keras dalam hal apapun yang bisa membuat mereka merasa lebih aman dibandingkan dengan yang telah mereka miliki. Mereka mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Kategori *Quitters* sebanyak 14 orang (12.61%) di mana TKI memperlihatkan sedikit ambisi, semangat yang minim dan mutu di bawah standar. Mereka mengambil risiko sesedikit mungkin dan biasanya tidak kreatif, kecuali saat mereka harus menghindari tantangan-tantangan besar dan Kategori *Climbers* sebanyak 12 orang (10.81%) di mana TKI menyambut baik tantangan-tantangan dan mereka hidup dengan pemahaman bahwa ada hal-hal yang mendesak dan harus segera dibereskan. Mereka bisa memotivasi diri

sendiri, memiliki semangat tinggi dan berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup.

Sedangkan untuk kepuasan kerja berdasarkan tabel 4.9 didapatkan bahwa TKI yang bekerja di Hongkong dalam penelitian ini merasakan kepuasan kerja kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 79 orang (71.17%) yang paling dominan, dibanding kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 13 orang (11.71%), dan kategori tinggi dengan frekuensi 19 orang (17.12%). Hal ini sama seperti penelitian penelitian sebelumnya di mana Xue Bai mendapati bahwa 85% pembantu merasa puas akan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS pengujian regresi berganda pada variabel *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong, didapatkan nilai F hitung $> F$ tabel, $8.837 > 3.08$. dan Signifikan $0.000 < 0.05$, berdasarkan nilai F hitung dan Signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yaitu Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong. Dengan Nilai *R Square* sebesar 0.141 atau 14.1% *culture shock* dan *adversity quotient* mempengaruhi kepuasan kerja TKI di Hongkong.

Sedangkan bila variable diujikan secara terpisah menggunakan SPSS Pengujian regresi sederhana pada variable *Culture Shock* dengan kepuasan kerja TKI di Hongkong, didapatkan F hitung 4.421 dan F tabel 3.08 dengan Sig 0.038 ($p < 0.05$). Sehingga F hitung $> F$ tabel, maka terdapat pengaruh yang Signifikan. Dengan nilai *R Square* sebesar 0.039 atau 3,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh *Culture Shock* terhadap kepuasan kerja sebesar 3,9%.

Untuk variabel *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong, didapatkan Dengan F hitung 17.392 dan F tabel 3.08 dengan Sig. 0.000 ($p < 0.05$), sehingga F hitung $> F$ tabel, maka terdapat pengaruh yang Signifikan. Dengan nilai *R Square* sebesar 0.138 atau 13,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh *adversity quotient* terhadap kepuasan kerja sebesar 13,8%.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini H0 ditolak, dan H1 diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data *Culture Shock* mempengaruhi kepuasan kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar 3,9%. Gambaran *Culture Shock* dengan hasil analisis deskriptif rata-rata TKI di Hongkong merasakan *Culture Shock* kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 92 orang (82.88%).

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data *Adversity Quotient* mempengaruhi kepuasan kerja TKI di Hongkong sebesar 13,8%. Gambaran *Adversity Quotient* dengan hasil analisis deskriptif rata-rata TKI di Hongkong memiliki *Adversity Quotient* kategori sedang dalam kategori Stoltz diberi nama *Campers* sebanyak 85 orang (76.58%) yang menunjukkan sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan beberapa usaha. Mereka akan bekerja keras dalam hal apapun yang bisa membuat mereka merasa lebih aman dibandingkan dengan yang telah mereka miliki. Gambaran kepuasan kerja dengan hasil analisis deskriptif rata-rata TKI di Hongkong merasakan kepuasan kerja dengan kerja kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 79 orang (71.17%). Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong dengan nilai F hitung 8.837 dan F tabel 3.08, sehingga F hitung > F tabel, dan nilai Sig. 0.000 ($p < 0.05$) sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* berpengaruh terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong sebesar 14.1%. sedangkan sisanya 85.9% dipengaruhi oleh variable lain, di luar variabel penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, didapatkan bahwa H1 diterima yaitu terdapat pengaruh yang

signifikan antara *Culture Shock* dan *Adversity Quotient* terhadap kepuasan kerja TKI di Hongkong.

PUSTAKA ACUAN

- Arikunto, (2007). *Manajemen penelitian*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, (2012). *Reliabilitas dan validitas*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bai, X. (2013). Determinants of job satisfaction in foreign domestic helpers caring for people with dementia in Hong Kong. Hongkong: The Hong Kong Polytechnic University Hung Hom.
- Basrowi. (2005). Pengantar sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- BNP2TKI. (2011). 5 Tahun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengabdikan dengan cinta. Jakarta: BNP2TKI.
- Buruh Migran.or.id (2015). Informasi negara tujuan Hongkong. 15 mei 2011. Dapat diakses di: <http://buruhmigran.or.id/2011/05/15/informasi-negara-tujuan-tki-hongkong/> diakses pada tanggal 20 September 2015.
- Buruh Migran.or.id. (2015). Gaji buruh migran PRT Hong Kong naik. Dapat diakses di: <http://buruhmigran.or.id/2015/09/30/gaji-buruh-migran-prt-hong-kong-naik/> di akses pada tanggal 20 September 2015.
- Danim, (2008). Kinerja staf dan organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Fahmi, (2008). Adversity quotient (aq) dan motivasi berprestasi pada siswa program akselerasi dan program reguler. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- IOM (International Organization for Migration). (2010). Gambaran umum migrasi tenaga kerja Indonesia di beberapa negara tujuan di Asia dan Timur Tengah. Jakarta. [Online].
- Jonathan, (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartika, (2012). Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pada karyawan PT. Hellomotion Koorpora Indonesia. [Skripsi] Depok: Universitas Indonesia.
- Kinicki, K. (2000). Perilaku organisasi. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkunegara, A. A. P. (2009). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Edisi Kesembilan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Martins, & Teresa, (2012). Minnesota satisfaction questionnaire – psychometric properties and

- validation in a population of Portuguese Hospital Worker. University of Porto.
- Iqbal, M & Gusman, (2015). Pull and push factors of Indonesian women migrant workers from Indramayu (West Java) to work abroad. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 6 No 5 S5 October 2015.
- Mumford, D. B. (1998). The measurement of culture shock. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* (1998) 33: 149-154.
- Munandar, (2008). Psikologi industri dan organisasi. Jakarta: UI Press.
- Newstrom, W. & Davis, (1995). Perilaku dalam organisasi. Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Ningsih, (Tanpa Tahun). Hubungan antara adversity quotient dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Bina Insan Sukses Mandiri. *Jurnal Universitas 17 Agustus Samarinda*.
- Panggabean, S. (2002). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Lethbridge, Alberta.
- Pelling. C. (2000). Culture shock of international student in Canada. Kota terbit dan Penerbit?
- Pitaloka, D.A. & Siswoyo, (2015, Juni 24). Ribuan TKI di Hongkong 'lepas kewarganegaraan'. Dapat diakses di: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/642301-ribuan-tki-di-hongkong--lepas-kewarganegaraan-> di akses pada tanggal : 20 september 2015
- Putra, (2012, Mei 01). Pengangguran Indonesia bertambah 1,3 juta orang per tahun. Dapat di akses di: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/01/m3crmx-pengangguran-indonesia-bertambah-13-juta-orang-per-tahun> di akses pada tanggal 20 September 2015.
- Putri, (2013). Pengaruh kepuasan kerja intrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan . [Skripsi]. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Rachmawati, (2009). Hubungan antara adversity intelligence dan persepsi terhadap kohesivitas kelompok dengan organizational citizenship behavior pada karyawan PT. Padma Soode Indonesia. [Skripsi]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ridaryanthi, (2012). Media consumption in the adaptation process: a preliminary study toward Indonesian Migrant Workers (TKI) in Malaysia. Paper for International Conference on Media Communication and Culture.
- Rivai, (2004). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Selmer, (1999). culture shock in china? adjustment pattern of Western expatriate business managers. *International Business Review* 8 (1999) 515–534.
- Song, & Woo, (2015). A study on aq (adversity quotient), job satisfaction and turnover intention according to work units of clinical nursing staffs in Korea. *Indian Journal of Science and Technology*, Vol 8 (S8), 74-78, April 2015.
- Stoltz, G. (2000). Adversity quotient. mengubah hambatan menjadi peluang (terjemahan). Cetakan Ketujuh. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, A. E. (2009). Aplikasi statistik dengan SPSS 16.0. Cetakan Pertama. Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya.
- Sulaiman, (2004). Analisis regresi menggunakan SPSS contoh kasus & pemecahannya. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sunyoto, (2012). Teori, kuesioner dan analisis data sumber daya manusia (praktik penelitian). Yogyakarta: CAPS.
- Tian. (2015). Menaker perjelas rincian pekerjaan TKI di luar negeri. Dapat diakses di: <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/01/27/17789/25/25/Menaker-Perjelas-Rincian-Pekerjaan-TKI-di-Luar-Negeri> diakses pada tanggal 20 September 2015.
- Tongsin, K.N. (2010). A study of acculturation and adaptation of South Asians in Hong Kong. *The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 2010, v. 5 n. 2, p. 189-199.
- Utama, (2015, Juni 15). Tergalur Hongkong 750 TKI ajukan izin tinggal. Dapat diakses di: <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/25/078678318/tergaur-hongkong-750-tki-ajukan-izin-tinggal> diakses pada tanggal: 20 September 2015.
- Wahyuni, Dwi, (2015, Januari 25) 10 masalah yang paling sering diadukan TKI di luar negeri dapat diakses di: <http://bisnis.liputan6.com/read/2181697/10-masalah-yang-paling-sering-diadukan-tki-di-luar-negeri?p=1> di akses pada tanggal 20 September 2015.
- Yazid, M. (2010, September 14). Freedom in Hongkong. Dapat diakses di: <http://www.thejakartapost.com/news/2010/09/14/freedom-hong-kong.html> diakses pada tanggal 20 September 2015.

Yesil. (2013). The Impact of cultural intelligence (CQ) on cross-cultural job satisfaction (CCJS) and international related performance (IRP). *Journal of Culture, Society and Development- An Open Access International Journal* Vol.1 2013.

Yuniardi, & Dayakisni, (2004). *Psikologi lintas budaya*. Malang: UMM Press.

TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONTEKS MASYARAKAT TAIWAN YANG MENUA¹

Rita Pawestri Setyaningsih

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: rita_pawestri@yahoo.com

Diterima: 15-11-2016

Direvisi: 28-12-2016

Disetujui: 30-12-2016

ABSTRACT

Taiwan's ageing² population has boosted the high rate of demand for caretakers. Many caretakers came from Southeast Asian countries such as the Philippines, Vietnam, Thailand, and Indonesia. Since 2005 Indonesian Workers have dominated the market share of the welfare sector. However in 2015 the Indonesian government launched a zero-maid policy, in order to terminate the sending of unskilled workers. The other goal is to provide better protection for migrant workers abroad. Taiwan becomes one of the targets of this policy. In fact, this policy will certainly create great impact on the supply of labor in the welfare sector in the future. Moreover, Taiwan has launched a national ten-year long-term care. So, how the Taiwanese government respond to this policy? Will the Indonesian workers' shalt position be replaced by other Southeast Asian workers? This article aims firstly, to understand the position of migrant workers among other foreign workers working in the welfare sector in Taiwan. Secondly, to understand the Taiwan government's efforts in response to the Indonesian government's plan. This study uses literature study and interviews. This issue will be analyzed using economic and social approaches. The data used are from the range of 1992 to 2015.

Keywords: ageing society, Taiwan, Indonesian workers, employment policy.

ABSTRAK

Penuaan penduduk Taiwan mendorong tingginya laju permintaan akan tenaga perawat. Selama ini tenaga perawat didatangkan dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Sejak 2005 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendominasi pangsa pasar sektor kesejahteraan sosial. Namun di tahun 2015, Pemerintah Indonesia mencanangkan *zero-maid policy*, yaitu penghentian pengiriman TKI tidak terampil. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi TKI di luar negeri. Taiwan menjadi salah satu target dari kebijakan ini. Kebijakan ini tentu akan berdampak pada ketersediaan tenaga kerja pada sektor kesejahteraan sosial di Taiwan di masa depan. Apalagi Taiwan sudah mencanangkan *national ten-year long-term care*. Lantas, bagaimana respon pemerintah Taiwan terhadap kebijakan ini? akanlah TKI digantikan posisinya oleh TKA lainnya? Artikel ini bertujuan untuk *pertama*, memahami posisi TKI di antara tenaga kerja asing lainnya yang bekerja di sektor informal di Taiwan. *Kedua*, memahami upaya pemerintah Taiwan dalam menanggapi rencana pemerintah Indonesia tersebut. Studi ini menggunakan studi literatur dan wawancara. Persoalan ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1992 hingga 2015.

Kata kunci: ageing society, Taiwan, TKI, kebijakan ketenagakerjaan.

¹ Disampaikan dalam *The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities*, 18-20 Oktober 2016 di LIPI Jakarta.

² Ada dua cara penulisan yang kerap dilakukan yaitu *ageing* maupun *aging*, namun keduanya menunjuk pada pengertian yang sama, yaitu penuaan.

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Taiwan yang drastis dalam dua dekade mendorong permintaan tenaga perawat yang cukup tinggi. Dalam tradisi budaya China yang menganut paham Konfusianisme, keluarga merupakan unsur utama³ dalam perawatan keluarga. Namun, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berubah ikut mempengaruhi peran keluarga dalam perawatan orang tua yang berakibat pada kurangnya sumber tenaga perawat orang tua. Kekurangan sumber tenaga perawat ini selanjutnya dipecahkan dengan hadirnya campuran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Taiwan.

Sejak awal 1990an, Pemerintah Taiwan mengizinkan keterlibatan TKA dalam pasar tenaga kerja Taiwan. Dalam praktiknya, kebijakan ini dijalankan dengan sangat hati-hati. TKA dari negara-negara Asia Tenggara pun hadir berperan dalam sektor perawatan lansia. TKI yang semula menjadi pemain baru dalam sektor ini kini mendominasi pangsa pasar tenaga kerja di sektor ini. “*Posisioning the product*” berdasarkan kebangsaan ikut mempengaruhi karakteristik TKA di sektor ini (Loveband, 2003).

Namun, sejak 2015 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *zero-maid* yang mungkin berpengaruh dalam penyediaan tenaga kerja di sektorkesejahteraan sosial. Apalagi Taiwan sedang mencanangkan program *national ten-year long-term care* sehingga kebutuhan akan tenaga kerja perawat semakin besar. Terkait dengan kebijakan ini, bagaimana respons pemerintah Taiwan? Apakah posisi TKI akan digantikan oleh TKA lainnya?

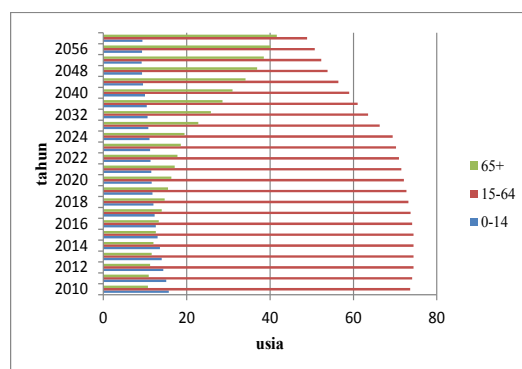
Penelitian ini penting sebagai informasi bagi masyarakat dan pemerintah mengingat selama ini TKI diposisikan sebagai pahlawan devisa, namun dipandang sebelah mata karena dianggap tidak terampil.

MASYARAKAT TAIWAN YANG MENUA

Dalam dua dekade penduduk lansia (berusia 65 tahun keatas) di Taiwan meningkat

³ Hal ini juga disampaikan oleh Soldo yang mengatakan bahwa keluarga merupakan pendukung utama yang dapat dimanfaatkan bantuannya oleh orang tua lansia dalam memenuhi kebutuhan pribadinya (Mateo, 2010, 30).

drastis dari 1,490,801 orang pada tahun 1992 menjadi 2,487,893 orang pada tahun 2010 atau meningkat dari 7.1% menjadi 10.74% dari total penduduk. Menurut definisi WHO, sebuah negara dikatakan memasuki *ageing society* bila rasio penduduk lansianya mencapai 7% dari total penduduk. Bila rasio tersebut meningkat menjadi 14%, maka negara itu menjadi *aged society* dan *super aged society* atau *hyper-aged society* bila rasionya mencapai 20% dari total penduduk. Dengan demikian, jika menggunakan definisi menurut WHO, maka sejak 1993 Taiwan sudah memasuki *ageing society*. Sementara itu *Council for Economic Planning and Development (CEPD)* memprediksi bahwa pada tahun 2018 Taiwan akan memasuki *aged-society* dan *hyper-aged society* pada tahun 2025. Artinya, dalam waktu 25 tahun struktur penduduk Taiwan berubah secara drastis dari *ageing society* menjadi *aged-society*.



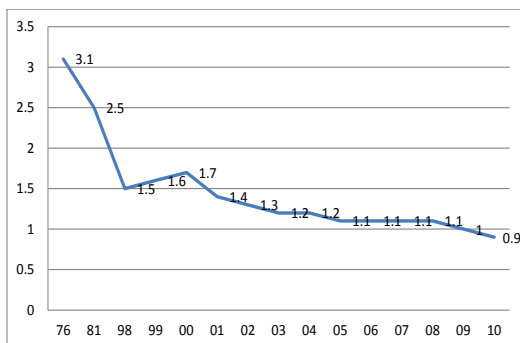
Sumber: Taiwan Statistical Data Book, 2010

Gambar 1. Proyeksi penduduk Taiwan (2010-2060)

Trend global menunjukkan bahwa setiap negara, baik di negara sedang berkembang atau negara maju akan mengalami *ageing* baik cepat atau lambat. Dengan demikian fenomena *ageing society* itu merupakan sebuah hal normal. Yang membedakan pengalaman setiap negara adalah kecepatannya. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Eropa misalnya, perubahan struktur penduduk Taiwan tergolong sangat cepat. Negara-negara di kawasan Eropa memerlukan waktu lebih dari 50 tahun untuk berubah menjadi *ageing society*. Inggris, Swedia, Finlandia, Perancis sudah mengalami *ageing society* sejak awal tahun 1900an. Namun, pertumbuhan penduduk lansia di negara-negara

tersebut terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan berlangsung secara perlahan. Perancis misalnya, mengalami *ageing society* dalam kurun 70 tahun lebih. Begitu pula dengan Jepang, yang merupakan satu di antara negara-negara di kawasan Asia Timur yang mengalami *ageing society* lebih awal. Dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk lansia di Taiwan, pertumbuhan penduduk lansia di Jepang masih relatif lebih lambat. Kecepatan Taiwan menjadi *ageing society* menjadikan Taiwan sebagai salah satu wilayah dengan populasi lansia paling cepat berkembang di dunia (*the fastest growing elderly population in the world*). Konsekuensinya adalah bahwa pemerintah Taiwan perlu membuat kebijakan publik yang terkait dengan penduduk lansia dan sifatnya tidak coba-coba (*try and error*) (Law, 2001).

Faktor meningkatnya usia harapan hidup (*life expectancy rate*) dan menurunnya tingkat kelahiran (*total fertility rate*) mempengaruhi terciptanya kondisi ini. Usia harapan hidup rata-rata untuk laki-laki meningkat dari 74.6 tahun pada tahun 1996 menjadi 77.2 tahun pada tahun 2010. Untuk kaum perempuan meningkat dari 78.9 tahun menjadi 83.1 tahun untuk periode yang sama. Membaiknya fasilitas kesehatan serta gizi turut mempengaruhi kondisi ini. Sementara itu, tingkat kelahiran menurun dari 3.1 pada tahun 1976 menjadi 0.9 pada tahun 2010, lebih rendah dari tingkat rata-rata untuk mempertahankan populasi (*replacement rate*) sebesar 2.1. Rendahnya tingkat kelahiran ini berdampak pada menurun atau stagnannya jumlah absolut tenaga kerja di Taiwan di masa mendatang (Tsay, 2016, 68).



Sumber: *Statistical Yearbook of the ROC*, 2010.

Gambar 2. Tingkat kelahiran (*Total Fertility Rate*) Taiwan (1976-2010)

Persoalan *ageing society* di Taiwan dan berubahnya struktur keluarga telah menimbulkan tekanan besar bagi pemerintah Taiwan. Beberapa konsekuensi dari perubahan sosial masyarakat di Taiwan ini adalah meningkatnya beban ketergantungan orang tua terhadap orang muda yang ditunjukkan oleh tingkat ketergantungan (*dependency ratio*). Tingkat ketergantungan orang tua (*olddependency ratio*) menunjukkan peningkatan dari 9.7 pada tahun 1991 menjadi 14.6 pada tahun 2010. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya orang tua dan semakin sedikit penduduk usai produktif. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya generasi muda yang tak mau menikah sehingga melahirkan keluarga dengan *single family* dengan proporsi yang semakin meningkat (Chen, 2007, 124).

Konsekuensi lainnya adalah menurunnya ketersediaan perawat orang tua dalam masyarakat Taiwan (Chen, 2007, 124). Dalam tradisi budaya China keluarga merupakan unsur utama dalam perawatan orang tua yang akan merawat orang tua di rumah (Chan, 2007, 126). Hal ini terkait dengan nilai berbakti (*filial piety*) yang umumnya masih dianut oleh masyarakat China. Anak laki-laki tertua menjadi harapan utama. Namun perubahan keluarga menciptakan beban bagi keluarga modern (Chan, 2007, 128). Sementara itu meningkatnya partisipasi tenaga kerja wanita membawa konsekuensi pada kurangnya tenaga perawat lansia di Taiwan. Para tenaga kerja wanita itu bekerja di luar rumah dan meninggalkan orang tua lansia di rumah. Beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa beban perawatan orang tua tidak hanya menjadi beban wanita bekerja, melainkan beban⁴ anggota keluarga yang merawat (Ip 2015, Mateo 2010, 32, Chan 2007, 128).

Taiwan juga menghadapi keterbatasan tenaga terampil yang bergaji tinggi. Umumnya anak-anak muda Taiwan pergi ke China atau luar negeri untuk bekerja sehingga mengurangi ketersediaan jumlah tenaga kerja di industri perawatan di Taiwan. Di kemudian hari, tampaknya kondisinya akan lebih memburuk

⁴ Sebagai contoh adanya kisah tragis seorang anak yang membunuh ibunya yang lansia dengan mendorongnya ke sungai, atau kisah tragis lainnya yaitu seorang ayah yang membunuh anaknya yang mengalami demensia (Ip, 2015).

lagi seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk lansia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masalah perawatan orang tua menjadi beban bagi wanita yang bekerja. Menurut survei nasional hampir sepertiga dari perawat orang tua yang difabel adalah wanita bekerja penuh waktu dan mengalami konflik dengan pekerjaan (18%) di mana 25% dari mereka kemudian meninggalkan pekerjaannya demi merawat orang tua (Setyaningsih, 2011). Menurunnya jumlah kelahiran ikut mempengaruhi menurunkan ketersediaan tenaga profesional perawat lansia. Sementara itu meningkatnya usia harapan hidup membuat semakin banyak penduduk lansia, bahkan yang mencapai 65 tahun ke atas (lihat tabel di bawah).

Tabel 1: Jumlah penduduk Taiwan usia 65 tahun ke atas

Thn	65+		65-69		70-74		75-79		80+	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1980	762	4.28	350	1.97	217	1.22	118	0.66	77	0.46
1990	1264	6.21	545	2.68	346	1.70	222	1.09	151	0.74
2000	1895	8.52	665	2.99	572	2.57	375	1.69	283	1.27
2010	2357	9.86	758	3.17	625	2.61	479	2.00	494	2.07
2020	3460	13.83	1397	5.58	831	3.32	568	2.27	664	2.65
2030	5040	19.60	1629	6.33	1414	5.50	1082	4.20	915	3.56
2036	5607	21.65	1538	5.94	1490	5.75	1242	4.80	1337	5.16

Sumber: Bartlett and Wu (2000) dalam Phillips (2000)

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun untuk penduduk dari semua kategori usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dari segi jumlah maupun proporsinya. Prosentase tertinggi hingga 2036 diperkirakan akan didominasi oleh penduduk lansia usia 65 tahun ke atas. Namun, penduduk usia 80 tahun ke atas jumlahnya juga akan semakin banyak.

Sementara itu, karena adanya peningkatan usia harapan hidup masyarakat Taiwan, pemerintah Taiwan mencanangkan program perawatan jangka panjang nasional (*national ten-year long-term care*). Program ini dimulai sejak 2010, yang merupakan aksi dari kebijakan *ageing-in-place*⁵ (*Ministry of Health*,

⁵ Ada beberapa istilah dalam kelansiaan yang belum ada istilah bakunya dalam bahasa Indonesia sehingga perlu adanya kesepakatan dalam menentukan arti istilah asing (Nurvidya, 2015)

2008). Tujuannya adalah agar individu difabel dapat mandiri, otonom, aman, dan bermartabat. Program ini menyediakan beberapa jenis layanan seperti panti jompo (*home care*), penitipan lansia (*day care*) maupun *family care*, *home nursing*, dan lain-lain termasuk layanan transportasi, maupun layanan institusional jangka panjang. Karena *ageing-in-place* akan menjadi prinsip penting dalam perawatan orang tua, maka sumberdaya untuk posisi pembantu rumah tangga dan *care manager* juga penting peranannya (Setyaningsih, 2011). Pada tahun 2009 dengan populasi lansia mencapai 2.23 juta orang, maka rata-rata setiap 7.55 orang dari tenaga kerja produktif harus mengurus seorang lansia. Angka ini terus menurun sehingga pada tahun 2020 diperkirakan 6.73 orang akan mengurus satu orang lansia. Kondisi ini memberi informasi bahwa semakin sedikit orang yang tersedia untuk merawat orang tua di masa depan. Dengan adanya program nasional ini maka kebutuhan akan perawat lansia menjadi lebih banyak. Sementara itu menurut Konfusius keluarga semestinya menjadi perawat utama lansia. Namun, data dari Kementerian Dalam Negeri Taiwan menunjukkan terjadinya penurunan prosentase orang tua yang tinggal bersama anak dari 67.17% pada tahun 2005 menjadi 38.53% tahun 2009. Sebaliknya, prosentase orang tua yang tinggal di panti jompo menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah lembaga panti jompo di Taiwan. Jika pada tahun 1996 hanya 0.9% dari keseluruhan penduduk tinggal di panti jompo, pada tahun 2000 meningkat menjadi 5.59% (Chen, 2007, 126). Sementara itu jumlah panti jompo yang hanya beberapa pada tahun 1986 menjadi 900 institusi pada tahun 2009. Peningkatan jumlah ini selain menunjukkan meningkatnya permintaan akan lembaga perawatan juga menunjukkan meningkatnya permintaan akan sumber daya manusia di institusi perawatan. Sebagai konsekuensinya, model tinggal lansia di Taiwan lambat laun berubah dari tinggal di rumah menjadi tinggal di lembaga perawatan (Chan, 2007, 126). *Trend* ini terkait dengan adanya kemudahan dalam peraturan pendirian rumah jompo di Taiwan sekaligus menjadi indikasi adanya cara baru dari mengekspresikan nilai berbakti anak terhadap orang tua (Mateo,

2010, 31), meski sebagian orang menganggapnya sebagai stigma gagalnya bakti anak terhadap orang tua (Lan 2006, 35, Chan 2007, 127). Sementara, lansia yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari terjadi kecenderungan yang meningkat dari 12.67% pada tahun 2005 menjadi 18.81% pada tahun 2009. Beberapa penyebabnya antara lain karena penyakit degenerasi jaringan, demensia, degradasi fungsi fisik, cacat lumpuh, disfungsi organ, terbaring di tempat tidur, dan mungkin ketergantungan pada pernapasan ventilator. Orang-orang semacam ini mungkin membutuhkan perawatan dalam jangka panjang.

Banyak hasil kajian yang menunjukkan respon Pemerintah Taiwan terkait kebijakan untuk solusi perawatan⁶ lansia (Tsay, 2016, 68), namun sepertinya persiapan pemerintah belum matang (*Ministry of Health*, 2008). Selain tidak adanya kecukupan pendidikan, pelatihan mengenai kelansiaan maupun kebijakan subsidi terkait dengan kelansiaan juga belum cukup. Artinya, pemerintah Taiwan masih belum tuntas dalam melakukan perbaikan untuk perawatan lansia. Kondisi kurangnya tenaga kerja perawat ini yang mendorong perlunya Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk merawat orang tua sebagai perawat keluarga (*family care*) (Lan, 2010, 24).

KETERLIBATAN TENAGA KERJA ASING

Sejak tahun 1992 pemerintah Taiwan mengizinkan keterlibatan TKA di dalam industri perawatan lansia dengan dikeluarkannya *Employment Service Act*⁷ (就業服務法/*Jiùyè fúwù fǎ*) oleh Legislatif Yuan. Namun, pada dasarnya keputusan impor TKA itu sebuah langkah hati-hati Pemerintah Taiwan dan dilakukan dengan pengawasan ketat demi mengontrol aliran masuk TKA di kawasan

⁶ Seperti melindungi *care network system*, menyediakan *home care* yang cukup, mendirikan *nursing agencies* untuk menyediakan layanan *health care*, mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas perawatan sukarela untuk lansia.

⁷ Keputusan mengimpor TKA diambil secara cepat karena Pemerintah Taiwan berada dalam tekanan kontraktor yang mengerjakan proyek mega infrastruktur di Taiwan pada tahun 1980an. Jika tidak maka akan mengancam pembengkakan biaya TK pada akhir tahun 1980an, sehingga pemerintah mengizinkan mereka membawa masuk TKA (Mateo, 2010).

perbatasan (Lan, 2006, 39) dan juga melindungi tenaga kerjanya sendiri khususnya setelah Krisis Asia tahun 1997-98 (Loveband, 2003). Indikasi dari kebijakan yang hati-hati ini adalah *pertama*, hanya TKA dari negara-negara tertentu yang diperbolehkan masuk ke Taiwan, yaitu Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia yang semuanya merupakan anggota ASEAN. Namun kemudian, Malaysia berhenti mengirimkan tenaga kerjanya ke Taiwan karena terjadi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri sementara tingkat upah di Malaysia hampir sama dengan tingkat upah di Taiwan (Lan, 2006, 39). Sementara itu, Pemerintah Taiwan memberlakukan kebijakan pintu tertutup untuk tenaga kerja asal China daratan meskipun secara budaya dan bahasa mereka jauh lebih dekat dengan Taiwan. Hal ini terutama terkait dengan masalah isu etnonasionalis⁸ (Lan, 2006, 38).

Kedua, hanya industri tertentu saja yang boleh dimasuki oleh TKA, yaitu sektor industri konstruksi dan manufaktur (dengan persentase terbatas), sektor nelayan⁹ dan sektor kesejahteraan sosial meliputi sektor perawatan (*caregivers*) dan pembantu rumah tangga (*domestic helpers*). Kebijakan ini juga dipandang sebagai pemecahan masalah atas migran ilegal¹⁰ di Taiwan sekaligus menjadi tantangan bagi masyarakat Taiwan menuju masyarakat multikultur (Wang, nd). Sejak saat itu Taiwan menjadi pengimpor TKA terbesar di Asia (Chen, 2013). Sejak saat itu pula

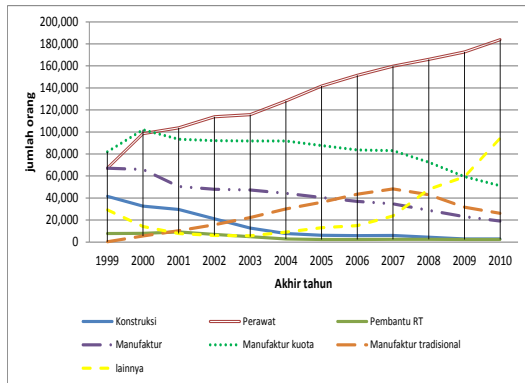
⁸ Perdebatan tentang tenaga kerja asal China daratan sempat mencuat di tingkat legislatif Taiwan, di mana sebagian menyatakan pro karena faktor budaya dan bahasa, sementara sebagian menolak karena hal ini akan memunculkan anomali antara klasifikasi etnonasional antara “kami/kita” dan “mereka” yang merujuk orang China daratan sebagai orang asing (Lan, 2006, 38).

⁹ Hal ini juga berlaku untuk tenaga kerja asal China daratan asal para nelayan tersebut tidak tinggal di daratan (Lan, 2006, 38).

¹⁰ Dalam sejarahnya, migran yang masuk Taiwan merupakan orang-orang yang beralih belajar Mandarin atau sebagai wisatawan asing. Namun mereka kemudian melakukan perpanjangan masa tinggal (*overstay*) secara ilegal. Sementara itu adanya larangan penggunaan tenaga TKA dan juga karena terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor 3D (*rendah/demeaning*, kotor/*dirty* dan berbahaya/*dangerous*) di Taiwan mendorong terjadinya penyelundupan TKA dan ini menjadi perdagangan yang menguntungkan. Diperkirakan pada tahun 1990an terdapat sekitar 30 ribuan orang asing di Taiwan. Sementara data lain menyebutkan lebih dari 50.000 (Lan, 2006). Meski demikian, sanksi secara resmi bagi para migran asing tersebut baru diberlakukan pada tahun 1989 (Abella, 2006, 3).

praktik perbudakan terjadi di Taiwan. Harga yang murah karena TKA digaji NT15.840¹¹, TKA tinggal di rumah selama 24 jam dan dapat diperkerjakan (di-hire) secara personal merupakan bentuk perbudakan yang terjadi di Taiwan (Mateo, 2010, 32).

Tabel 2. Perkembangan TKA di sektor industri produktif dan kesejahteraan sosial



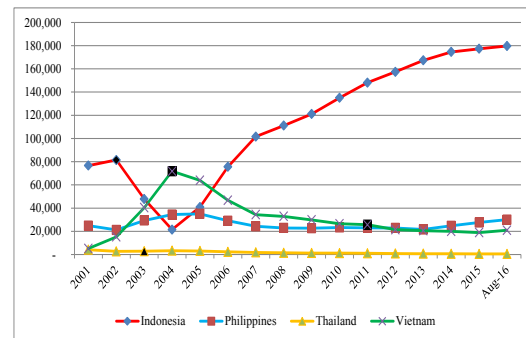
Sumber: Bureau of Employment and Vocational Training, CLA, 2011

Data di atas menunjukkan jumlah TKA di berbagai sektor yang cenderung meningkat. Dari sektor-sektor yang ditawarkan untuk TKA, sektor perawatan (*nursing*) yang menunjukkan *trend* yang semakin meningkat dan pada tahun 2010 mendominasi perekonomian Taiwan. Sementara itu bagi sebagian besar TKA Asia Tenggara, Taiwan sendiri memiliki daya tarik karena faktor perubahan sosial yang cepat, pembangunan ekonomi, demokratisasi politik, dan transisi demografi. Perbedaan tingkat upah di negara asal dan negara tujuan menjadi magnet bagi TKA untuk bermigrasi ke Taiwan (Abella, 2006, 2).

Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun jumlah TKA di Taiwan semakin meningkat. Tahun 1996 terdapat 236.555 TKA bekerja pada sektor produktif dan kesejahteraan sosial, meningkat menjadi 374.708 orang pada tahun 2016 (Agustus). Jumlah ini tidak termasuk pekerja ilegal. Kecenderungan yang semakin meningkat ini juga menjelaskan bahwa Asia

¹¹ Selanjutnya pada tahun 2007 terjadi peningkatan upah minimum menjadi NT17,642 (Mateo, 2010, 32)

Tenggara menjadi sumber utama sumber daya manusia bagi Taiwan (Tsay, 2015).



Sumber: Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, 2016, diolah.

Gambar 3. Jumlah TKA di sektor kesejahteraan sosial di Taiwan, 2001-2016 (Agustus) (orang)

Sementara itu, TKA yang bekerja di sektor kesejahteraan sosial meningkat dari 16.308 orang menjadi 231.211 orang atau dari 6.9% menjadi 61.7% pada periode yang sama. Ini menunjukkan perubahan sosial di Taiwan terjadi sangat signifikan dalam kurun waktu 2 dekade. Saat ini di sektor kesejahteraan sosial di Taiwan terdapat 179.679 (77.7%) orang dari Indonesia, mendominasi pasar tenaga kerja di sektor ini, 30.081 (13%) orang Filipina, 557 (0.24%) orang dari Thailand dan 20.893 (9%) orang dari Vietnam. Gambar berikut menggambarkan peningkatan TKA di Taiwan khususnya di sektorkesejahteraan sosial. Terlihat bahwa jumlah TKI Filipina meningkat pada tahun 2004 kemudian menurun atau konstan dan sedikit meningkat sejak 2015. Tenaga kerja Vietnam meningkat sejak 2001 mencapai puncak 2004 kemudian menurun dan meningkat lagi mulai 2004. Sementara itu tenaga kerja Thailand cenderung tetap. Sementara TKI sempat menurun tajam sejak 2004 kemudian sejak itu meningkat drastis hingga 2016. Dari jumlah tersebut, TKI 98% berada pada sektor berjenis *family nursing*. Di Taiwan, sebenarnya ada empat jenis sektor dalam kesejahteraan sosial, meliputi: perawat dalam lembaga resmi (*institutional nursing*), *outreach nursing*, perawat keluarga (*family nursing*) dan pembantu rumah tangga (*home maids*). Namun, TKI banyak mendominasi sektor perawat keluarga.

Adapun alasan TKI cenderung mendominasi pangsa pasar ini oleh Loveband (2003) disebutkan karena adanya *positioning product* yang dilakukan oleh agen sebagai perantara (*broaker*) penyalur tenaga kerja, majikan dan TKA itu sendiri. Namun sebenarnya ini merupakan industri migran (*migrant industry*), sebuah konsep bisnis yang membawa keuntungan bagi jaringan yang terlibat, meliputi lembaga, agen maupun individu (Yuniarto 2015, 18, Salt dan Stein 1997, 468, Ananta 2009, 2-3).

Memang, tidak semua keluarga dapat dengan mudah merekrut TKA. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga untuk merekrut TKA. Bagi keluarga yang hendak merekrut TKA, ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Keluarga yang memiliki 2 (dua) anak atau lebih kurang dari 6 (enam) tahun atau orang tua lansia berusia 75 tahun ke atas, atau keluarga yang memiliki anggota yang lumpuh, baik yang tinggal di rumah maupun di panti jompo atau pasien lansia yang menderita penyakit yang kategorikan dalam 32 jenis penyakit menurut pemerintah (Loveband, 2003).

KEBIJAKAN ZERO MAID: ANCAMAN BAGI TAIWAN?

Pada pertengahan Mei 2015, pemerintahan Jokowi meluncurkan kebijakan *zero-maid*. Melalui kebijakan ini pemerintah secara perlahan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri terutama untuk pekerja di sektor pranata rumah tangga. Hal ini dilakukan mengingat TKI di sektor pranata rumah tangga cenderung berketramampilan rendah. Sifat rekrutmennya yang bersifat pribadi menyulitkan dalam hal pengawasan. Selain dianggap menurunkan martabat bangsa, tenaga kerja di sektor ini juga kerap menimbulkan masalah sosial. Dengan kebijakan *zero-maid* diharapkan pemerintah dapat meningkatkan perlindungan kepada mereka. Menurut data¹² diasumsikan bahwa saat

¹² Selama ini data mengenai jumlah TKI di luar negeri masih asumsi, karena data dari 3 (tiga) instansi terkait berbeda. Misalnya, data dari Kementerian Luar Negeri hanya mencatat jumlah TKI di luar negeri berdasarkan jumlah yang melapor, sementara mungkin jumlah yang tidak melapor lebih banyak. Sementara itu data dari Kementerian Tenaga Kerja melalui perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) hanya berdasarkan jumlah izin yang melapor setiap

ini ada 7 juta TKI yang dikirim ke luar negeri di mana hampir 70%nya berpendidikan rendah, dan 60%nya bekerja sebagai tenaga kerja domestik sehingga mereka banyak menerima kasus eksploitasi, bahkan double eksploitasi (Loveband, 2013). Meski demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan TKI menganggap bahwa kebijakan *zero-maid* ini justru tidak mencerminkan jaminan dan komitmen sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Jokowi dalam kampanye tahun 2014 untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga perempuan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang disusun dalam Nawacita (Ari, 2015).

Dalam Nawacita, Pemerintah Jokowi menempatkan buruh atau pekerja sebagai subjek utama penggerak pertumbuhan nasional, sehingga mereka harus ikut terlibat dalam menikmati hasil pembangunan demi menciptakan pembangunan yang inklusif. Dalam 9 butir Nawacita yang diusung saat kampanye Jokowi, tiga di antaranya terkait dengan pembangunan manusia. Karenanya, pembangunan manusia merupakan isu sentral dalam Nawacita. Misalnya, butir kelima Nawacita menyebutkan “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”; butir keenam “meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional” serta butir kedelapan yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa.” Ketiga butir ini dibuat dalam rangka menghadapi tantangan akan sumberdaya manusia Indonesia (*PresidenRi.go.id*, 2016).

Adapun tiga tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah *pertama*, bagaimana memenuhi hak-hak dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. *Kedua* bagaimana mempersiapkan mental untuk melakukan lompatan jauh, meninggalkan ketertinggalan di berbagai bidang; serta *ketiga* bagaimana tampil menjadi pemimpin perubahan (*PresidenRi.go.id*, 2016). Untuk menjawab tantangan tersebut terutama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, pekerja perlu diberikan perlindungan baik dalam hal sistem pengupahan maupun dalam perlindungan kesehatan dan pendidikan bagi dirinya termasuk

pemberangkatan yang terakhir, BNP2TKI juga menggunakan metode yang berbeda dalam membuat data.

bagi keluarganya. Oleh karenanya, perlindungan terhadap TKI harus diutamakan. Mengirim tenaga kerja lebih terampil dan menghentikan pengiriman TKI berkecakupan rendah dan menjadi salah satu solusinya.

Hingga tahun 2015, TKI masih diperlakukan sebagai produk yang dapat dijual ke luar negeri secara murah untuk melayani pangsa pasar negara lebih kaya namun kekurangan tenaga kerja berkecakupan rendah (Ananta, 2009, 2-3). Oleh karenanya, pengiriman TKI berkecakupan rendah masih terus terjadi, namun dengan layanan perlindungan hukum yang kurang memadai (Yuniarto, 2015, 28). TKI sendiri menjadi aktor pasif dan tidak berdaya meski dianggap sebagai “pahlawan devisa” karena skenario migrasinya diatur sepenuhnya oleh agen, sebagai bagian dari industri migran. Namun demikian, tidak menutup mata bahwa sebagai pahlawan devisa negara kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional Indonesia tidak bisa diremehkan. Setiap tahun milyaran uang remitansi mengalir masuk ke Indonesia (Yuniarto, 2009, 3). Pada tahun 2015 (trimester ke-4) tercatat remitansi TKI dari Taiwan menyumbang tiga terbesar setelah TKI dari Arab Saudi dan Malaysia, yaitu sebesar US\$233 juta (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2015). Sambutan “selamat datang pahlawan devisa” terpampang jelas di bandara menyambut kedatangan mereka.

Satu hal yang harus diingat dari kebijakan *zero-maid* ini adalah mengenai rasionalitas dari kebijakan tersebut. Pada dasarnya ide dari kebijakan ini sangat baik, karena untuk memberikan perlindungan bagi rakyatnya di luar negeri. Selama ini media massa menunjukkan banyak terjadi eksploitasi TKI oleh majikan di luar negeri. Namun, jika benar pengiriman tenaga kerja akan diberhentikan hingga titik nol, tentu pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi dari menyediakan setidaknya 10 juta pekerjaan di dalam negeri. Salah satu alasan para TKI ke luar negeri adalah karena kurang tersedianya lapangan kerja di dalam negeri dan faktor kemiskinan. Jikapun ada, pendapatan setiap bulannya tidak lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima sebagai TKI, meskipun ada pengorbanan yang harus dibayar oleh TKI.

Untuk mengimbangi kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan program Nawacita 10 juta kesempatan kerja, yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam negeri melalui penciptaan kesempatan kerja baru. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dengan mengundang ahli dan profesional. Kehadiran Pemerintah melalui Nawacita di bidang ketenagakerjaan ditujukan untuk melatih dan meningkatkan mutu para calon TKI, sehingga di tahun 2018 dan seterusnya Indonesia dapat mengirim tenaga kerja lebih terampil ke luar negeri (Ari, 2015).

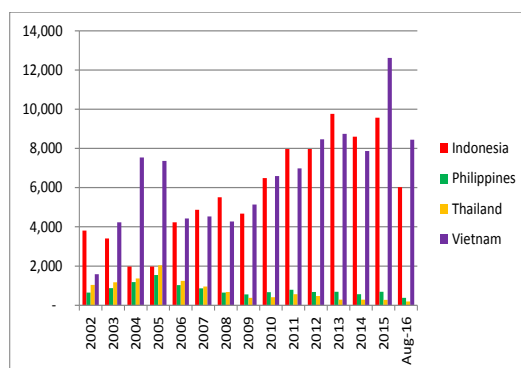
Apakah kebijakan *zero-maid* ini selanjutnya mempengaruhi pemerintah Taiwan untuk menggantikan posisi TKI dengan TKA dari negara Asia Tenggara lainnya? Tentu ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Taiwan untuk memutuskan mengganti posisi TKI dengan TKA lainnya. *Pertama*, posisi TKI di dalam pasar tenaga kerja Taiwan sudah mencapai posisi paling tinggi. Sejak 2005 TKI mendominasi sektor kesejahteraan sosial. Bila menggunakan analog “*positioning the product*” seperti yang dijelaskan oleh Loveband (2003), teori permintaan dan penawaran dapat menjelaskan hal ini. Dalam teori permintaan, permintaan konsumen akan suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi harga, pendapatan, intensitas kebutuhan, perkiraan harga di masa mendatang, pendapatan di masa mendatang, harga barang substitusi, harga barang komplementer, promosi, serta selera konsumen, *ceteris paribus*. Dengan asumsi bahwa harga rekrutmen TKA, pendapatan masyarakat dan intensitas kebutuhan terhadap TKI sama, harga perkiraan di masa mendatang maka yang membedakan tingkat permintaan adalah selera konsumen dan faktor promosi. Dominannya TKI dibandingkan TKA lainnya di sektor kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa pilihan masyarakat Taiwan terhadap TKI lebih tinggi dibandingkan TKA lainnya. Di antara TKA lainnya di Taiwan, TKI paling disukai untuk urusan merawat orang tua. Dengan demikian, TKI memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan TKA

lainnya. Dalam kondisi ini, semestinya bisa dijadikan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya tawar.

Ditambah lagi dengan promosi oleh agen melalui *stereotyping* berdasarkan kewarganegaraan, TKI memiliki *branding image* yang baik di mata masyarakat dan pemerintah Taiwan. TKI lebih disenangi orang Taiwan untuk merawat orang tua. Meskipun ada tenaga kerja Filipina, Thailand dan Vietnam yang juga bekerja dalam sektor kesejahteraan sosial di Taiwan, tetapi sepertinya *stereotyping* ini terpatrit di benak majikan Taiwan. Bahwa TKI perempuan lebih cocok bekerja sebagai perawat lansia, TKI juga termasuk orang yang sabar dan setia, tidak banyak menuntut meski mereka rentan mengalami dobel eksploitasi (Loveband 2003, Gusman 2012). Selain itu TKI juga lebih rajin, ramah, dan setia meski kurang terampil sebagai perawat (Setyaningsih 2011, Lan 2006).

Sementara itu, *stereotyping* yang muncul untuk tenaga kerja Filipina adalah bahwa tenaga kerja perempuan Filipina lebih cocok bekerja sebagai perawat anak-anak. Kemampuan berbahasa Inggris dan tingkat pendidikan mereka yang lebih tinggi lebih bermanfaat bagi masa depan anak-anak Taiwan¹³ dibanding kemampuan berbahasa Mandarin orang Indonesia di Taiwan. Namun, di samping *stereotyping* positif tersebut, orang Filipina dan Vietnam dikenal bermasalah. Tenaga kerja Filipina cenderung menuntut (*demanding*). Sementara tenaga kerja Vietnam dikenal sering kabur. Berdasarkan data *Ministry of Labor Taiwan* (Gambar), persentase tenaga kerja Vietnam kaburan cenderung meningkat. Pada 2015 terdapat 12.618 orang Vietnam kabur atau merupakan 66.7% dari total tenaga kerja Vietnam di sektor kesejahteraan sosial. Sementara pada periode yang sama TKI kaburan berjumlah 9.569 orang atau merupakan 5.4% dari total TKI di sektor yang sama. Meski jumlah TKI kaburan meningkat, tetapi secara persentase jumlah mereka relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan tenaga kerja Vietnam.

¹³ Bahasa Inggris telah diajarkan sejak dini kepada anak-anak Taiwan dan bahasa Inggris dilakukan dengan harga yang mahal dan menjadi modal sosial bagi anak-anak Taiwan (Loveband, 2003).



Sumber: *Ministry of Labor Taiwan*, 2016.

Gambar 4. Jumlah TKA Kaburan di Taiwan (orang)

Karena kasus kaburan, Indonesia dan Vietnam pernah dilarang untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke Taiwan. Untuk Indonesia, larangan diterapkan pada tahun 2002 karena banyak TKI kabur. Namun pelarangan ini diperpanjang karena kasus politik yang terjadi saat itu. Kasus semacam inilah yang kemudian oleh media massa Taiwan disebut sebagai diplomasi tenaga kerja asing (*foreign workers diplomacy*)¹⁴. Larangan itu kemudian dihapus setelah ada Nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak pada tahun 2004. Sementara itu, parahnya kasus kaburan tenaga kerja Vietnam menyebabkan kran aliran masuk tenaga kerja Vietnam ke Taiwan baru dibuka lagi pada tahun 2015 ini.

Berkaca pada beberapa alasan di atas, orang Taiwan lebih suka terhadap orang Indonesia

¹⁴ Diplomasi tenaga kerja Indonesia terjadi pada tahun 2004. Presiden Chen Shui-bian yang melakukan kunjungan ke Indonesia dikabarkan dibatalkan oleh media massa Taiwan tetapi di media massa Indonesia dikabarkan sebaliknya sehingga ini memicu pernyataan: penghinaan martabat bangsa Taiwan. Akibatnya, Indonesia terkena perpanjangan larangan pengiriman TKI ke Taiwan. Sementara itu tahun 2003 larangan pengiriman Tenaga kerja Thailand ke Taiwan dijatuhkan kepada Pemerintah Thailand sebagai respon dari dampak SARS yang merebak di negara Thailand saat itu. Tahun 2000 larangan ditujukan kepada tenaga kerja Filipina akibat pemutusan sepihak hubungan udara dengan Taipei dan karena penyebutan pemerintah Filipina bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Terakhir pada tahun 2011 larangan kembali dijatuhkan kepada tenaga kerja Filipina karena pemerintah Filipina mendeportasi 14 tersangka asal Taiwan ke China, sehingga memicu pertikaian diplomatik antara Taipei dan Manila. Kasus ini menunjukkan bagaimana faktor politik berperan lebih unggul ketimbang faktor ekonomi. Namun sejak 2005 hingga sekarang hubungan politik Indonesia dan Taiwan tidak ada lagi sehingga tidak mempengaruhi pengiriman TKI ke Taiwan.

paling tinggi dan tidak heran jika pemerintah Taiwan berusaha mempertahankan keberadaan TKI di Taiwan. Selama pasokan tersedia dan permintaan akan TKI terus meningkat, maka daya tawar TKI maupun pemerintah Indonesia semestinya semakin tinggi. Dalam kondisi permintaan selalu terpenuhi, pemerintah maupun masyarakat Taiwan berada dalam posisi di zona nyaman (*comfort zone*). Karena pengaruh agen, TKI dipandang memiliki spesialis dalam sektorkesejahteraan sosial. Selama pemerintah Taiwan sangat tergantung pada sistem perantara (*broker*) yang dimainkan agen dalam rekrutmen TKI (Yuniarto, 2015, 18-9), maka peran agen tetap signifikan.

Branding image TKI saat ini tidak lepas dari hasil kebijakan pemerintah terkait ijin bekerja TKI yang ikut berkontribusi dalam membentuk spesialisasi profesi bagi TKI. Sejak dikeluarkannya kebijakan perekrutan TKA, pemerintah Taiwan hanya mengizinkan masa kontrak kerja 3 tahun dan bila masa kerja telah habis, kontrak dapat diperpanjang 1 kali 3 tahun. Dengan demikian, seorang TKI dapat bekerja hingga 6 tahun lamanya di Taiwan. Namun pada tahun 2009 kebijakan ijin tinggal ini kemudian diperpanjang hingga sembilan tahun dan pada tahun selanjutnya diperpanjang lagi menjadi 12 tahun. Diperkirakan yang telah bekerja selama 9 tahun sudah berjumlah 9.000 orang. Bahkan saat ini pemerintah Taiwan sedang menggodog untuk memperpanjang kebijakan kerja menjadi 15 tahun (*Majalah Holiday*, 2016) dengan alasan bahwa mereka adalah TKI terampil dan layak dipertahankan. Semestinya pemerintah Indonesia mempertimbangkan tenaga kerja terampil baru ini sebagai asset bangsa di masa mendatang. Satu hal yang perlu mendapat perhatian dari kebijakan perpanjangan ijin kerja ini adalah bahwa TKI tidak ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak (salah *job*). Untuk itu kontrol dari pemerintah Taiwan maupun pemerintah Indonesia sangat diperlukan.

Kebijakan *zero-maid* menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pasokan TKI, sehingga dapat mengancam pada ketersediaan sumber daya manusia di sektor kesejahteraan sosial. Permintaan akan TKI baru menjadi akan sulit dipenuhi. Sementara ketergantungan

masyarakat Taiwan terhadap TKI cukup tinggi dan TKI telah mendapatkan *branding image* yang baik di sektor kesejahteraan sosial. Bila pemerintah Taiwan harus mengganti dengan TKA Asia Tenggara lainnya, tentu dibutuhkan pengorbanan dan usaha lebih keras dari pemerintah Taiwan, karena bagaimanapun pemerintah harus menyediakan tenaga kerja pengganti (substitusi).

Tidak menutup mata, bahwa hubungan Indonesia dan Taiwan dalam hal ekonomi memang tidak seimbang/asimetris (Tsay, 2015). Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga kerja dan mahasiswa ke Taiwan, namun tidak sebaliknya. Dengan alasan pilihan masyarakat Taiwan terhadap TKI, sebenarnya TKI memiliki daya tawar yang cukup diperhitungkan. Bila kebijakan *zero-maid* ini diberlakukan, tentu akan sangat berdampak bagi ketersediaan tenaga terampil di bidang ini. Apalagi Taiwan mengalami kekurangan tenaga kerja profesional di bidang ini. Dengan demikian, TKI di Taiwan semakin terampil namun gaji tetap rendah. Namun semestinya bukan saja TKI yang memiliki daya tawar tetapi Pemerintah Indonesia semestinya juga memiliki daya tawar yang lebih baik.

RESPON PEMERINTAH TAIWAN

Menanggapi kebijakan pemerintah Indonesian, pemerintah Taiwan berusaha untuk bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari pengurangan pengiriman TKI ke Taiwan. Upaya negosiasi pemerintah Taiwan ini dibuktikan dengan peningkatan gaji TKI yang sejak 1997 tidak pernah mengalami kenaikan. Sementara pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan usulan dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah Taiwan (*Taipeitimes.com*, 2015). Akhirnya pada tahun 2015 TKI menerima gaji minimum sebesar NT 17.000 (setara dengan US\$ 525.88 atau Rp 6,4 juta), lebih tinggi dari yang sebelumnya yaitu sebesar NT 15.840. Kenaikan upah ini seiring dengan meningkatnya upah minimum di Taiwan dari NT 19,273 menjadi NT 20,008 yang berlaku mulai 1 Juli 2015 dan untuk menyesuaikan nilai tukar. Kebijakan itu hanya berlaku bagi

yang ‘re-entry hiring’ (baru datang). Sementara mereka yang telah bekerja atau masih menjalani kontrak didorong melakukan negosiasi ulang (Ilmie, 2015). Permasalahannya kemudian adalah seberapa kuat negosiasi itu dilakukan oleh para TKI. Peningkatan ini patut diapresiasi karena sudah lama pemerintah berusaha negosiasi, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar. Usulan serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Filipina (*Taipeitimes.com*, 2015).

Kedua, adanya amandemen¹⁵ *Employment Service Act* pada tahun 2016. Untuk memperpanjang masa kerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang berlaku sejak 2016. Dengan kebijakan baru ini TKA tidak perlu ke luar negeri dulu. Jadi mereka diijinkan untuk langsung dipekerjakan kembali (*direct hiring*). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghemat waktu dan uang TKA serta mempermudah majikan di Taiwan. Sebelumnya, untuk memperpanjang masa kerja mereka diharuskan keluar negeri selama 40 hari setelah 3 tahun pertama. Akibatnya, sekitar 14,000 TKA harus meninggalkan Taiwan setiap tahun dalam rangka memperpanjang waktu bekerja mereka di Taiwan (Loa, 2016). Dengan mekanisme baru ini, TKA tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk ke luar negeri. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk agen penyalur. Di beberapa negara, ongkos agen membebani TKA (Yuniarto, 2015) dan mendorong terjadinya TKI kabur. Misalnya, di Indonesia, TKI harus membayar agen sekitar NT 50.000 – NT 54.000, sementara untuk tenaga kerja Vietnam mencapai NT 120.000. Majikan juga dapat terhindar dari kekosongan tenaga kerja perawat (Loa, 2016). Jika amandemen ini sekaligus menjadi momen bersejarah adanya peningkatan perlindungan HAM di Taiwan (Loa, 2016), sebenarnya di balik kebijakan ini tersirat betapa masyarakat Taiwan membutuhkan peran TKA.

Ketiga, adanya perbaikan lingkungan kerja bagi TKA. Selain negosiasi, pemerintah Taiwan juga berusaha menciptakan lingkungan

¹⁵ Kebijakan ini atas usulan dari legislator Partai Democratic Progressive, Lin Shu-fen (林淑芬) dan Wu Yu-chin (吳玉琴). Selama ini Taiwan masuk dalam daftar sebagai bangsa dengan masalah perdagangan manusia oleh kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Groups*) karena perlakuannya kepada TKA (Loa, 2016).

yang lebih nyaman bagi TKI (Shan, 2015). Salah satunya adalah membuat lingkungan yang lebih ramah bagi muslim mengingat sebagian besar dari TKI adalah Muslim. Hal ini sebagai bagian dari hidup dalam masyarakat multikultur. Upaya ini mencapai puncaknya pada tanggal 10 Juli 2016 dimana Pemerintah Taiwan mengakui dan mengumumkan bahwa Idul Fitri sebagai hari raya umat Islam yang penting. Pengumuman ini ditampilkan melalui TV maupun website resmi pemerintah sehingga banyak orang yang menyaksikan (Nugroho, 2016). Dalam pengumuman tersebut, pihak ketua Masjid Besar Taipei (*Taipei Grand Mosque*) mendorong agar majikan mengizinkan TKI muslim menunaikan sholat ied di masjid terdekat untuk menyelesaikan kewajiban di bulan Ramadhan (*Overseas community affair council*, 2016). Kini, lingkungan yang lebih nyaman dapat dirasakan oleh TKI muslim selama ramadhan. Misalnya, penyediaan tenda di *Taipei Main Stasiun* untuk diselenggarakannya tilawah dan pengajian, penyediaan takjil oleh pemerintah Taiwan. Serta diijinkannya TKI untuk melakukan *gathering* di *Taipei Main Stasiun*, penyediaan makanan halal di sebuah pusat perbelanjaan grosir terbesar di Taipei selama bulan Ramadhan.¹⁶

Sebelumnya masalah ibadah dan menjalankan syariat Islam memang menjadi salah satu masalah yang dihadapi TKI (wang, nd). Selama ini mereka kerap mendapat hambatan dalam menunaikan ibadah termasuk puasa, sholat jumat maupun sholat lima waktu dengan alasan itu akan menurunkan produktivitas kerja mereka sehingga majikan kerap membatasi praktik ibadah mereka (Wang, nd). Bahkan isu agama salah satu kasus perselisihan antara majikan dan pekerja (*Dailymail.co.uk*, 2010). *Gathering* di Taipei Main Stasiun dianggap menimbulkan masalah sosial bagi orang Taiwan (Wang, nd). Oleh orang Taiwan, mereka menganggap bahwa “stasiunku” dikuasai oleh orang asing. Kini, lingkungan yang lebih nyaman juga disediakan bagi TKI muslim selama Ramadhan. Misalnya, penyediaan tenda di Taipei Main stasiun untuk diselenggarakannya

¹⁶ Wawancara dengan pengurus *Indonesia Diaspora Network in Taiwan* di Jakarta yang juga seorang muslim dan telah tinggal di Taiwan selama 22 tahun, pada 5 Agustus 2016.

tilawah dan pengajian. Penyediaan takjil oleh pemerintah Taiwan, serta diijinkannya TKI untuk melakukan kumpul-kumpul di *Taipei Main Stasiun*. Fasilitas transportasi dan personil juga ditambah saat Idul Fitri berlangsung, termasuk personil petugas kebersihan.

Namun, berbagai upaya dilakukan oleh berbagai kalangan untuk meningkatkan pemahaman yang keliru tersebut. Upaya dilakukan bukan hanya oleh NGO, organisasi-organisasi TKI, namun juga mahasiswa Indonesia Muslim serta masyarakat muslim internasional lainnya di Taiwan. Misalnya, syiar melalui *website muslim camp*, maupun pameran yang secara rutin diselenggarakan. Pemerintah Taiwan pun berusaha membuat *cultural center* sehingga kebudayaan orang asing menjadi lebih terlihat di mata orang Taiwan (Wang, nd). *Center* ini akan menjadi wadah untuk menjaga kebudayaan mereka dan tradisi di Taiwan sekaligus menjadi wadah bagi orang Taiwan untuk mengenal budaya lain. Respons dari berbagai kegiatan ini lambat laun akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai budaya Indonesia, termasuk kulinernya, mengenai Islam itu sendiri.

Persoalan di atas sebenarnya menunjukkan kurangnya interaksi sosial antara TKI dengan orang lokal. Karena budaya yang dibawa TKA tidak memberikan kesempatan baru terjadinya pertukaran kebudayaan antara orang Taiwan dan TKA, sehingga yang terjadi adalah orang Taiwan ingin melakukan pemisahan antara orang asing dengan orang Taiwan agar TKA tidak lagi mengganggu orang Taiwan. Masalah komunikasi mungkin menjadi salah satu pemicunya. Perbedaan budaya membuat keterasingan sekaligus menimbulkan prasangka di kedua belah pihak. Dilakukannya upaya-upaya berbagai kalangan untuk mengenalkan kebudayaan negara asing baik oleh pemerintah Taiwan, oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia di Taiwan, menimbulkan proses simpati sehingga baik orang Taiwan maupun TKI mau menghormati dan belajar dari budaya bangsa lain. Meski demikian, Indonesia masih belum dianggap penting untuk dipelajari. Perpanjangan masa kontrak kerja menjadi salah satu faktor penunjang komunikasi yang lebih baik antara TKI dan majikan. Namun, jika masa kontrak terus

diperpanjang, Pemerintah Indonesia juga harus memikirkan kebutuhan SDM untuk masa depan bangsa Indonesia yang juga mulai menua ini.

Selama ini Pemerintah Taiwan mengklaim telah memperlakukan tenaga kerja asing lebih baik dari perlakuan pemerintah negara lain. Namun data dari hak asasi manusia AS menunjukkan bahwa pemerintah Taiwan memperlakukan Tenaga Kerja Asing secara tidak baik. Protes dari tenaga kerja asing di Taiwan tahun 2015 lalu menuntut adanya perlakuan yang lebih bermartabat bagi agensi dan majikan di Taiwan. Apalagi Presiden terpilih Tsai Ing-wen (蔡英文) telah berjanji untuk memberikan hak perlindungan yang lebih baik kepada tenaga kerja migran (Yeh dan Chen, 2016).

PENUTUP

Implementasi kebijakan *zero-maid* nampaknya akan sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya manusia untuk merawat lansia. Apalagi di kemudian hari semakin banyak lansia di Taiwan, dengan usia yang semakin panjang pula. Implementasi program *national ten-year long-term care* akan membutuhkan semakin banyak tenaga perawat. Hingga tahun 2015 setidaknya kebutuhan tenaga perawat untuk program ini baru terpenuhi 10% dari total kebutuhan (Ip, 2015).

Sampai dengan tahun 2016 TKA dari Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia telah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga perawat lansia. *Stereotyping* berdasarkan kebangsaan yang dilakukan oleh agen penyalur, majikan maupun TKI itu sendiri, kini seolah telah terbukti bahwa *stereotyping* itu bukan mitos, namun juga ikut membangun *branding image* dari TKI. TKI mendominasi di sektor kesejahteraan sosial sejak 2005. TKI semakin memiliki keunggulan komparatif dan ketergantungan masyarakat Taiwan terhadap TKI cukup besar. Dalam kondisi ini, semestinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia maupun TKI itu sendiri untuk memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Kenaikan gaji TKI di sektor kesejahteraan sosial yang meningkat menunjukkan salah satu posisi daya tawar pemerintah Indonesia yang lebih tinggi.

Selanjutnya, upaya meningkatkan perlindungan TKI menjadi agenda selanjutnya yang perlu diperjuangkan, apalagi Presiden Tsai Ying-wen telah berjanji untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik lagi.

Sementara itu, upaya Pemerintah Taiwan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi TKI muslim juga menunjukkan adanya indikasi yang lebih baik terciptanya kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Namun, rencana penggodogan masa kerja hingga 15 tahun oleh Pemerintah Taiwan harus disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan bijak. Pengalaman dan ketrampilan TKI berkecimpung dalam jenis pekerjaan ini dalam kurun waktu yang lama sebenarnya menjadi aset penting bagi bangsa Indonesia. Apalagi di masa depan Indonesia akan menghadapi tantangan akan meningkatnya jumlah penduduk lansia yang akan memerlukan jumlah perawat lansia.

Penelitian ini penting untuk pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan yang mengurus persoalan TKI agar mempunyai cara pandang baru terhadap TKI. Bahwa TKI sekembali dari Taiwan, terutama mereka yang telah lama bekerja telah mengantongi keterampilan tinggi di bidang perawatan orang tua merupakan aset bangsa di masa mendatang. Bekerja dalam bidang yang sama selama sembilan tahun atau lebih merupakan sebuah pengalaman penting bagi TKI. Seorang TKI bukan saja dapat memperoleh pendapatan dari profesinya tersebut, akan tetapi juga mempertajam keterampilannya sehingga menjadi spesialis perawat orang tua. Mereka merupakan aset bangsa yang sepatutnya diberikan kesempatan berkarya lebih baik ketika kembali ke tanah air. Selama ini, para TKI yang telah kembali ke tanah air cenderung bekerja di sektor yang tidak ada kaitannya dengan perawatan orang tua. Hasil penelitian Setyaningsih (2011) menunjukkan bahwa tidak semua TKI ketika kembali ke tanah air berharap untuk bekerja di sektor perawatan orang tua, melainkan mereka lebih memilih untuk berwiraswasta (berdagang). Pemerintah sendiri menyediakan program kewirausahaan untuk mereka berwiraswasta. Namun ketidakinginan mereka bekerja di sektor terkait perawatan orang tua dikarenakan belum mencuatnya masalah *ageing society* di Indonesia,

sebagaimana dialami oleh pemerintah Taiwan saat ini. Meskipun Indonesia sendiri telah memasuki *ageing society*, namun kebutuhan akan perawat lansia masih belum mendesak seperti halnya di Taiwan. Meski demikian, pemerintah sudah harus menyadari akan bom waktu di 15 atau 20 tahun mendatang. Pemerintah juga harus menyadari bahwa keberadaan mereka selama di Taiwan telah berhasil mengumpulkan keterampilan khusus yang tidak dapat diperoleh secara instan. Mereka itu laksana tenaga kerja yang diberi pelatihan (*trainee*)¹⁷ di Jepang atau di Korea yang sama-sama memanfaatkan tenaga kerja asing secara murah, dengan status *on the job training/ OTJ*.

Selama ini TKI yang telah kembali ke Indonesia tidak mengantongi sertifikat meski mereka terampil di bidang perawatan orang tua, baik sekedar rekomendasi dari majikan, surat keterangan dari departemen tenaga kerja Taiwan maupun dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang diwakili oleh Kantor Perdagangan dan Ekonomi Indonesia di Taiwan (KDEI). Surat keterangan dapat diperoleh dari KDEI hanya jika TKI dengan inisiatif sendiri memintanya kepada KDEI¹⁸. Jika TKI dari Taiwan kembali dengan sertifikat seperti layaknya seorang peserta pelatihan dan sertifikat itu diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai bukti keterampilan yang mereka dapatkan, hal ini mungkin dapat dijadikan sebagai bukti kualifikasi yang telah mereka dapatkan, yang akan bermanfaat untuk masa depan mereka.

PUSTAKA ACUAN

Abella, M. (2006). Policies in admission low-skilled workers in Korea, Japan and Taiwan (China): similarities and differences. ILO/EU Asian Programme on the Governance of Labor

¹⁷Karena tidak diakuinya tenaga kerja asing dengan keterampilan rendah (*low-skilled foreign workers*) memasuki kedua negara tersebut untuk alasan bekerja, maka Korea dan Jepang menerapkan system yang berbeda dengan di Taiwan. Di Korea, mereka masuk dalam program *Employment Permit System* (EPS) yang diimplementasikan sejak July 2004, sedangkan di Jepang di bawah *Technical Internship Training Programme* (TITP) atau *Gaikokujingine jishu seido* yang diselenggarakan oleh *Japan International Training Cooperation Organization* (JITCO) (Abella, 2006: 1-17).

¹⁸ Wawancara dengan Yuniarto, 26 Desember 2016 di Jakarta.

- Migration, Technical Note.http://natlex.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_160608.pdf.
- Ananta, A. (2009). Estimating the value of the business of sending low-skilled workers abroad: an Indonesian case. Paper yang dipresentasikan di the XXVI IUSSP International Population Conference, 27 September - 2 Oktober 2009, Marrakech, Maroko.
- Ari. (2015). Migrant care: Jokowi melarang TKI itu sebuah langkah tidak konstitusional. <http://www.zeronol.com/2015/02/15/migrant-carejokowi-melarang-tki-itusebuah-langkah-tidak-konstitusional/>. Diakses 29 November 2016.
- Bartlett, H. P. dan Wu, S. C. (2000). "Ageing and aged care in Taiwan" dalam Phillips, D. R(ed). (2000). *Ageing in the Asia-Pacific region: issues, policies and future trends*. London and New York: Routledge.
- Bureau of Employment and Vocational Training, CLA.(2011). <http://statdb.cla.gov.tw/html/mon/c12010.pdf>.Diakses 10 Maret 2010.
- Chen, Y. H. (2013). (Re)-regulating care: employing foreign carers for older persons in Taiwan. Disubmit untuk memenuhi Doktor of Philosophy, School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology. http://eprints.qut.edu.au/61134/1/Yu-Hsien_Chen_Thesis.pdf. Diakses 10 Oktober 2016.
- Chen, Y. J. (2007). More choices for families?: changing elderly care models in Taiwan. *International Journal of Sociology of the Family*, Vol. 33, No. 1. pp. 123-143.
- Dailymail.co.uk. (2010). Chinese boss 'forced Muslim women workers to eat pork to give them more stamina' <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1276184/Chinese-boss-forced-Muslim-women-workers-eat-pork-stamina.html>. Diakses pada 10 Juni 2011.
- Gusman, Y. (2012). The spiritual life of Indonesia migrant workers in Taiwan (2009-2011). Thesis untuk program master di College of Liberal Art, English Department. National Central University. Tidak dipublikasikan.
- Ilmie, M. I. (2015). KDEI: kenaikan gaji untuk tki kontrak baru. <http://www.antarabali.com/berita/74837/kdei-kenaikan-gaji-untuk-tki-kontrak-baru>. Diakses 8 Oktober 2016.
- Ip.Fish. (2015). Taiwan: justice for caring! migrant workers rally 2015. International Domestic Workers Federation. <http://www.idwfed.org/en/updates/taiwan-justice-for-caring-migrant-workers-rally-2015>. Diakses 12 Desember 2016.
- Kementerian Tenaga Kerja Taiwan.(2016). Foreign workers in social welfare sector by nationality. <http://statdb.mol.gov.tw/html/mon/c12030.htm>. Diakses 20 September 2016.
- Lan, P. C. (2006). *Global cinderellas: migrant domestics and newly rich employers in Taiwan*. Durham and London: Duke University Press.
- Law, K. W. (ed.). (2001). *Aging gender and family in Singapore, Hong Kong and China*. Program for Southeast Asian Area Studies (PROSEAS). Taipei: Academia Sinica.
- Loa, L.S. (2016). Foreign workers reform bill passes first reading. <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/06/23/2003649276>. Diakses 18 Oktober 2016
- Loveband, A. (2003). Positioning the product: Indonesian migrant women workers in contemporary Taiwan. Working Papers Series No. 43 April 2003. Southeast Asia Research Center. City University of Hong Kong. http://www.cityu.edu.hk/searc/Resources/Paper/WP43_03_Loveband.pdf. Diakses 2 Oktober 2016.
- Majalah Holiday.com. (2014). Batas durasi TKA bakal diperpanjang 15 tahun. <http://www.majalah-holiday.com/2014/12/batas-durasi-tka-taiwan-bakal.html>.
- Mateo, J. E. B. (2010). The future of the elderly care in Spain and Taiwan: the cultural background. http://ijbssnet.com/journals/Vol._1_No._2_November_2010/4.pdf. Diakses pada 21 November 2016.
- Ministry of Health. (2008). Nursing care in Taiwan. http://www.mohw.gov.tw/EN/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=475&fod_list_no=862&doc_no=29952&rn=1476769427. Diakses 2 Oktober 2016.
- Nugroho, G. A. (2016). Lebaran 1437 H ala mahasiswa di Taipei Taiwan. http://www.kompasiana.com/gabryne/lebaran-1437-h-ala-mahasiswa-di-taipei-taiwan_577e0c33cb23bdfa052a6ac1. Diakses 20 September 2016.
- Nurvidya. (2015). "Respon terhadap Masyarakat yang Menua". Disampaikan dalam sebuah presentasi seminar akhir hasil penelitian yang diselenggarakan oleh P2SDR-LIPI, Jakarta, November 2015.
- PresidenRi.go.id. (2016). Perlindungan komprehensif berbasis nawacita. <http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/perlindungan->

- komprehensif-berbasis-nawacita.html. Diakses 2 November 2016.
- Salt, J. & Stein, J. (1997). Migrant as a business: the case of trafficking. *International Migration*.35, 467-494.
- Setyaningsih, R. P. (2011). Job satisfaction of Indonesian workers in Taiwan. Thesis untuk program master di International Master's Program in Asia Pacific Studies (IMAS), National Chengchi University (NCCU), Taiwan. Tidak dipublikasikan.
- Statistical Yearbook of the ROC 2009.(2010). Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Republic of China. <http://eng.dgbas.gov.tw/public/Data/011917403371.pdf>. Diakses 20 Juni 2010.
- Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.(2015). Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan. http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf. Diakses 11 Okt 2016.
- Taipeitimes. (2013). Taiwan's population moves from 'aging' to 'aged': statistics. <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2013/10/23/2003575197>. Diakses 23 September 2016.
- Taiwan Statistical Data Book.(2010). Council for Economic Planning and Development, Executive Yuan, Republic of China (Taiwan). <http://www.cepd.gov.tw/encontent/m1.aspx?sNo=0014864>. Diakses 20 Juni 2010.
- Tsay, C. L. (2015). Migration between Southeast Asia and Taiwan: trends, characteristics and implications. *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 2, pp. 68-92. http://journal.binus.ac.id/index.php/jas/article/download/842/pdf_1. Diakses 18 Oktober 2016.
- Wang, L. J. (N.d). The formation of 'transnational communities': a new challenge to 'multicultural Taiwan.' https://www.researchgate.net/publication/233152327_THE_FORMATION_OF_TRANSNATIONAL_COMMUNITIES. Diakses 8 Oktober 2016.
- Yeh & Christie C. (2016). Foreign migrant workers in Taiwan overworked: President Tsai. <http://focustaiwan.tw/news/afav/201607280016.aspx>. Diakses pada 20 Oktober, 2016.
- Yuniarto, P. R. (2009). Sebuah pengantar tentang remitansi buruh migran Indonesia. Dalam Gusnelly et. al., (2009). *Pengelolaan Remitansi buruh migran Indonesia*. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Yuniarto, P. R. (2015). Indonesian Migration Industry in Taiwan: Some socio-economic implications and improvement challenges. *Jurnal Kajian Wilayah* vol. 6 No. 1. PSDR-LIPI, Jakarta.

Wawancara:

Wawancara dengan Manager Indonesia Diaspora Network Taiwan pada 4 Agustus 2016 di Jakarta.

Wawancara dengan Yuniarto, Rudolf pada 26 Desember 2016 di Jakarta.

WANITA ASIA DALAM IMAJINASI DIGITAL: KAJIAN LITERATUR ATAS ORIENTALISME

Iman Zanatul Haeri

Komunitas Perpustakaan Kandangbuku

Email: imanzanatulhaeri91@gmail.com

Diterima: 9-11-2016

Direvisi: 5-12-2016

Disetujui: 7-12-2016

ABSTRACT

Globalization is marked with the spread of Western culture technology products. One of the Western cultural products that are very influential was Hollywood movies. Fictitious narratives produced the some imaginative ideas that apply also on social media communicative as dating site, video porn sites, until advertising. The awareness of imaginative west of geopolitics outside himself or Other revealed by Edward Said in Orientalism. Said that initially examine the practice of West imaginative through Literature opens up the possibility of resumption of studies on other media with the idea that the West has distortion of the knowledge of the East, one considers that the exotic East. Exotic ideas still present in western digital imagination when respect women Asia as the representation of the women of the east. Some Hollywood movies, dating site, video porn sites until the advertisements still presents stereotypes Asian women foreign, mysterious, strange and sensual display. Asian women trapped in exotic role in the Digital imagination space. They exoticization and exoticed themselves before the digital public. Globalisation and the development of communications technology in digital imagination proved does not stop the stereotypes against Asian women that they exotic. Thus through digital imagination and the will of the global capitalism, representation Asian women shown, celebrated, promoted and taken advantage of it.

Keywords: *digital imagination, women Asia, post-Orientalism, exotic.*

ABSTRAK

Globalisasi ditandai dengan tersebarnya produk teknologi budaya Barat. Salah satu produk budaya Barat yang sangat berpengaruh adalah film Hollywood. Narasi fiktif tersebut menghasilkan beberapa gagasan imajinatif yang berlaku juga pada media sosial komunikatif seperti situs kencan, video porno, hingga iklan. Kesadaran imajinatif barat terhadap geopolitik di luar dirinya atau *other* diungkap oleh Edward Said dalam Orientalisme. Said yang pada awalnya mengkaji praktik imajinatif Barat melalui Sastra membuka peluang terbukanya kajian pada media lainnya dengan gagasan bahwa Barat memiliki distorsi pengetahuan tentang Timur, salah satunya menganggap bahwa Timur Eksotis. Gagasan eksotis tetap hadir dalam imajinasi digital Barat ketika memandang Wanita Asia sebagai representasi wanita timur. Beberapa film Hollywood, situs kencan, video porno hingga iklan masih menghadirkan stereotip Wanita Asia yang asing, misterius, aneh dan sensual. Wanita Asia terjebak pada peran eksotisnya dalam ruang imajinasi digital tersebut. Mereka dieksotiskan dan mengeksotiskan diri di hadapan publik digital. Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dalam imajinasi digital terbukti tidak menghentikan stereotip terhadap wanita asia bahwa mereka eksotis. Justru melalui imajinasi digital dan kehendak kapitalisme global, representasi wanita asia dipertontonkan, dirayakan, dipromosikan dan diambil keuntungan darinya.

Kata kunci: imajinasi digital, wanita Asia, pasca-Orientalisme, eksotis.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan praktik internasional yang hampir tidak mungkin dihindari di belahan dunia mana pun. Scholte (2002, 8) menyatakan ada empat definisi globalisasi, yakni internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, dan westernisasi. Meski istilah yang lebih dekat adalah “globalisasi sebagai westernisasi”, namun definisi lainnya yang dinyatakan Scholte (2002) seperti globalisasi sebagai internasionalisasi, liberalisasi dan universalisasi merupakan bagian dari hegemoni kultural Barat. Kenyataan tersebut, menandakan bahwa globalisasi merupakan sebuah bangunan imajinasi intelektual Barat.

Sejarah kesusastraan Barat seiring dengan perkembangan budaya, politik, dan ekonomi Barat, juga berisi narasi tentang bagaimana “Barat” mendefinisikan dirinya dan memandang sesuatu di luar dirinya. Narasi-narasi sastra dalam bentuk tulisan juga dipraktikkan dalam seni pertunjukan seperti teater. Usia teater Barat hampir sama dengan usia sastra sendiri. Dalam beberapa kesempatan, karya sastra dipertunjukkan dalam sekuel drama yang sudah muncul sejak era Yunani kuno. Teater dalam bahasa Inggris *Theater* atau dalam bahasa Prancis *Theatre* sedangkan dalam bahasa Yunani *Theatron* yang merupakan turunan dari kata ‘*Theaomai*’ mengandung makna dengan takjub melihat atau memandang (Melani, 2008, 99). Melalui pengertian tersebut, tontonan sebuah drama yang dihasilkan oleh teks sastra mengalami perubahan media seiring perkembangan teknologi dan zaman.

Sejak ditemukannya fotografi, hingga peralatan yang disebut kamera, maka ruang imajinasi sastra hadir dalam era baru sinematografi. Penemuan kinetostop oleh Thomas Alfa Edison memulai sejarah film atau drama sastra yang hadir dalam *motion picture* atau gambar bergerak. Visualisasi tersebut tetap menghadirkan “imajinasi kultural barat” pada era baru yang tidak berhenti pada puncak pencapaian sinematografi, namun film yang berisi narasi sebuah drama fiktif maupun nonfiktif yang menghadirkan industri film Hollywood, terus berkembang dan menyebar melalui moda produksi baru, yang disebut dunia digital.

Pada awalnya, sebuah film Hollywood hanya bisa dinikmati melalui layar lebar dan melalui perjanjian tertentu, hadir melalui televisi (*The Hollywood Lawyer*, 2016). Seperti perjanjian mengenai serial komik *Marvel “X-Men”* yang pernah dirilis menjadi film, kemudian direncanakan menjadi serial televisi *20th Century Fox* setelah jaringan televisi tersebut memiliki hak adaptasi karakter *X-Men* (McCormick, 2016 Juli 12) (Muvila.com, 2015). Pada perkembangan lanjutan, film-film Hollywood dapat dinikmati melalui website internet. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai film Hollywood yang dapat dinikmati melalui *Youtube*. Melalui media tersebut, narasi-narasi yang hadir melalui drama film atau video menghasilkan gagasan-gagasan imajinatif maupun mitos yang dalam beberapa kesempatan dipercaya sebagai kebenaran.

Industri film Hollywood, hingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi internet bertanggung jawab untuk sekian stereotip terhadap beberapa budaya di luar dirinya (Keith, 2013; Fahri, 2011), sebagai *other*. Termasuk pemahaman imajinatif media tersebut pada sebuah lingkup peradaban yang sesungguhnya dinamis, seperti narasi yang tercipta atas benua terbesar di dunia dan paling beragam secara kultural, sebagaimana barat menyebutnya “Timur”.

Definisi konstruktif mengenai “Timur” mengalami beragam distorsi yang hampir sebagian besar diisi oleh mitos-mitos yang merugikan. Yakni ketika perempuan Asia dipandang sebagai makhluk oriental yang masih memegang nilai-nilai tradisional bahwa wanita adalah pelayan bagi laki-laki, kebertubuhannya yang eksotis hingga pandangan tentang perilaku seksual wanita Asia. Hal ini semakin terkemuka setelah penerbitan buku *Orientalisme* oleh Edward Wadie Said, yang mampu menunjukkan bagaimana mitos-mitos itu bekerja dalam imajinasi Barat terhadap Timur. Satu bagian kecil dari “Timur” yang imajinatif tersebut adalah bentuk imajinatif barat terhadap wanita Asia, yang ironisnya, tetap muncul di era globalisasi. Seperti kepercayaan bahwa wanita Asia dipandang sebagai wanita eksotis. Edward Said, melacak bagaimana distorsi dalam produk Disneyland *Aladdin* (1994) terhadap tokoh

Jasmine (Wanita Asia) atau peran inferior penduduk Asia dalam film Hollywood *Pearl Harbour* (2001), situs kencan, film porno dengan laman “*Asian Women*” atau wanita Asia hingga iklan yang menunjukkan representasi ‘wanita Asia’. Kesadaran geopolitik tersebut, bergeser pada wacana wanita Asia eksotis, seiring dengan perubahan media dan kepentingan ekonomi-politik Barat di wilayah Asia lainnya, melalui kolonialisme.

Sebagaimana Orientalisme Said memetakan beragam praktik para orientalis dalam prospek bangunan pengetahuan Barat tentang sesuatu di luar dirinya atau *Other*, maka proses “mentimurkan timur”—sebagai salah satu sikap ideologis tersembunyi--hendak dilacak praktiknya, (1) apakah terjadi proses yang hampir sama; yakni “mengeksotiskan wanita Asia”. Sehingga ketika wanita Asia mampu mengembangkan basis eksistensialnya sebagai salah satu manusia di bumi, apakah melalui media-media imajinatif tersebut, wanita asia terus didorong untuk *di-eksotiskan* dan *mengeksotiskan dirinya* dalam panggung teater imajinatif Digital Barat (2) Bagaimana praktik imajinasi digital terhadap wanita Asia? Guna melacak benih-benih orientalisme dalam media-media imajinatif tersebut, maka dilakukan pencarian data melalui perkembangan wacana ‘wanita asia’ di industri Hollywood, dalam ‘situs kencan’ wanita asia, situs porno terkait halaman “wanita Asia’ serta beberapa visualisasi wanita Asia dalam iklan.

ORIENTALISME DAN PASCA ORIENTALISME

Sejak diterbitkan pada tahun 1978, buku *Orientalisme* menuai beragam perdebatan di kalangan akademis. Bila memakai cara pandang Said memahami bukunya sendiri, ia membedakan dua jenis pengetahuan. Yakni pengetahuan murni dan pengetahuan politis (Said, 2010, 13). Di antara kedua jenis pengetahuan ini, Said meragukan terdapat independensi pengetahuan murni terhadap pengetahuan politis. Sebab, pengetahuan murni tidak benar-benar independen terhadap situasi politik, hanya saja, pengetahuan murni bersikap pasif terhadap hal-hal politis.

Cara pandang tersebut memperjelas posisi orientalisme dalam khazanah ilmu

pengetahuan sosial. Secara garis besar, Said hadir dengan cara membedah karya sastra Barat untuk melacak akar-akar kelahiran orientalisme. Proses pembedahan tersebut membuka tabir praktik-praktik lembaga ilmu pengetahuan Barat beserta imajinasi yang hadir dalam segenap karya sastra Barat, yang cenderung mendukung kepentingan ekonomi-politik Barat.

Sebagian besar temuan Said dalam orientalisme didapatkan dari kajian sastra. Ia melacak akar-akar orientalisme sejak zaman Iliad (Sastra Yunani Kuno sekitar abad ke-6) dan 9 SM), Invasi Napoleon ke Mesir (1798), ketika Orientalisme melahirkan Antropologi dan Filologi (abad ke-19), rivalitas Inggris dan Perancis dalam kajian Orientalisme dan jejak-jejak orientalisme kontemporer. Geo-politik yang membuat garis demarkasi antara Barat dan Timur, yang menjadi sebetulnya kesadaran dalam orientalisme sudah muncul pada teks era Yunani Kuno, *The Persians* karya Aeschylus. Ia memaparkan nestapa orang Persia yang dipimpin oleh raja Xerxes ketika kalah berperang dengan Yunani (Said, 2010, 83). Meski orang-orang Persia hanya satu bagian kebudayaan dari sekian banyak kebudayaan yang ada di Asia, namun kekalahan tersebut digeneralisir sebagai kemenangan Yunani (Barat) atas Asia (Timur).

Representasi merupakan konsep kunci dari orientalisme. Representasi, ditafsirkan dalam kalimat yang dikutip Said (2010, 524) dari Marx “*Mereka tidak dapat merepresentasikan dirinya; mereka harus direpresentasikan.*” Kedua, representasi tersebut memunculkan dampak orientalisme yang menjadi perdebatan dan bahan koreksi bagi produk pengetahuan barat, maka kajian yang fragmentaris Said tersebut; menyisakan beberapa fragmen lain yang belum diulas tuntas. Kajian ini meliputi wilayah Timur Jauh, Indochina, dan wilayah lainnya. Melalui beberapa catatan, Said menyatakan bahwa kehadiran kajian wilayah tersebut dan hubungan antara Orientalisme dan Subaltern merupakan perkembangan dari “*Pasca-orientalisme*”. Kajian tersebut diharapkan terus berkembang. Namun di satu sisi, pasca orientalisme memiliki ekses negatif sebagai salah tafsir bahkan penerjemahan yang bermasalah (Said, 2010, 516). Di sisi lain, persoalan-persoalan yang

timbul oleh kolonialisme dan beragam fenomena setelahnya, dikenal dengan kajian *post-kolonial*.

Shelley Walia (2001, 20) menyebutkan bahwa Said menunjukkan bahwa kebenaran bersifat situasional dan politis, ia membuka disiplin sejarah bagi tulisan dan intervensi subaltern. Tanpa sepenuhnya menolak studi empiris, namun upaya Said untuk mengumpulkan sejumlah fakta, dan penekanannya terhadap ikonografi tanda-tanda, simbol-simbol dan bahasa, membantu sejarawan sosial dan sastra untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang sejarah. Maka, cukup tepat menempatkan Said sebagai salah satu serial postmodernisme atas posisinya yang cukup “dekonstruktif” dalam sejarah para orientalis.

Pemakaian istilah *post* untuk postkolonialisme dan postmodernisme menyiratkan sebuah usaha “melampaui” melainkan lebih kepada “kontinuitas” dan “diskontinuitas”, yang menitikberatkan pada mode-mode baru dari praktik-praktik kolonialis yang lama (Said, 2010, 543). Sebagaimana diuraikan Medhy Aginta Hidayat (2002) dalam *Menggugat Modernisme: Mengenal Rentang Pemikiran Jean Baudrillard*, ia menyatakan bahwa postmodern merupakan peralihan yang esensial menuju hal-hal profan. Sebagai sebuah perkembangan zaman, generasi postmodernis telah mengalihkan kajiannya pada Media televisi, iklan dan layar lebar.

Keterlibatan Said dalam perkembangan kajian postmodernisme seperti film, komunikasi visual hingga media massa bisa dilihat dalam beberapa film dokumenter yang skripnya ditulis Said sendiri dengan judul “*In The Shadow of The West* (1985)”, serial film BBC “*Exiles: Edward Said* (1988)”, film dokumenter “*The Palestinians*” (1988) dibuat Said bersama Ibrahim Abu Lughod, hingga beberapa wawancara dan kuliah umumnya. Dalam beberapa film ini Said lagi-lagi mengurai beberapa stereotip Barat atas Arab-Islam sebagai representasi penghuni gurun yang beringas, berhidung bengkok, suka membunuh dan lainnya.

Salah satu stereotip yang muncul pada era peradaban Islam dan Arab (berada pada puncaknya sekitar abad 1000-1600 M) adalah

beberapa kisah imajinatif tentang wanita “Timur” yang eksotis. Ketika itu, Barat memandang Timur dekat atau kekuasaan peradaban Islam (Turki) sebagai suatu kemegahan dan ketinggian yang tak tercapai—dari gosip hingga mitos para pelancong Barat seperti Marcopolo dan lainnya, yang berhasil mengunjungi dunia timur--sehingga menyisakan beberapa mitos tentang kehidupan para Sultan yang dikelilingi oleh selir tanpa busana seperti cover buku Orientalisme versi bahasa Inggris.

EKSOTIS

Eksotis dalam Cambridge Dictionary diartikan sebagai *unusual and exciting because of coming (or seeming to come) from far away*. Sedangkan dalam Oxford Dictionary diartikan sebagai *originating in or characteristic of a distant foreign country*. Kedua kamus tersebut memiliki kesamaan arti bahwa eksotis adalah *sesuatu yang ada diluar sana*. Pengertian ini serupa dengan cara pandang para orientalis yang memandang Timur sebagai bahan kajian *Other* atau ‘yang lain.’ Julia Kuehn (2016, April 5) dalam artikelnya yang berjudul *Exotism in 19th Century Literature* menunjukkan bahwa pada abad ke 19, eksotisme merupakan bentuk ketertarikan politik dan akademik Barat terhadap literature fiksi Arab seperti kisah *One Thousand and One Night*, *Sinbad The Sailor*, *Ali Baba*, *Aladdin* dan lainnya.

Menurut Victor Sigalen (2002) yang dikutip oleh Julia Kuehn (2013, 1-2) istilah eksotisme seringkali dikacaukan dengan istilah geografis “tropis”. Ia mengklarifikasi bahwa eksotis *cannot be about such things as the tropics or coconut trees*. Namun dalam kamus (*Cambridge Dictionary*, 2016), eksotisme memiliki arti yang sama dengan eksotis, dengan penambahan khusus *especially a tropical country*. Pergeseran makna eksotisme dari kisah fiksi Arab menuju keindahan negara tropis atau wilayah pohon-pohon kelapa merupakan bagian imajinatif dari *frame* Ideologi Kolonialisme (Kuehn, 2013, 3). Hal ini disebabkan oleh prospek kolonialisme Barat yang semakin berfokus pada wilayah Asia-Timur, Indochina dan Indonesia. Eksotisme sebagai *hal asing yang*

jauh nun di sana bergeser pada wilayah geografi yang *tropis*.

Secara geografis, wilayah tropis yang dimaksud sebagian besar adalah wilayah Asia. Karena Asia sebagai wilayah geografis mencakup pula sebuah representasi Barat tentang Timur. Bila dilacak lebih lanjut, genealogi anasir-anasir para orientalis ketika memandang Timur bermula dari pandangan Barat terhadap beberapa wilayah “di luar dirinya” seperti Aeschylus yang memandang Persia seperti disebutkan sebelumnya (Said, 2010, :2).

Batas-batas wilayah geografis amat kental dengan perkembangan politik, hal ini memisahkan beberapa simbolisasi “Timur yang eksotis” yang selama ini diasosiasikan sebagai “Arab”. Jadi, Arab—dalam pandangan para orientalis—berada pada tataran simbol kemunduran *Timur* yang terus tercipta dalam beragam karya literatur Barat untuk merepresentasikan Timur Tengah (Said, 2010: 498 & 502), sedangkan eksotis dicopot begitu saja dari dunia Arab dan Islam, kemudian dilekatkan pada wilayah Asia lainnya. Persoalan ini beriringan dengan prospek kolonialisasi Barat yang mulai memberikan fokus lebih besar terhadap timur jauh (Asia Timur), Indochina dan Indonesia.

Batas-batas tersebut memang berada dalam kenyataan yang tidak stabil. Meskipun terdapat penilaian objektif bahwa semua manusia pada dasarnya sama tanpa perbedaan rasial tersebut, namun persoalannya, stereotip eksotisme, yang merupakan salah satu prinsip orientalisme—tetap terjadi. Yakni ketika Barat menganggap Asia sebagai wilayah eksotis (Larson, 2006, 70; Lee & Zhou, 2004, 254).

Pandangan imajinatif eksotis tentang Asia berkembang, tidak hanya melingkupi bentang alam *tropis*, namun menyasar pada penduduknya. Stereotip ini semakin berkembang subur dengan munculnya beragam media visual “imajinatif” Barat yang terus menggelorakan semangat militan bahwa penduduk Asia eksotis. Pada awalnya eksotis bermakna *asing*, namun kemudian menjadi suatu nilai estetis (keindahan) tersendiri. Hal tersebut membuat eksotis merasuk ke dalam ranah-ranah estetis sebagai sebuah sifat yang khusus, yang ciri-cirinya dapat

dikenali. Salah tafsir yang terus dipupuk melalui tradisi yang tetap dipertahankan seperti itu merupakan nadi orientalisme. Representasi tersebut terakumulasi semakin buruk tatkala, eksotis dipakai untuk memberikan gambaran tentang wanita Asia. Gambaran tersebut adalah sebuah citra visual yang terus diproduksi terus-menerus melalui beragam media.

Secara tidak langsung, produksi visual imajinatif tentang wanita Asia terus dipertahankan oleh panggung besar imajinasi Digital Barat melalui Film Hollywood, situs kencan, situs porno, dan iklan. Tentu saja, perkembangan teknologi fotografi, sinematografi, dan internet dapat melacak bagaimana wanita Asia sebagai sebuah imajinasi digital terus diproduksi. Orientalisme dipakai penulis untuk menganalisis beragam distorsi yang hidup dalam panggung imajinasi Barat tersebut, yang tertuang dalam beragam media; film Hollywood, situs kencan, situs porno hingga iklan yang merepresentasikan wanita Asia.

GLOBALISASI DAN PANGGUNG IMAJINASI DIGITAL BARAT

Panggung theater imajinasi digital (termasuk Hollywood) mengacu pada beragam visual yang dihadirkan oleh produk teknologi informasi barat—yang menyajikan wanita Asia kepada khalayak publik. Perkembangan industri Hollywood dan era digital yang ditandai munculnya *World Wide Web* atau disingkat *www* menjadi ruang baru untuk mengkaji bagaimana stereotip-stereotip yang muncul terhadap wanita Asia. Atau dengan kata lain, merupakan suatu studi yang belum dilakukan Said ke wilayah-wilayah tersebut. Sebagai sebuah panggung imajinatif, Hollywood berumur lebih tua dan sudah menghasilkan beragam stereotip terhadap ‘Asia’ secara umum dan wanita Asia secara khusus.

Imajinasi digital merupakan istilah yang dipakai oleh penulis untuk menunjukkan bahwa keempat media yang dikaji—film Hollywood, situs kencan, situs porno dan iklan—memproduksi daya imajinasi hingga narasi-narasi eksotis. Terdapat perbedaan genealogi antara perkembangan teknologi

film Hollywood, situs kencan dan situs porno serta iklan. Film Hollywood hadir melalui sejarah perkembangan fotografi hingga kamera dengan gambar bergerak. Situs kencan dan situs porno hadir melalui perkembangan internet. Sedangkan iklan dimulai sejak perkembangan industri cetak (sebagai sebuah pesan komersial, iklan sudah muncul di Cina sejak era *Dinasti Song* (Hong Cheng, 2009, 26) sekitar abad ke 8). Seiring perkembangan jaman, iklan tidak lagi memanfaatkan industri cetak seperti koran, majalah, famplet, dan lainnya. Kini iklan dapat dinikmati di televisi, media sosial, media *online*, dan hampir seluruh *website* komersial—termasuk situs kencan dan situs porno, menjadikan iklan sebagai cara mengambil keuntungan dari popularitas situs tersebut.

Seiring perkembangan teknologi dan komputerisasi, film Hollywood yang pada awalnya hanya dapat dinikmati melalui layar lebar atau bioskop, kini dapat ditonton melalui internet. Keberadaan *YouTube* sebagai *website* penyimpanan video terbesar, diisi pula dengan beberapa film Hollywood yang sudah kadaluarsa atau tidak tayang kembali di bioskop. Maka, film Hollywood yang pada awalnya menjadikan ruang layar lebar atau bioskop sebagai ruang konsumsi tunggal, kini film Hollywood masuk ke dalam dunia digital, menjadi bagian dari dunia internet. Film Hollywood, situs kencan, situs porno, dan iklan merupakan representasi imajinasi digital Barat, yang mewakili hasrat, selera, narasi peradaban tersebut terhadap sesuatu di luar dirinya atau *other*.

HOLLYWOOD

Hollywood adalah tempat lahir bagi studio film, yang berperan sangat penting bagi citra masyarakat Amerika Serikat di hadapan publik. Studio film yang paling awal dan paling berpengaruh adalah *Warner Brothers Picture* (pertama kali membuka studio 1918), *Paramount* (termasuk lima studio film tertua didunia bersama *Universal Studio*, terbentuk tahun 1912), *RKO*, *Metro Goldwin Meyer*, dan *20th Century Fox* yang memiliki rumah produksi sendiri. *Universal Studio*, *United* dan *Columbia Pictures* juga dianggap penting meskipun tidak

memiliki bioskop sendiri. Sementara Disney, Monogram dan Republik dianggap sebagai generasi ketiga rumah produksi di Hollywood (*History Cooperative*, 2014).

Sebagai sebuah representasi kultural, Hollywood menghasilkan beragam karya film yang menunjukkan bagaimana cara pandang masyarakat Amerika Serikat atau masyarakat Barat terhadap ragam kultural di luar dirinya atau *other*. Termasuk cara pandang Hollywood melihat masyarakat Asia secara umum dan wanita Asia secara khusus. Film paling tua tentang peran karakter seorang *Asia* adalah film *Charlie Chan* yang dirilis pada tahun 1926. Namun, baru mencapai kesuksesan pada tahun 1931 ketika diperankan oleh actor Swedia, Warner Oland (Lepore, Agustus 9, 2010). Karakter “*Asia*” (Charlie Chan) justru malah diperankan oleh aktor Barat, Oland (kulit putih). Hal ini semakin parah, bahwa setahun kemudian pada tahun 1932, tokoh Cho-cho San diperankan oleh Sylvia Sidney dalam film berjudul *Madam Butterfly* (1932). Kondisi tersebut sempat dipertanyakan Keith Chow (*Newyorktimes*, 22 April 2016) dalam opininya dengan judul “*Why Won't Hollywood Cast Asian Actor?*”

Stereotip terhadap aktor Asia merupakan kenyataan yang ‘stabil’ dan konsisten terus terjadi dalam industri film Hollywood. Chow memulai dengan film *Doctor Strange* yang diadaptasi dari komik Marvel dan diproduksi oleh Disney dan Marvel studio, yang menyajikan tokoh laki-laki mistis *Tibetian* (orang Tibet) yang diperankan oleh Tilda Swinton (aktor kulit putih/Barat). Selanjutnya rumah produksi *DreamWorks* dan *Paramount* memberikan peran *Cyborg Motoko Kusanagi* yang diadaptasi dari anime klasik Jepang “*Ghost in The Shell*” kepada Scarlett Johansson (aktor kulit putih/Barat).

Deretan orang kulit putih yang memainkan peran “Asia” tetap terjadi, Emma Stone memerankan karakter *China-hawaii* yang bernama Allison Ng, terus berlanjut hingga film *Gods of Egypt* dan *Exodus: God and King* yang didominasi oleh pemeran kaukasian (kulit putih)— ketika memainkan peran *Egyptian* (orang Mesir). Hal ini bukan tidak disadari, namun sudah menjadi argumentasi umum

orang-orang Hollywood melalui apriori sinis, menyatakan bahwa para bintang aktor Asia “*is because not any of them have a box office track record.*” Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan keluhan Aaron Sorkin—seorang penulis skrip film—dalam email yang bocor kepada kepala studio film, ia mengaku bahwa sangat sulit mengadaptasi film *Flash Boys* (2014) karena *tidak ada satupun aktor bintang Asia* (*Newyorktimes*, 22 April 2016).

Pengakuan tersebut membuktikan bahwa berbagai alasan diskriminasi rasial yang ada dalam industri Hollywood bukan berasal dari fakta lapangan, namun berasal dari stereotip, yang tidak mampu melihat dengan jernih kemampuan seni peran dalam seorang aktor tanpa mempertimbangkan asal rasialnya, termasuk aktor Asia. Alasan lain yang sering diulang-ulang adalah argumen bila memakai aktor kulit putih/Kaukasian atau Barat lebih memberikan keuntungan finansial. Hal ini sudah dibantah dengan munculnya film *Fast Furious*, yang sampai episode ketujuhnya meraup hampir 4 miliar dollar dari seluruh dunia. Faktanya, dalam sebuah studi terbaru Ralph J. Bunche, *Center for African American Studies at University of California and Los Angeles* yang berjudul “*2015 Hollywood Diversity Report: Flipping The Script*” (Hunt & Ramon, 2015) menemukan bahwa film dengan keberagaman ras (seperti aktor dalam film *Fast and Furious*) tidak hanya menjadi yang tertinggi di *box office* (Cunningham, 25 Februari 2016), namun menyebabkan hasil yang sangat tinggi untuk investasi bagi studio dan produser.

Persoalan tersebut tidak hanya muncul pada praktik pemilihan pemain atau *cast* dalam sebuah film. Dalam ajang penyelenggaraan penghargaan nominasi aktor dan film terbaik Piala Oscar atau *Academy Award*, diskriminasi rasial tersebut tetap terjadi. Piala Oscar pertama kali diselenggarakan pada tahun 1929 di *Hotel Hollywood Roosevelt* oleh *Academy of Motion Picture Arts and Sciences* (AMPAS). Ajang penghargaan tersebut secara produktif telah berhasil memberikan penghargaan sebanyak 2.947 kali. Usia ajang penghargaan ini mencapai 87 tahun.

Bulan Januari 2016, tepat ulang tahun Piala Oscar ke 87, David Cox menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir hanya terdapat Sembilan aktor nominasi Piala Oscar *non-white* (diluar kulit putih). Peristiwa ini menimbulkan polemik, protes hingga tindakan boikot dikalangan artis hingga politikus. Protes dilayangkan David Oyelowo, Lupita Nyong’O, George Clooney, Reese Whitherspoon hingga Barack Obama (Cox, 26 Februari 2016). Puncaknya adalah ramainya *hashtag #OscarSoWhite*. Di instagram pemakaiannya mencapai 3.849 *public post* dan sempat menjadi viral di twitter. Kantor berita *Huffpost* bahkan merilis “*57 Facts That Prove The Oscar Are (And Have Always Been) So White*” yang menyajikan beberapa fakta menarik, termasuk tentang wanita Asia. Dalam 87 tahun perjalanan penyelenggaraan Piala Oscar, aktor dan artis Asia hanya dua kali memenangkan Piala Oscar dalam 15 kali nominasi. Bahkan satu-satunya aktor (wanita) Asia yang berhasil masuk dalam nominasi *Academy Awards* adalah Merle Oberon, dan tidak pernah ada satu pun aktor Asia yang berhasil memenangkan kategori *best artist* (Moreno, 27 Februari 2016).

Zak Keith (2013) dalam artikelnya yang berjudul “*Hollywood Asian Stereotypes: Unfair and Pernicious Portrayals of East Asians*” menyajikan stereotip dan karakter kontradiktif yang dikenakan pada orang Asia di Hollywood. Stereotip ini muncul, tentu saja berawal dari gagasan rasis. Bahwa orang Asia—sebagaimana modus operandi orientalisme bekerja—*ditampilkan sebagaimana Barat memahaminya*, bahkan untuk menunjukkan sebetapa *Asia-nya* orang Asia, perlu didikte oleh pemahaman orang-orang Barat. Proses ini terjadi dalam situasi ketika orang-orang Asia, Latin atau Afrika menjadi penduduk minoritas di Barat. Beragam perilaku orang Asia di tanah Barat, yang berperilaku layaknya minoritas, yang terpatronase oleh nilai-nilai serta aturan hukum di sana, menjadikan ekspatriat Asia sebagai manusia yang inferior. Akibatnya, tampilan Asia tampak menjadi lebih rendah dan penuh ejekan.

Beberapa stereotip tentang orang Asia dalam industri Hollywood dirangkum Keith dalam “*Top Ten Asian Stereotypes in Hollywood and The Media Used Almost Exclusively*”.

Pertama, orang Asia *perpetual foreign* (orang asing abadi). *Kedua*, *martial arts* (lekat dengan seni bela diri). *Ketiga*, *models minority* (sebuah model minoritas). *Keempat*, *nerd/geek* (kutu buku). *Kelima*, *gendered racism* (rasisme gender). *Keenam*, *inferior and subordinate* (rendah dan bawahan). *Ketujuh*, *mystic* (misterius). *Kedelapan*, *arcvillain, dragon lady or yellow peril* (penjahat, wanita naga atau bahaya kuning). *Kesembilan*, *caricature, yellow face bizarre and or unfathomable* (karikatur, wajah kuning aneh dan atau tak terduga). *Kesepuluh*, *willing/deserving targets of open denigration* (bersedia atau layak difitnah terbuka). Kesepuluh poin ini hadir dalam 452 film dan acara TV sejak tahun 1919 hingga 2016.

Wanita Asia secara khusus, mendapatkan beberapa stereotip dari poin pertama (orang asing abadi), kelima (rasisme gender) dan kedelapan (dragon lady). Kesemua poin ini terangkum dalam istilah eksotis. Film eksotis pertama disandur dari sebuah pentas teater yang berjudul *Madame Butterfly* berasal dari cerita pendek yang dikarang oleh John Luther Long pada tahun 1898. Film ini berkisah tentang percintaan antara calon Geisha dan seorang pria warga Amerika Serikat bernama Lieutenant Barton (diperankan oleh Charles Ruggles).

Distorsi semacam ini, hadir melalui Lucy Liu dalam film *Ally McBeal* (1997) dan *Charlie's Angel* (2000). Wanita Asia disajikan dalam bentuk ketertarikan seksual kepada laki-laki berkulit putih (Kaukasian) dan selalu saja berpasangan dengan laki-laki berkulit putih. Tentu saja dengan menyiratkan bahwa hubungan ini bersifat penaklukan dan dominasi terhadap wanita Asia. Bahkan dalam beberapa tampilan imajinatif, wanita Asia diasosiasikan lebih tertarik terhadap laki-laki berkulit putih ketimbang laki-laki Asia (*Asian male*), meski laki-laki berkulit putih tersebut telah menyakiti hatinya seperti dalam film *The World of Suzie Wong* (Keith, 2013). Gambaran imajinatif terhadap wanita Asia yang dihasilkan oleh Hollywood menentukan peningkatan faktor *interested* (ketertarikan) pria terhadap wanita Asia.

SITUS KENCAN

Dailymail merilis penelitian—yang datanya—berasal dari *Facebook Dating App* (aplikasi kencan *facebook*) bernama *Are You Interested* (AYI) tentang persoalan rasial dalam hubungan romantika (percintaan). Penelitian tersebut mengkaji 24 juta hubungan heteroseksual (pria kepada wanita dan wanita kepada pria). Melalui kategori rasial pria dan wanita yang berkulit putih, hitam, Asia, dan Latin. Studi tersebut menemukan bahwa banyak wanita berkulit putih, Asia, Latin lebih tertarik terhadap pria berkulit putih. Sedangkan kebanyakan pria berkulit hitam, putih, dan latin lebih tertarik terhadap wanita Asia. Hasil lainnya, pria Asia cenderung lebih tertarik terhadap wanita Latin. Penelitian tersebut menunjukkan satu hal yang penting bahwa hampir kebanyakan pria berbagai ras tersebut lebih tertarik terhadap wanita Asia (*Dailymail*, 21 November 2013).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para pemakai aplikasi tersebut memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap sosok wanita Asia. Sosok tersebut bukan keadaan riil di lapangan, namun sebuah hasil perangkat imajinatif yang terus diproduksi, sebagaimana selera pasar. Bagaimana pun, situs kencan merupakan bagian dari sebuah industri informasi digital. Di dalamnya, citra visual yang hadir untuk mendorong hasrat selera para pengguna aplikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memilih pasangannya. Permintaan yang meningkat atas wanita Asia dalam situs kencan tersebut tidak searah dengan keberhasilan menjalin hubungan tanpa tendensi "*wanita Asia eksotis*". Beberapa wanita Asia yang pernah menggunakan situs kencan ini mengeluh akan '*terlalu besarnya fantasi seksual dan rasisme gender*' terhadapnya. Laporan ini sempat ditulis Chelsea Hawkins dalam artikel yang berjudul "*We Need To Talk About the Big Problem with Online Dating for Asian Women*" di laman *mic.com*. Beberapa testimoni wanita Asia yang sempat dirangkum adalah:

"i've tried online dating ... before permanently deleting my account after receiving little more than creepy (and sometimes downright revolting) messages"

"I've received my fair share of doozies, including questions about my personal hygiene because of my race... (as well as) questions about what i do in the bedroom or about my body parts."

"I didn't feel safe on these sites. I felt really exposed. Especially as an Asian women, you put your picture up there and suddenly like 'Asian fantasy' would come up" (Hawkins, 7 Januari 2015)

Imajinasi digital atas wanita Asia terus diproduksi tanpa henti sampai menyentuh ruang-ruang fantasi yang bentuknya sudah tidak nyata. Sehingga wanita Asia dipaksa untuk meng'eksotis-kan dirinya di hadapan publik digital. Artinya, wanita Asia yang bahkan sudah teridentifikasi dengan ciri-ciri eksotis, tetap mengalami ketidaksempurnaan permanen sebagai wanita Asia. Sebab sifat dari imajinasi digital 'terakumulatif' dan 'menggandakan' sifat idealnya. Sebagai contoh, hadirnya K-Pop sebagai budaya pop baru yang menjadi sorotan dunia—bahkan dunia barat, membuat wanita "Korea" menjadi primadona baru di situs kencan Asia. Hal ini disampaikan oleh Lena (bukan nama asli), seorang wanita *Cambodian-American* (campuran Kamboja-Amerika) yang tetap dipandang 'kurang Asia', hanya karena ia tidak mengaku *orang Korea*. Ia menyatakan "*i felt unwanted of unattractive because i wasn't really a Korean Girl*" (Hawkins, 7 Januari 2015).

Hal ini membuat wanita Asia tidak dapat menampilkan 'dirinya' sebagaimana adanya secara individual ataupun kultural, karena beberapa stereotip tentang wanita Asia merupakan gambaran imajinatif yang tidak nyata—wanita Korea tidak pernah ada mengingat giatnya *trend* operasi plastik wajah di sana (*CBS News*, 28 September 2015). Namun, sebagai cara menampilkan diri di hadapan dunia digital, situs kencan mengarahkan wanita Asia pada stereotip-stereotip tersebut. Eksotisme sebagai sesuatu yang asing, menjelma menjadi 'wanita Asia seharusnya'.

PORNOGRAFI WANITA ASIA

Karen Eng menyatakan bahwa, "*The Fantasy Asian is Intelligent yet pliable,*

mysterious yet ornamental ... perpetually pre-pubescent—ageless dan petite ... she comes from a culture where women traditionally serve men" (Sharp, 3 Maret 2010). Eksotisme sudah melebarkan arti inherennya pada objek 'wanita Asia' sebagai wanita yang masih menjunjung tinggi nilai budaya tradisional *wanita melayani pria*. Fantasi semacam ini hadir dalam beberapa media komunikasi yang mengukuhkan keberadaan imajinasi digital tentang wanita Asia 'seharusnya'. Wanita Asia sebagai tampilan visual, sebagai imajinasi digital dan sebagai sebuah kebertubuhan yang memuat polemik panjang tentang cara pandang—dunia pria atau maskulin—melihat wanita secara luas merupakan perdebatan yang hadir dalam wacana pornografi.

Andrea Dworkin (Syarifah, 2003, 24) menyatakan bahwa pornografi, sesuai dengan akar katanya; *porne* (pelacur kelas rendah) dan *grafos/grafis* (gambaran)—adalah gambaran dan kegiatan seksual yang dilakukan oleh para *porne* atau pelacur kelas rendah. Pengertian pornografi meluas dengan sendirinya seiring dengan perkembangan budaya manusia memahami bagaimana perempuan dan tubuhnya 'harus' ditampilkan. Syarifah menunjukkan bahwa filsuf Barat sejak Plato, Rousseau, Schopenhauer, hingga Sastre memiliki bias-bias maskulinitas dalam pemikirannya (Syarifah, 2003, 107-18).

Kemunculan Simon de Beauvoir sebagai eksponen feminis Barat pada tahun 1960an--bersama Sastre dan Michael Foucault (Said, 2000, 42-3) --mencoba melakukan dekonstruksi terhadap sejarah filsafat Barat, bahwa selama itu, apa yang dihasilkan peradaban Barat—manusia universal, objektif, bebas nilai, kekal—hanyalah sebuah perspektif maskulin. Apa yang dimaksud manusia dengan *man* adalah cara pandang yang memandang manusia ideal, bahwa manusia yang dimaksud itu laki-laki. Eksploitasi berlebihan terhadap 'tampilan visual wanita' merupakan suatu diskriminasi *gender*, bahwa wanita diartikan sebagai bagian dari alam, bahwa fungsi produksinya yang menghasilkan manusia-manusia (melahirkan), dan organ tubuhnya yang dianggap tidak lengkap karena tidak memiliki penis (Jacques Lacan menyebutnya dengan istilah *Phalus*), menyebabkan wanita dalam pornografi,

kurang lebih, layak dieksploitasi seperti manusia mengeksploitasi alam; mengeruk, mengambil sesuatu darinya, ‘menampilkannya’ sesuai hasrat manusia, untuk kepuasan. Berita buruknya, bahwa eksploitasi terbesar dalam ‘pornografi’ bukan tubuh laki-laki, namun kebertubuhan wanita.

Melalui pengertian tersebut, pornografi menjadi sebuah dunia hasrat seksual. Sejarah manusia mengukir bagaimana representasi erotis di masa Paleolitikum, manusia memahat batu dan kayu menjadi buah dada besar dan wanita hamil. Kemudian pada era Yunani Kuno, sudah terdapat patung-patung telanjang laki-laki dan wanita secara khusus. Pada abad ke-2, di India sudah terdapat buku panduan seksual yang bernama *Kamasutra*—kajian pornografi kekinian menyebutnya sebagai *pornoteks*. Di Jepang pada era Morumachi (1336-1573) dikenal seni lukis yang menggambarkan hubungan seksual melalui media kayu/kertas, dinamakan *Shunga*. Tentu saja diberbagai belahan dunia lainnya, pornografi sebagai ekspresi seksual hadir melalui beragam media.

Pornografi kemudian memanfaatkan teknologi video. Pada tahun 1896 di Perancis dibuat film erotis pertama berjudul *Le Choucher De La Mariee* (1896) yang diproduksi oleh Eugene Pirou. Melalui hubungan perdagangan internasional dan tersebarnya teknokultural Barat, tersebarnya film Hollywood pada era “*American Dreams*” pada era 1970an, dan hadirnya internet di berbagai belahan dunia mempercepat konsumsi video porno. Beberapa studi tentang konsumsi video porno menunjukkan hal tersebut.

Pertama, setiap detik, 307.564 dollar dibelanjakan untuk konsumsi pornografi. *Kedua*, laman website pornografi terbesar dihasilkan oleh negara Amerika Serikat (Barat) dengan total 244.661.900 laman, disusul Jerman, UK, Australia, posisi kelima ditempati Jepang dan seterusnya. Keterangan tersebut searah dengan fakta bahwa rumah produksi pornografi terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS) dengan beberapa situs porno *kawakan* seperti *vivid entertainment*, *Hustler*, *Playboy*, *Wicked picture*, *Red Light District* (*Family Safe Media*, 2006).

Semua situs porno tersebut memuat laman “Asian women” sebagai salah satu andalan produk video pornonya. Di luar itu, sebuah iklan situs pornografi merilis situs pornografi wanita Asia terbaik mulai dari *Asian Porn.com*, *Tube8 Asian.com*, *Asianxhamster.com*, *Japanesehotporn.com*, *erito.com*, *AsianEporner.com* hingga *iYoTube.com* (Gotblop, 2016).

Thuy Linh Tu dalam *Asian America. Net: Ethnicity, Nationalism, and Cyberspace* menyebutkan bahwa salah satu fenomena kesuksesan *the online adult industry* adalah dengan menghadirkan tubuh (wanita) Asia. Melalui bisnis multi-miliar dollar tersebut, situs porno wanita Asia berperan dari 25 – 30 persen dari fenomena kesuksesan tersebut. Fenomena ini terkait pula dengan eksekutif ideologi kapitalisme hingga komodifikasi dan seksualitas tentang tubuh yang rasis. Ia menyebutkan (Lee & Wong, 2003, 267-8):

“On Pornographic sites, the bodies, as real as it can be, is in fact what is being offered; its gender and race are not only legible, but the main draw. What it sells is not just flesh—digital or “real”—but much more precisely the underlying histories and myth that such Bodies invoke. Asian porn sites trade on long standing (certainly predigital) and relatively unimaginative assumption about Asian women; that they are **exotic** and hold limitless sexual knowledge, yet docile and eager to please. Hardly a Product of the web alone, they product reflect, recycle, and make easily available those fantasies already existing in the social world.”

Internet merupakan media bagi pornografi untuk menjadikannya bisnis yang besar dan menguntungkan—terutama video porno, di dalamnya wanita Asia merupakan salah satu *page* (laman) paling dicari. Beberapa karakteristik yang dicari tidak jauh berbeda dengan imajinasi eksotis yang hadir dalam ‘film Hollywood’ dan situs kencan’, bahwa wanita Asia sebagaimana warna kulitnya yang cokelat atau kadang kuning, sikapnya yang ‘*menyenangkan dalam hal pelayanan*’, wanita Asia sebatas seksualitas (Lee & Wong, 2003:271), yang gambaran tersebut diciptakan melalui imajinasi bahwa wanita Asia eksotis.

Pada umumnya, peran-peran aktor film porno menonjolkan kebertubuhan seksual yang tabu seperti payudara, alat kelamin (vagina dan penis) yang menjadi anggapan umum sebagai pusat seksualitas manusia. Ketika memasuki industri film pornografi, para aktor tersebut harus memberikan kualitas tambahan terhadap produk-produk pornografinya. Beberapa aktor wanita Asia yang memasuki industri pornografi menunjukkan kualitas eksotisnya. *Complex.com* merilis 50 bintang porno wanita Asia terpanas, dengan karakter eksotisnya masing-masing. Mimi Miyagi (Jepang) dikenal memainkan peran eksotis *Oriental Dolls*. Tie bersaudara; Hayle Le & Baylee Le (Vietnam) pada urutan 46 dikenal atas beberapa peran eksotis “Mystic”. Mai Lin dan Asia Carrera sering memainkan peran eksotis “Dragon Lady”. Tia Tanaka, Nautica Thorn dan Charmane Star sering mendapatkan peran *Yellow Peril* atau *Yellow Fever* (Gabriel Alvarez, 2011, September 19). Identifikasi *Oriental Dolls*, *Mystic*, *Dragon Lady* dan *Yellow Peril* atau *Yellow Fever* merupakan bagian dari wilayah imajinatif eksotisme wanita Asia dalam pornografi.

IKLAN

Citra yang kasat mata tentang wanita Asia hadir pula dalam beberapa media masa di Barat termasuk iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan didefinisikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan; iklan dapat pula berarti pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang dan jasa yang dijual, dipasang di dalam media masa seperti surat kabar dan majalah (KBBI, 2 September 2016). Definisi ini terkait sejarah panjang industrialisasi di Eropa/Barat, mengenai ekspansi dagang hingga promosi yang dilakukan oleh kapitalisme. Orientalisme yang diungkapkan oleh Said, menunjukkan dengan jelas, bagaimana kepentingan Barat yang tersalurkan melalui ekspansi ekonomi kapitalisme dan kolonialisme, serta corong pembicaraannya yang paling halus; iklan.

Sebagai perangkat *marketing* dari industri, iklan bertanggung jawab atas sekian

tendensi eksotis terhadap ‘wanita Asia’. Jenn, Seorang aktivis feminis mengungkapkan beberapa tindakan rasis sebuah iklan maskapai Airfrance dan penampilan *oriental* panggung penyanyi papan atas AS, Ketty Pery (Jenn, 17 April 2014). Bukan kebetulan bila Jenn, menulis bahwa iklan maskapai Airfrance memiliki akses orientalisme, yang membuat wanita Asia sekedar sebuah objek. Sebagai gambaran, iklan maskapai *Airfrance* berupa perempuan dengan *make up* oriental (putih, sipit, dan alis yang panjang) memakai kepala *barongsai*. Model tersebut menyiratkan beberapa stereotip terhadap wanita Asia yang sudah disebutkan; misterius, berkulit kuning, ‘asing’—semua ciri-ciri tersebut merupakan *signified* (Saussure, 1988, 145-150) bahwa wanita Asia adalah eksotis.

Di sisi lain, penampilan Katy Perry yang menggunakan busana *geisha*, (busana wanita penghibur tradisional papan atas Jepang) dalam suatu pertunjukan musiknya, merupakan suatu bentuk teatrikal atas ‘identitas Asia’ melalui panggung imajinatif yang dimiliki Barat. Secara teknis, ‘geisha/wanita Asia’ ditampilkan oleh melalui koreografer, ahli busana dan tata rias yang bekerja dalam ‘produk konser Barat’. Identitas wanita Asia tersebut dirampas hak ‘representasi dirinya’ oleh suatu sebuah mesin pertunjukan yang dikuasai Barat.

Sebuah artikel yang berjudul “*Asian Americans Face New Stereotype in Ads*” menyebutkan beberapa iklan televisi hingga internet yang memuat beberapa stereotip wanita Asia. Salah satu stereotip tentang wanita Asia adalah sebuah adegan iklan perusahaan IBM (Fahri, 23 Agustus, 2011). Kim Bartel Sheehan dalam buku *Controversies in Contemporary Advertising* menunjukkan hal yang sama terkait benih-benih orientalisme dalam dunia periklanan. Ia memberikan contoh, bagaimana sebuah iklan *Velux Skylight* yang ingin menunjukkan sisi eksotis wanita Asia (Sheehan, 2004, 124); bahwa seorang wanita Asia nampak *dragon lady* (misterius) atau *china doll* (boneka porselen). Melalui cara pandang tersebut, maka dapat dipertunjukkan barisan tampilan visual iklan lainnya yang mengandung tendensi bahwa *wanita Asia eksotis*.

Gambaran iklan wanita Asia eksotis dengan karakter “*Martial Arts*” pernah dilakukan aktor wanita Asia Zhang Ziyi untuk iklan produk susu berjudul *Goat Milk?* Pada foto majalah tersebut, Zhang Ziyi memakai kimono sutera sedang memperagakan gerakan seni bela diri memukul botol berisi susu. Wilson bahkan menambahkan bahwa Perusahaan Laundry sebuah keluarga Cina memanfaatkan stereotip eksotis *misterius* dengan menambahkan kata “*Ancient Chinese Laundry Secret*” untuk menarik konsumennya. Iklan sebuah maskapai bahkan menambahkan keterangan “*would be under the care of the Singapore Girls*” sebagai bagian dari nilai lebih pelayanannya. Dunia periklanan tidak berupaya untuk menghapus sifat rasial terhadap Wanita Asia, justru memanfaatkan dan mempromosikan eksotisme wanita Asia secara eksploitatif. Ciri-ciri fisik model wanita Asia seperti bertubuh kecil, bermata gelap, rambut dengan poni dan rok dengan belahan telah menjadi prasyarat komersil industri periklanan. Salah satu contoh pentingnya ciri-ciri wanita Asia eksotis tersebut perlu diterapkan dalam dunia periklanan adalah kegagalan seorang model Leslie Kawai pada tahun 1981 dalam “*Tournamen of Roses Queen*” yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bir. Ia diberitahu agar memotong rambutnya supaya memiliki poni, ketika menolak, perusahaan tersebut memilih model lain yang memiliki poni (Wilson., et al 1995, 149-150).

PENUTUP

Ketika mengadakan survei secara cepat, *google* adalah pilihan paling tepat untuk mencari objek kata yang dicari. Untuk penelusuran kata kunci “Asian Women”, *google* menyuguhkan 41.500.000 temuan untuk kata tersebut dengan kecepatan 0.79 detik (*Asian Women*, 29 Agustus 2016). Untuk “related searches” atau kata kunci terkait, terdapat kata kunci *Asian women spa*, *Asian women facts*, *Asian women for Marriage*, *Asian women dating*, *Asian women porn* dan lainnya.

Pasangan kata ‘wanita Asia’ seperti ‘seksual, spa, marriage, dating, porn,’ merupakan fakta digital tentang aktivitas *user* internet ketika menggali informasi atau dalam cara pandang

ekonomi yang kasar—mengkonsumsi visualisasi digital wanita Asia. Teknologi komunikasi yang seharusnya mampu menghapus bias-bias identitas wanita Asia, malah memproduksi, merayakan hingga mempromosikan identitas eksotis. Kecenderungan melihat wanita Asia sekedar tubuh yang rasis dan imajinasi yang eksotis, hidup subur di dunia digital. Persoalan ini adalah bentuk-bentuk baru kolonialisme di dunia pascamodern.

Kajian tentang pascakolonial dan orientalisme tidak bermaksud untuk merayakan ancaman kuno tentang dominasi Barat atas Timur. Pembacaan tersebut tidak hanya mengaburkan upaya-upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak untuk berbudaya, yang sudah berjalan seperti kritik atas modernitas, kritik atas kapitalisme dan kolonialisme, kajian tentang politik identitas dan kajian interaksi budaya yang sering dilakukan oleh sarjana-sarjana Barat maupun sarjana Timur. Temuan tentang beragam distorsi terhadap wanita Asia dalam imajinasi digital; film Hollywood, situs kencan, situs porno hingga iklan merupakan upaya pencegahan, agar benih-benih orientalis tidak hidup kembali melalui media teknologi baru.

Wanita Asia dalam Imajinasi Digital menemukan bahwa dalam panggung imajinasi digital Barat terdapat bias orientalisme yang berbentuk eksotisme. Industri film Hollywood yang merupakan bentuk ekspresi kultural Barat berubah menjadi agen penyebar ide-ide rasial hingga supremasi kulit putih tentang ragam budaya ‘di luar dirinya’. Wanita Asia dalam industri Hollywood tidak memiliki kuasa atas panggung budayanya sendiri. Sulitnya wanita Asia mendapatkan peran sebagai wanita Asia merupakan bukti bahwa terdapat monopoli atas representasi sebagai wanita Asia. Beragam peran wanita Asia justru banyak dimainkan oleh artis non Asia atau kulit putih. Rentetan film sejak *Madam Butterfly* (1932) hingga *Ghost in The Shell* (2016) menunjukkan bagaimana peran wanita Asia justru diperankan oleh aktor kulit putih. Di sisi lain, gambaran wanita Asia dalam industri film Hollywood dipenuhi stereotip bahwa mereka eksotis dengan ciri-ciri kemampuan bela diri, memiliki ketertarikan pada pria kulit putih,

memiliki sifat yang misterius, aneh dan penurut dalam pelayanan seksual. Hak representasi diri telah dirampas oleh rangkaian imajinatif tersebut sehingga wanita Asia perlu di-Asia-kan sesuai dengan stereotip yang berlaku di Hollywood.

Gambaran wanita Asia eksotis tersebut berpengaruh pada ketertarikan pria secara global lintas rasial. Beberapa temuan menunjukkan bagaimana rangkaian imajinatif tersebut berpengaruh pada ketertarikan terhadap wanita Asia. Situs kencan dari *AreYouInterest.com* hingga *AsianWomenDating.com* mencoba memenuhi dan menyajikan wanita Asia kepada publik digital malah menuai banyak persoalan. Situs kencan membuat wanita Asia yang memiliki akun tersebut menerima beragam pelecehan seksual dan beragam kekerasan komunikatif ketika pria *user* pencari wanita Asia memaksakan “wanita Asia eksotis yang imajinatif” terhadap wanita Asia yang nyata.

Melalui industri Pornografi, gambaran wanita Asia eksotis semakin dilebih-lebihkan. Wanita Asia dalam Pornografi dilekatkan pada peran-peran eksotis dengan perilaku seksualnya yang misterius dan bisa diperlakukan sebagai boneka seks hingga anggapan bahwa wanita Asia memiliki pelayanan seksual khusus terhadap pria kulit putih. Hal ini menutup kemungkinan bahwa wanita Asia bukan sekedar objek seksualitas. Kenyataan tersebut berlaku pula pada citra wanita Asia dalam industri periklanan. Gambaran wanita Asia eksotis seperti misterius, tanpa ekspresi seperti boneka dan memiliki keahlian bela diri merupakan identitas yang terus diproduksi industri periklanan.

Wanita Asia, perlu dipandang tanpa distorsi-distorsi identitas, yang menjebakannya dalam representasi eksotis. Panggung imajinasi digital Barat seperti Hollywood, situs kencan, pornografi dan iklan membuat wanita Asia terus direpresentasikan dan merepresentasikan dirinya dihadapan publik digital. Representasi eksotis memaksa mereka selalu berlomba-lomba mengejar gambaran imajinatif tersebut. Orientalisme Edward Said membantu kajian tentang Wanita Asia untuk mengungkapkan bagaimana panggung Imajinasi Digital Barat membangun representasi atas wanita Asia

eksotis. Namun, Said tidak berjalan lebih jauh untuk melihat bagaimana respon wanita-wanita Asia sendiri terhadap bangunan imajinatif tersebut.

Panggung Imajinasi Digital Barat tidak murni dikuasai oleh Barat. Panggung tersebut diciptakan oleh Barat, namun tidak dipungkiri melalui transfer teknologi dan pengetahuan serta bebasnya arus investasi, representasi bahwa wanita Asia eksotis menjadi suatu potensi komersil yang dieksploitasi semua pihak, Barat ataupun Timur dan Asia atau Non-Asia. Seperti Hollywood yang menciptakan sistem kompetisi rasial dan diskriminasi *gender* terhadap Wanita Asia, situs kencan yang menciptakan hubungan tendensi eksotis terhadap wanita Asia, industri pornografi yang memaksa wanita Asia eksotis sekedar seksualitas hingga iklan yang mempertahankan identifikasi eksotis terhadap wanita Asia, hal tersebut merupakan bukti betapa sulitnya melepaskan identitas eksotis terhadap wanita Asia. Pengungkapan tentang eksotisme yang memiliki kecenderungan imajinatif terhadap wanita Asia searah dengan kepentingan untuk meruntuhkan mitos terhadap wanita Asia. Kepentingan ini sekurang-kurangnya membuat kajian tentang wanita Asia dalam imajinasi digital, yang terus dipaksa untuk terus ‘dieksotiskan’, agar keluar dan meraih kesempatan-kesempatan eksistensialnya sebagai wanita penghuni bumi.

Sejarah manusia adalah sejarah pria dan wanita. Upaya untuk membuka tabir ‘eksotisme’ wanita Asia dalam imajinasi digital merupakan upaya untuk memberi kesempatan eksistensial kepada wanita Asia untuk hidup sebagai wanita tanpa bayang-bayang *other*. Manusia memerlukan wadah eksistensial tanpa distorsi hingga stereotip, yang pernah dialami ‘Timur’. Belajar dari sejarah orientalisme yang kelam, perangkat imajinasi digital (Hollywood, situs kencan, pornografi, dan iklan) perlu mempertimbangkan bahwa identitas eksotisme yang menjangkit wanita Asia—melalui imajinasi digital—hanyalah sebuah mitos dalam selubung kapitalisme global.

PUSTAKA ACUAN

- Alvarez, G. (2011, September 9). *The top 50 hottest Asian porn stars of all time*. Complex.com. Retrieved from [http://www.complex.com/pop-culture/the-top-50-hottest-asian-porn-stars-of-all-time/](http://www.complex.com/pop-culture/the-top-50-hottest-asian-porn-stars-of-all-time/Cheng, Hong. (2009). Advertising and Chinese society: impacts and issues. Copenhagen: Business School Press DK.</p><p>Alvarez, G. (2011, September 9). <i>The top 50 hottest Asian porn stars of all time</i>. Complex.com. Retrieved from <a href=) Adm. (2016).
- Chow, K. (2016, April 22). "Why won't hollywood cast Asian actor?" Newyorktimes. Retrieved from http://www.nytimes.com/2016/04/23/opinion/why-wont-hollywood-cast-asian-actors.html?_r=0.
- Cunningham, T. (2016, February 25). "Movies with diverse casts make more money, study finds" TheWarp. Retrieved from <http://www.thewrap.com/movies-with-diverse-casts-make-more-money-study-finds/>.
- Farhi, P. (2011, August 23). "Asian Americans face new stereotype in ads". The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/asian-americans-face-new-stereotype-in-ads/2011/08/11/gIQAiMzvZJ_story.html.
- Hawking, C. (2015, January 7). "We need to talk about the big problem with online dating for Asian women". Mic.com. Retrieved from <http://m.mic.com/articles/107840/we-need-to-talk-about-the-big-problem-with-online-dating-for-asian-women#yFatRJrg9>.
- Hidayat, M.A. (2002). *Menggugat modernisme: mengenali rentang pemikiran Jean Baudrillard*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hunt, D. & Ramon, A.C. (2015). *Hollywood diversity report: flipping the script*. UCLA: Ralph J Bunche Center for African American Studies.
- Kuehn, J. (2014). *A female poetics of empire: from Elliot to Woolf*. New York: Routledge.
- Kuehn, J. (2015, April 5). *Exotism in 19th century literature*. British. Library.UK Retrieved from <https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/exoticism-in-19th-century-literature>.
- Kuehn, J. (2015, April 5) *Exotism in 19th century literature*. British. Library.UK Retrieved from <https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/exoticism-in-19th-century-literature>.
- Larson, G. (2006). *Media and minorities: the politic of race in news and entertainment*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Lee, R. C & Wong, S. C. (2003). *Asian America.Net: ethnicity, nationalism, cyberspace*. New York: Routledge.
- Lee, J. & Zhou, M. (2004). *Asian American youth: culture, identity, ethnicity*. New York: Routledge.
- Melani, B. (Ed.). (2008). *Membaca sastra (pengantar memahami sastra untuk perguruan tinggi)*. Magelang: Indonesia Tera.
- McCormick, R. (2016, July 12). *Fox is Making an X-Men TV Series with Movie Director Bryan Singer*. The Verge.com. Retrieved from <http://www.theverge.com/2016/7/12/12169342/fox-x-men-tv-series-bryan-singer>.
- Moreno, C. (Ed). (27 February 2016). "57 facts that prove the oscar are (and have always been) so white". USA: Huffingtonpost. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/entry/57-striking-facts-that-prove-the-oscars-are-and-have-been-so-white_us_56d12baee4b0bf0dab324790.
- Reappropriate. (2014, April 17). *What is Orientalisme and how is it also racism?* Reappropriate.com. Retrieved from <http://reappropriate.co/2014/04/what-is-orientalism-and-how-is-it-also-racism/>.
- Said, W. (2000, Juni 1). *Diary*. London Review of Books. Vol 22 No.11. Retrieved from <http://www.lrb.co.uk/v22/n11/edward-said/diary>.
- Said, W. (2010). *Orientalisme: menggugat hegemoni Barat dan mendudukan Timur sebagai subjek* (Penj. Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, W. (2012). *Dunia, teks dan (sang) kritikus* (Penj. Sunaryono Basuki Ks). Bali: Bali Media Adhikarsa.
- Schole, J. A. (December, 2002). *What is globalization? the definition issue—again*. CSGR Working Paper No. 109/02.
- Sharp, G. (3 Maret 2010). "The submissive Asian stereotyoe: classy Asian ladies dating site". The Society Pages. Retrieved from <http://thesocietypages.org/socimages/2010/03/03/the-submissive-asian-stereotype-classy-asian-ladies-dating-site/>.
- Sheehan, K. B. (2004). *Controversies in contemporary advertising*. London: Sage Publications.
- Syarifah. (2003). *Kebertubuhan perempuan dalam pornografi*. Jakarta: Kotakita.

Film

Alladin (1992). Directed by Ron Clements & John Musker. Produced by Walt Disney Feature Animation. Release by Walt Disney Picture.

Ally McBeal (1997). Comedy-Drama TV Series. Created by David E Kelley. Produced by Kayla Alpert et al., Production by 20th Century Fox Television. Distributed by 20th Television.

Charlie's Angel (2000) Directed by McG. Produced by Ridley Schott, Drew & Nancy. Production Company by Flowers Film & Tall Trees. Distributed by Columbia Pictures.

Doctor Strange (2016). Directed by Schott Derrickson. Based on Steve Ditko. Produced by Kevin Feige. Production Company Marvel Studios. Distributed by Walt Disney Studios & Motions Picture.

Exiles: Edward Said (1988). TV Movie with Edward Said. Directed by Christopher Skyes. Production by BBC Two.

Exodus: God and King (2014) Directed by Alex Proyas. Produced by Peter Chernin etc all. Production Company by Chernin Entertainment, Schott Free Productions, Babieka, Volcano Films & TSG Entertainment. Distributed by 20th Century Fox.

Flash Boys (2014). Directed by Rudin. Written by Michael Lewis. Produced by Elly Bush & Scott Rudin. Production Company by Sony Pictures.

Fast Furious (2001-2017). Directed by Rob Cohen at all. Produced by Neal H Moritz, Van Diesel et al., Production Company by Original Film, Relativity Media, One Race Films & Media Right Capital Distributed by Universal Pictures.

Gods of Egypt (2016). Directed by Alex Proyas. Produced by Basil Iwanyk & Proyas. Production Company by Tunder Road Pictures & Mystery Clock Cinema. Distributed by Summit Entertainment.

Gosh in the Shell (2017). Directed by Rupert Sanders. Produced by Avi Arad & Steven Paul. Written by Jonathan Herman & Jamie Moss. Production Company by DreamWorks Picture, Grosvenor Park Production &. Distributed by Universal Pictures.

In The Shadow of The West (1985). Documentary film. Directed by Geoff Dunlop. Written and Narated by Edward Said. Produced by A VATV Production In Association with Kufic Films B.V.

Le Choucher De La Mariee (1896). Directed by Albert Kirchner. Produced Eugene Pirou. Distributed by Pseudonym.

Madam Butterfly (1932). Directed by Marion Gering. Written by David Belasco etc all. Produced by B.P. Schullberg. Distributed by Paramount Pictures.

Pearl Harbour (2001). Directed by Michael Bay. Produced by Tuchstone Picture & Jerry Bruckheimer Films. Distributed by Walt Disney Studios Motion Picture.

The Palestinians (1988). Two-part historical Television documentary prepared and presented by Edward Said and Ibrahim Abu Lughod. Directed by David Edgars. Produced by Taylor Downing. *The Palestinians* was a commissioned by Channel 4.

The World of Suzie Wong (1960). Directed by Richard Quine. Produced by Ray Stark. Written by John Patrick & Paul Osborn. Production Company by MGM British Media. Distributed by Universal Pictures.

Situs kencan online

AreYouInterested.com, AsianDating.com, Match.com, AsianWomenDate.com, FilipinoCupid.com, Blossom.com, ThaiFriendly.com, ChnLove.com, JapanCupid.com, IDateAsian.com, KoreaCupid.com.

Video Porno

Vivid entertainment, Hustler, Playboy, Wicked picture, Red Light District, Uporn.com.

EFEK KEBIJAKAN SATU ANAK TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DI TIONGKOK: SEBUAH IRONI^{1,2}

Wabilia Husnah

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: wabilia_husnah@yahoo.com

Diterima: 11-11-2016

Direvisi: 2-12-2016

Disetujui: 7-12-2016

ABSTRACT

In the Chinese tradition that is influenced by the Confucianism, women are seen to have lower positions than men. In such a social system, the One-Child policy initiated by Deng Xiaoping since 1979 as a program to control the population, underpin the inferiority perception upon Chinese women. This article aims analyze the effects of the China's One Child Policy towards Chinese women's lives. It is important to understand how Chinese Women live after their lives have been affected by this Policy, in a good or a bad way. The results show that One Child Policy has negative impacts on Chinese women's lives. It does not only lead to discrimination views againts women, but also indirectly violate a Chinese woman's social, cultural and economic rights. Criminal cases overshadow the Chinese women, ranging from torture, neglect of children, abortion, illegal adoption, human trafficking, kidnapping, and even prostitution. On the other hand, all criminal cases makes women become "rare " and "special" objects in China. Ironically, the scarcity of women in China actually cause the higher bargaining power of women. Now in their lives, Chinese women can go to school, work, choosing a spouse, or even file for divorce. Women's social status in Chinese society has increased now. It means that women also obtain the positive impact of One-Child Policy.

Keywords: *women, confucianism, the one child policy.*

ABSTRAK

Dalam tradisi Tiongkok yang dipengaruhi oleh Konfusianisme, perempuan selalu memiliki posisi lebih rendah daripada laki-laki. Dalam sistem sosial seperti ini, Kebijakan Satu Anak yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping sejak 1979 sebagai program untuk mengontrol populasi, turut mendukung inferioritas wanita Tiongkok. Artikel ini mencoba menganalisis efek Kebijakan Satu Anak di Tiongkok kepada kehidupan perempuan. Sangat penting untuk memahami bagaimana perempuan Tiongkok menjalani hidupnya pascakehidupannya telah dipengaruhi oleh kebijakan ini, dengan cara yang baik maupun yang buruk. Artikel ini berkesimpulan bahwa Kebijakan Satu Anak memiliki dampak negatif dalam kehidupan perempuan. Kebijakan ini tidak hanya menyebabkan pandangan diskriminatif terhadap perempuan, namun juga secara tidak langsung melanggar hak asasi dalam kehidupan sosial, kultural, dan ekonomi perempuan Tiongkok. Kasus kriminal pun membayangi perempuan Tiongkok, mulai dari penyiksaan, pengabaian anak perempuan, aborsi, adopsi ilegal, penjualan manusia, penculikan, bahkan prostitusi. Di lain pihak, semua kasus kriminal ini telah membuat perempuan menjadi objek yang "langka" dan "spesial" di Tiongkok. Ironisnya, kelangkaan perempuan di Tiongkok menyebabkan nilai tawar perempuan menjadi lebih tinggi. Sekarang, dalam kehidupan mereka, perempuan Cina bisa pergi ke sekolah, bekerja, memilih pasangan hidup, bahkan menuntut cerai. Status sosial perempuan dalam masyarakat Tiongkok pun sudah meningkat sekarang. Ini berarti, perempuan Tiongkok juga telah mendapatkan efek positif dari Kebijakan Satu Anak.

Kata kunci: perempuan, konfusianisme, kebijakan satu anak.

¹ Terimakasih kepada Dr. Cahyo Pamungkas, yang telah memberi masukan-masukan untuk perbaikan artikel ini.

² Tulisan ini telah dipresentasikan dalam *The First International Conference of Social Science*, 18 Oktober 2016

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari 30 tahun Kebijakan Satu Anak diimplementasikan di Tiongkok, hingga akhirnya resmi berakhir pada 1 Januari 2016. Kebijakan ini dipercaya telah berhasil mengatur populasi Tiongkok. Namun demikian, dibalik kesuksesannya, kebijakan ini masih menuai berbagai kritik dari para pemerhati perempuan. Selama tiga dasawarsa diterapkan di Tiongkok, Kebijakan Satu Anak dianggap menimbulkan berbagai permasalahan sosial, terutama bagi perempuan. Dampak negatif kebijakan tersebut terhadap perempuan telah banyak dikaji oleh para ahli (lihat Settles, Sheng, Zang dan Zhao, 2013; Hardee, Xie dan Gu, 2004; dan Zhu, 2013). Settles, dkk. (2013), misalnya, menyebutkan bahwa Kebijakan Satu Anak dikritik secara internasional karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM), seperti sterilisasi paksa, dan aborsi, serta pengabaian bayi perempuan. Sementara, Zhu (2013) mempertegas bahwa Kebijakan Satu Anak telah menyebabkan relasi antara reproduksi dan hak azasi manusia mengarah pada ketidakbebasan dalam menentukan jumlah keluarga.

Kedua penelitian tersebut secara kritis menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh perempuan setelah Kebijakan Satu Anak diterapkan. Sayangnya, penelitian yang mengulas dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan dari dua sisi, positif dan negatif, masih jarang ditemukan. Padahal, seperti mata uang yang memiliki dua sisi, setiap kebijakan tentu saja memiliki sisi positif dan negatif. Mengetahui dampak kebijakan dari kedua sisi akan membantu objektivitas dalam menilai implikasi kebijakan tersebut terhadap perempuan Tiongkok. Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak positif dan negatif dari kebijakan ini terhadap perempuan dan mendeskripsikan kondisi perempuan Tiongkok setelah dipengaruhi oleh tiga dekade penerapan Kebijakan Satu Anak. Dengan menganalisis dampak positif dan negatif kebijakan ini, artikel ini akan memberikan gambaran yang utuh terhadap pengaruh kebijakan ini terhadap kehidupan perempuan Tiongkok secara lebih berimbang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan sudut pandang feminisme³. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dampak Kebijakan Satu Anak terhadap kehidupan perempuan Tiongkok dewasa ini. Analisis juga akan dikaitkan dengan posisi perempuan dalam kebudayaan Tiongkok, terutama terkait dengan Konfusianisme, sebagai sistem nilai, norma dan kepercayaan (*value systems, norms, and belief*) yang dianut oleh mayoritas masyarakat Tiongkok. Dalam konteks ini, penulis mengambil preposisi bahwa Konfusianisme mempengaruhi preferensi dan cara pandang terhadap perempuan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur, terkait dengan Kebijakan Satu Anak, Konfusianisme, serta kondisi perempuan Tiongkok tradisional dan saat ini.

KEBIJAKAN SATU ANAK DI TIONGKOK

Selama Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong pascarevolusi sosial, Mao percaya bahwa penduduk yang besar merupakan aset bagi negara. Semakin banyak penduduk, akan semakin banyak pula tenaga pekerja yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan proses industrialisasi. Menurut Mao, peningkatan populasi akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Oleh sebab itu, Mao mendorong setiap keluarga untuk memiliki keturunan sebanyak mungkin dan mencegah program keluarga berencana. Didukung oleh perbaikan layanan kesehatan, Tiongkok menghadapi ledakan kelahiran bayi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tingkat harapan hidup meningkat dari 35 tahun yang pada tahun 1949 menjadi 66 tahun pada tahun 1976. Populasi penduduk Tiongkok meningkat dari 540 juta pada tahun 1949 menjadi 940 pada tahun 1976. Pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok menjadi rumah bagi sepertiga penduduk dunia, yang menduduki hanya 7 persen dari tanah yang subur di dunia (Yuan, 2001).

³ Menurut Moeliono (1993), feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki dalam setiap sendi kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Keruntuhan Rezim Mao tahun 1978 ikut mempengaruhi kondisi populasi Tiongkok. Deng Xiaoping, yang naik menggantikan Mao, memfokuskan diri pada upaya peningkatan ekonomi Tiongkok. Deng melihat bahwa jumlah populasi Tiongkok sudah berlebihan. Tiongkok sering dihadapkan dengan bencana banjir dan kekeringan, sehingga menurut Deng, akan sangat sulit bagi negara tersebut untuk memberi makan penduduk yang sangat banyak. Berbeda dengan Rezim Mao, populasi yang berlebihan diyakini Deng menjadi batu sandungan bagi peningkatan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1979, Rezim Deng mulai memperkenalkan Kebijakan Satu Anak (计划生育政策; Jìhuà Shēngyù Zhèngcè) untuk mengendalikan jumlah populasi Tiongkok.

Kebijakan Satu Anak adalah satu jenis program keluarga berencana (*family planning*) yang bertujuan untuk mengontrol kelahiran anak dalam setiap keluarga. *Family Planning* atau Program Keluarga Berencana diperkenalkan tidak hanya oleh Tiongkok tetapi juga oleh beberapa negara di dunia, sebagai sarana untuk membatasi pertumbuhan penduduk negara mereka (*Institute for International Cooperation*, 2005). Tiongkok menjadi salah satu negara di dunia yang pertama menerapkan kebijakan ini. Setelah sebelumnya negara India menerapkan kebijakan ini pada tahun 1951, disusul oleh Pakistan, dan Korea (Joshi, 2011). Program Keluarga Berencana mulai resmi diimplementasikan di beberapa belahan dunia pascaperang dunia kedua. Setelah melewati masa-masa tidak menentu selama perang dunia kedua, banyak negara berkembang yang menyadari bahwa peningkatan penduduk yang cepat telah menimbulkan beberapa permasalahan: sumber daya yang terbatas, pembangun ekonomi menjadi terhambat, dan kemakmuran menjadi terganggu. Sehingga, banyak negara yang memutuskan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk mereka.⁴ Setiap negara menggunakan cara masing-masing dalam menerapkan kebijakan ini.

Berbicara mengenai pengimplementasiannya di Tiongkok, pemerintah negara tersebut

akan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah bagi keluarga yang menjalankan program ini. Di Shanghai, keluarga yang mengikuti program satu anak akan diberikan subsidi sebesar ¥5000 (kurang lebih Rp. 10.000.000) (Zhu, 2013). Keluarga yang memiliki anak tunggal juga akan diberikan kemudahan dalam pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, keluarga yang melanggar program tersebut (memiliki lebih dari satu anak) harus menanggung beberapa sanksi, seperti hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, registrasi tempat tinggal dan sertifikasi kelahiran. Tidak hanya itu, keluarga tersebut pun harus membayar sejumlah penalti. Di Beijing, penalti yang harus ditanggung karena memiliki anak kedua berkisar antara ¥5.000 - ¥50.000 (kurang lebih Rp. 10.000.000 - Rp 100.000.000), dan penalti karena memiliki anak ketiga berkisar antara ¥20.000 - ¥100.000 (kurang lebih Rp. 40.000.000 - Rp .200.000.000) (Zhu, 2013). Pemerintah mengawasi setiap keluarga dengan ketat, sehingga tidak mungkin ada keluarga yang bisa lepas dari peraturan ini.

Kebijakan Satu Anak di Tiongkok dipercaya telah berhasil mengatur angka kelahiran bayi di negara tersebut. Angka kelahiran yang sebelum kebijakan tersebut diterapkan berada pada angka 6 anak per wanita, turun drastis menjadi 1,6 anak per wanita (Poston & Li, 2009). Meskipun Kebijakan Satu Anak disinyalir telah sukses mengendalikan populasi di Tiongkok, akan tetapi kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan serius bagi perempuan. Dilatarbelakangi oleh perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Tiongkok, banyak orangtua memilih untuk memiliki anak laki-laki dibanding perempuan. Gender preferensi ini mempertegas diskriminasi sosial terhadap perempuan Tiongkok. Melihat permasalahan sosial tersebut, banyak pihak yang menyatakan ketidaksetujuan dan menyerukan penghentian kebijakan ini (Settles dkk., 2013 & Zhu, 2013). Setelah diterpa serangkaian kritik, pemerintah Tiongkok akhirnya mulai membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, dimulai dengan pendirian Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional pada Maret 2013. Kemudian, pada November

⁴ Banyak negara berkembang yang menerapkan *Family Planning*. Tercatat pada tahun 1960 terdapat 2 negara yang menggunakan kebijakan ini. Angka ini meningkat menjadi 74 negara pada tahun 1975 dan 115 pada 1996 (Cleland, 2006).

2013 Pemerintah Tiongkok memutuskan melonggarkan kebijakan ini. Setiap orangtua yang merupakan anak tunggal dipersilahkan untuk memiliki anak kedua. Kemudian, pada bulan Oktober 2015 pemerintah memutuskan untuk mengizinkan setiap pasangan suami istri memiliki anak kedua. Kebijakan baru ini mulai efektif diterapkan mulai 1 Januari 2016 (Feng, dkk., 2016). Meskipun telah dihapuskan, namun kebijakan yang sudah diterapkan lebih dari 30 tahun terakhir ini telah menimbulkan efek yang luar biasa bagi kehidupan perempuan Tiongkok.

EFEK NEGATIF KEBIJAKAN SATU ANAK BAGI KEHIDUPAN PEREMPUAN TIONGKOK

Kebijakan Satu Anak sebenarnya hanya berusaha untuk membatasi jumlah anak menjadi hanya satu orang. Namun, masalah muncul ketika gender memengaruhi setiap keluarga dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Di mata masyarakat China, nilai tawar laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mayoritas orangtua di Tiongkok cenderung lebih suka memiliki anak laki-laki, dan tidak mengharapkan lahirnya anak perempuan dalam keluarga mereka.

Dalam rangka memenuhi perintah Kebijakan Satu Anak, dan untuk memastikan bahwa impian mereka untuk memiliki anak laki-laki dapat tercapai, banyak orangtua yang membuang anak perempuan mereka. Para orangtua ingin memastikan, mereka masih memiliki ruang dan kesempatan untuk memiliki anak laki-laki. Meskipun Undang-Undang Pernikahan tahun 1980 dan Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa penelantaran anak adalah hal yang ilegal, namun hal tersebut menjadi aktivitas yang lumrah sejak Kebijakan Satu Anak diterapkan (Tiefenbrun & Edward, 2008). Tercatat, lebih dari 16.000 anak-anak terlantar dibawa ke Departemen Urusan Sipil di provinsi Hunan antara tahun 1986 dan 1990 (Johnson, 1996).

Melihat kenyataan bahwa terdapat banyak orangtua yang tega menelantarkan anak perempuannya, akhirnya pemerintah Tiongkok menyediakan 25 bangunan yang khusus

didirikan untuk menjadi tempat membuang anak (Pangabean, 2014). Pemerintah juga berencana untuk memperbanyak tempat pembuangan anak guna menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat pembuangan anak. Setelah seorang anak ditinggalkan di tempat ini, pengelola fasilitas ini diharuskan untuk mengeluarkan pengumuman untuk mencari orang tua si bayi. Bila hingga waktu yang telah ditentukan belum ada orang tua ataupun wali yang mengklaim, si bayi akan diadopsi oleh panti asuhan yang dikelola negara (Euan, 2014). Tidak sedikit orang tua yang memutuskan untuk meninggalkan anak mereka di tempat ini. Bahkan, satu tempat pembuangan anak yang berlokasi di Guangzhou, telah menerima 79 bayi dalam 15 hari pertama (BBC, 2014a).

Anak-anak perempuan Tiongkok yang dibuang oleh orang tua mereka, banyak yang kemudian diadopsi oleh keluarga lain, umumnya adalah keluarga dari luar negeri. Data menyebutkan bahwa adopsi legal di Tiongkok meningkat dari 2.900 pada 1992 menjadi 55.000 pada 2001 (*Ministry of Civil Affairs, 1992, 2001*).⁵ Tercatat, warga negara Amerika mengadopsi rata-rata 3.500 anak yang berasal dari Tiongkok setiap tahunnya. Dan, sebagian besar di antaranya berjenis kelamin perempuan (Settles, 2013). Angka di atas belum termasuk kasus adopsi yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah.

Kasus adopsi ilegal merupakan kasus yang banyak terjadi di Tiongkok.⁶ Bahkan, Tiongkok menjadi salah satu sumber utama adopsi ilegal internasional. Sejumlah orang tua memutuskan untuk memberikan anak perempuan mereka untuk diadopsi oleh keluarga lain di Tiongkok untuk dijadikan isteri bagi anak

⁵ Adopsi legal adalah adopsi melalui jalur resmi yang tercatat oleh pemerintah Tiongkok, dan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Adopsi tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut, orang yang ingin mengadopsi anak harus memenuhi persyaratan: (a) tidak memiliki anak, (b) mampu untuk memenuhi kebutuhan dan menyekolahkan anak yang diadopsi, (c) setidaknya berusia 35 tahun (Zhang, 2006).

⁶ Adopsi ilegal adalah adopsi yang tidak melalui mekanisme resmi, tidak tercatat oleh pemerintah Tiongkok, dan biasanya tidak mempedulikan persyaratan dalam Undang-Undang Adopsi tahun 1992. Adopsi ilegal biasanya dilakukan melalui kenalan, oknum-oknum yang tidak tercatat, atau bahkan melalui sindikat-sindikat penjualan atau penculikan anak.

mereka, tentu saja melalui jalur tidak resmi. Tidak sedikit pula orangtua yang memutuskan untuk menjual anak mereka kepada para pejabat lokal atau dipaksa untuk menyerahkan anak mereka oleh otoritas lokal (UNRIC, 2012; *Population Research Institute*, 2011). Kemudian, Kantor Keluarga Berencana setempat akan mengirim anak-anak tersebut ke panti asuhan lokal. Oknum-oknum dari kantor terkait akan mendapatkan paling tidak 1.000 renminbi per anak, dan kemudian panti asuhan akan mendapatkan 3.000 hingga 5.000 dolar untuk setiap anak yang diadopsi oleh orang tua angkat dari luar negeri (*Population Research Institute*, 2011). Menyadari tingginya angka kasus adopsi ilegal di negaranya, pemerintah Tiongkok memperketat aturan adopsi. Kini, hanya panti asuhan tertentu yang bisa menawarkan bayi dan anak-anak untuk diadopsi, dan ada registrasi khusus untuk orang tua angkat agar bisa diakui sebagai wali (UNRIC, 2012).

Banyak perempuan Tiongkok yang juga terpaksa memilih jalan aborsi. Aborsi di Tiongkok dipermudah dengan maraknya penggunaan teknologi ultrasonografi mulai akhir tahun 1980an. Teknologi ini membuka peluang bagi setiap calon ibu untuk mengetahui jenis kelamin anak yang dikandungnya: laki-laki atau perempuan. Bila diketahui anak yang dikandungnya berjenis kelamin perempuan, banyak orangtua yang kemudian memutuskan untuk mengaborsi sang janin. Aborsi juga dilakukan bila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika kehamilan kedua terjadi, sebagian besar orangtua akan memilih untuk melakukan aborsi dibandingkan harus membayar penalti karena melanggar peraturan pemerintah.

Sejak diterapkannya Kebijakan Satu Anak, aborsi mulai beranjak menjadi kegiatan yang 'lumrah' dilakukan. Hingga tahun 1953, aborsi hanya diperbolehkan demi menjaga kesehatan ibu maupun anaknya (Rigdon, 1996). Tapi, sejak 1957, aborsi diperbolehkan dengan permintaan perempuan dengan usia kandungan 1-10 minggu, dan setiap perempuan hanya diperbolehkan melakukan aborsi satu kali per tahun. Kemudian, pada 1979 Undang-undang Aborsi menerapkan batas usia kandungan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi secara

hukum adalah hingga 28 minggu kehamilan (*Department of Economic and Social Affairs*, 2001).

Angka praktik aborsi meningkat drastis setelah penerapan Kebijakan Satu Anak pada tahun 1979 (Hemminki, 2005). Data terbaru Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional Tiongkok mengungkapkan, terdapat 13.000.000 kasus aborsi di Tiongkok setiap tahun (Jiang, 2013). 55% dari keseluruhan jumlah perempuan di Tiongkok pernah melakukan aborsi. Yang lebih mengejutkan, dari 100.000 orang perempuan di Tiongkok berusia 20-an tahun, 27,3% di antaranya pernah melakukan aborsi (Ertelt, 2009). Secara tidak langsung, aborsi pun menjadi praktik 'nyaris-legal' di tengah penerapan Kebijakan Satu Anak.

Melihat buruknya efek Kebijakan Satu Anak terhadap perempuan, sebenarnya pemerintah Tiongkok telah berupaya membuat regulasi-regulasi demi menekan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan yang salah satu poinnya adalah melarang pembunuhan bayi perempuan. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Perempuan yang melarang pembunuhan bayi dan melarang diskriminasi terhadap perempuan yang memilih untuk merawat bayi perempuan mereka. Selain itu, Undang-undang Perawatan Kesehatan Ibu melarang penggunaan teknologi canggih, seperti alat ultrasonografi (USG), untuk melihat jenis kelamin janin. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi aborsi ketika diketahui bayi di dalam kandungan berjenis kelamin perempuan (BBC, 2014b).

Meskipun dengan undang-undang tersebut aktivitas menelantarkan anak, aborsi, atau menjual anak menjadi hal yang ilegal di Tiongkok, dan orangtua yang melakukan hal tersebut akan dikenakan denda, sanksi, dan harus menghadapi ancaman sterilisasi paksa, tetap saja praktik-praktik menyeramkan ini menjadi penyakit berbahaya yang menjangkiti masyarakat Tiongkok sejak Kebijakan Satu Anak diterapkan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketimpangan jumlah kelahiran anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Rata-rata perbandingan kelahiran anak laki-laki

dibandingkan dengan anak perempuan adalah 117:100. Pada 2012, jumlah laki-laki 40.000.000 lebih banyak daripada perempuan (Susan B. Anthony List, 2013). Para sosiolog mengatakan, bahwa pada tahun 2020, diperkirakan ada 30.000.000 lebih laki-laki yang tidak bisa menikah karena tidak ada cukup perempuan yang bisa mendampingi mereka (Yuan, 2001). Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena ‘menghilangnya perempuan’ di Tiongkok.

Berbagai kasus kriminal bermunculan sebagai imbas kelangkaan perempuan di Tiongkok, seperti perdagangan perempuan dan prostitusi (Zhu, 2013). Banyak perempuan yang dijual sebagai pengantin di wilayah pedesaan di Tiongkok. Berkurangnya jumlah perempuan di daerah pedesaan sebagai dampak aborsi dan banyaknya perempuan dari wilayah pedesaan yang pergi ke perkotaan untuk bekerja, membuat laki-laki di daerah pedesaan tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan calon mempelai perempuannya. Tidak ada cara lain, banyak laki-laki di pedesaan yang memutuskan untuk mencari istri lewat perdagangan perempuan. Dengan berkurangnya jumlah perempuan di Tiongkok, mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada keluarga perempuan untuk menikahi seorang perempuan memang semakin tinggi. Menikahi perempuan yang dibeli secara ‘ilegal’ seperti ini justru dianggap lebih murah, dibandingkan harus memberikan mahar (Tiefenbrun & Edward, 2008).

Selain itu, perempuan yang dijual ke tempat-tempat prostitusi pun tidak sedikit jumlahnya. Perempuan-perempuan miskin dari Tiongkok terpikat oleh pesona janji-janji palsu akan pekerjaan yang sah di luar negeri, namun malah dijual ke tempat-tempat bisnis prostitusi (Tiefenbrun & Edward, 2008). Tidak jarang, perempuan-perempuan yang dijual ke tempat-tempat prostitusi adalah para korban penculikan. Bagi perempuan korban penculikan yang dijual ke tempat prostitusi, masalah besar harus mereka hadapi bahkan setelah berhasil kembali ke rumah masing-masing. Mereka harus menghadapi diskriminasi dari keluarga mereka dan lingkungan sekitarnya (List, 2013). Mayoritas masyarakat Tiongkok masih menganggap perempuan merupakan harta milik suaminya.

Jika seorang perempuan telah ‘digunakan’ oleh orang lain yang bukan suaminya, perempuan tersebut sudah tidak memiliki nilai lagi. Menjadi korban penculikan, kemudian dijual dan dipaksa menjadi budak prostitusi, dianggap sebagai kesalahan yang diakibatkan oleh perempuan itu sendiri. Keluarga pun akan menganggap anak perempuan yang sudah menjadi korban prostitusi sebagai aib keluarga yang telah menyoreng muka mereka, meskipun hal tersebut dilakukan bukan atas kehendak perempuan tersebut.

MENGAPA EFEK NEGATIF BISA TERJADI?

Efek negatif dari Kebijakan Satu Anak terasa luar biasa berat bagi perempuan. Selama berpuluh-puluh tahun, kehidupan perempuan Tiongkok dipenuhi oleh berbagai tindakan diskriminatif yang membuat hari-hari mereka begitu menyedihkan. Kondisi ini, tidak terlepas dari tradisi masyarakat Tiongkok yang selalu memandang rendah perempuan, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme.

Konfusianisme dikembangkan oleh seorang filosof terkenal Tiongkok, Konfusius, sejak 2.500 tahun yang lalu. Ajaran ini mulai diadopsi sebagai ideologi pemerintah sejak 200 SM, pada masa Dinasti Han (Adler, 2011). Selama Dinasti Han, Konfusianisme mulai diperkenalkan dan diimplementasikan secara besar-besaran kepada masyarakat Tiongkok. Konfusianisme merupakan suatu filosofi yang mengajarkan sistem nilai, moral, dan etika yang baik dalam relasi sosial dan kemasyarakatan. Konfusianisme menitikberatkan pada hubungan manusia dengan manusia, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Konfusianisme, perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk dengan status dan strata sosial yang berbeda. Cara Konfusius memandang perempuan bisa terbaca dari empat konsep yang diajarkan dalam Konfusianisme, yaitu *Wulun*, *Yinyang*, *Zheng Ming* serta konsep tiga kepatuhan dan empat kebajikan (*Sancong Side*).

Pertama, konsep *Wū lùn* (五论). *Wū lùn* mengajarkan lima hubungan dalam kehidupan sosial, yakni hubungan antara atasan dan bawahan (君臣有义; *Jūnchén yǒu yì*); ayah dan

anak (父子有亲; Fùzǐ yǒu qīn); suami dan istri (夫妇有别; Fūfù yǒu bié); kakak dan adik (长幼有序; Zhǎng yòu yǒu xù) dan antar teman (朋友有信; Péngyǒu yǒu xìn). Dalam kelima hubungan tersebut, hanya terdapat satu bagian yang mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu hubungan antara suami dan istri. Dalam aturan ini, seorang istri secara tegas harus mengabdikan pada suami dan mengikuti apapun kemauan suami. Sementara, aturan yang lainnya mengatur hubungan sesama laki-laki. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih penting daripada perempuan, dan perempuan dalam tradisi Tiongkok hanya bertugas mengabdikan pada laki-laki.

Kedua, konsep Yīnyáng (阴阳) yang berasal dari kitab Yi jīng (易经). Kitab Yijing ditulis oleh Fu Xi pada dinasti Zhou Barat, 1046–771 SM. Kitab ini menjadi akar Konfusianisme. Dalam kitab Yijing dinyatakan bahwa dunia ini akan harmonis bila tercapai keharmonisan antara Yin dan Yang. Yin mewakili segala sesuatu yang mundur, pasif, gelap, bumi, bulan, malam, perempuan, air, lemah, susah, negatif, dan berada di belakang Yang. Sementara, Yang mewakili segala sesuatu yang aktif, terang, langit, siang, matahari, laki-laki, api, aksi, kuat, gembira, positif, dan berada di depan Yin. Berdasarkan konsep ini, perempuan dilambangkan dengan Yin, serta memiliki sifat yang lemah, pasif, susah, selalu berada di belakang laki-laki dan memiliki sifat buruk lainnya. Sementara itu, laki-laki dianggap sebagai makhluk kuat, aktif, gembira, selalu berada di depan perempuan dan memiliki sifat positif lainnya. Konsekuensinya, dapatlah disimpulkan bahwa dalam Konfusianisme, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki.

Ketiga, konsep Zhèngmíng (正名). Konsep Zheng Ming berisi ajaran agar manusia hidup sesuai dengan “status” dan “strata” sosial yang disandangnya. Contohnya, setiap perempuan diharuskan untuk menyadari statusnya sebagai seorang perempuan, dan bertindak sesuai dengan statusnya tersebut. Hal ini semakin mempertegas jurang pembatas dan stratifikasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada yang menyimpang, karena bila ada penyimpangan tidak akan ada keharmonisan (Chai & Chai, 1973).

Keempat, konsep tiga kepatuhan dan empat kebajikan (三从四德; Sāncóngsidé). Menurut Konfusianisme, konsepsi sosial ini harus dipenuhi oleh perempuan agar menjadi makhluk sosial yang ‘baik’. Tiga kepatuhan (三从; Sāncóng) yang harus dimiliki perempuan, yaitu: sebelum menikah, seorang perempuan harus tunduk pada ayahnya (古未嫁从父; Gǔ wèi jià cóng fù); setelah menikah, ia harus tunduk pada suaminya (既嫁从夫; Jì jià cóng fū); dan saat suami meninggal kelak, ia wajib tunduk pada anak laki-lakinya (夫死从子; Fū sǐ zòng zǐ). Sementara, empat kebajikan (四德; Sìdé), yaitu: seorang perempuan harus tahu dan dapat menempatkan diri (德; Dé); seorang perempuan tidak diperkenankan banyak bicara dan mempunyai banyak keinginan (言; Yán); seorang perempuan harus berkelakuan baik dan bersifat menerima (容; Róng) dan seorang perempuan harus rajin dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga (工; Gōng).

Dari konsep tiga kepatuhan dan empat kebijakan di atas, terlihat bahwa perempuan Tiongkok seumur hidupnya diharuskan untuk mengabdikan pada laki-laki. Sejak lahir, mereka diwajibkan mengabdikan pada ayahnya. Perempuan wajib mengikuti seluruh peraturan dan perintah yang dikeluarkan sang ayah, dan menyerahkan segala keputusan dalam hidupnya kepada beliau. Setelah menikah, perempuan yang ‘baik’ wajib untuk tunduk pada suaminya. Masyarakat Tiongkok tradisional mengenal ungkapan yang menyatakan bahwa: “jika seorang perempuan menikahi seekor ayam, dia harus tinggal dengan ayam. Jika ia menikahi seekor anjing, dia harus tunduk pada anjing” (嫁鸡随鸡嫁狗随狗; Jià jī suí jī jià gǒu suí gǒu). Setelah suaminya meninggal, perempuan wajib patuh kepada anak laki-laki yang dipilih menjadi kepala keluarga.

Sebaliknya, dalam Konfusianisme, anak laki-laki dianggap sangat penting. Hanya anak laki-laki yang bisa ‘berbakti’ (Xiào; 孝), karena hanya anak laki-laki yang bisa meneruskan marga keluarganya setelah menikah, merawat orangtuanya, dan melakukan upacara penyembahan terhadap leluhur. Dalam konteks budaya, pentingnya melahirkan anak laki-laki terlihat dari aksara 好 (Hǎo). Aksara ini terdiri dari dua unsur karakter, yakni 女 (Nǚ) yang

berarti perempuan dan 子 (Zi) yang berarti anak laki-laki. Hao memiliki makna baik, bagus, indah, setuju, dan berbagai kebaikan lainnya. Artinya, seorang perempuan dapat dikatakan 'baik' bila telah melahirkan anak laki-laki sebagai penerus marga suaminya.

Dalam masyarakat tradisional Tiongkok, perempuan pun harus menjalani sebuah praktik pembebatan kaki yang sangat menyakitkan sejak berusia lima tahun, agar dianggap sebagai perempuan yang cantik oleh kaum laki-laki. Praktik ini disebut Bāngtuǐ (绑腿), Jīnlíán (金莲), *footbinding*, atau *Golden Lotus*. Disinyalir, praktik pembalutan kaki ini merupakan salah satu cara kaum laki-laki untuk bisa mengontrol perempuan. Perempuan yang dibalut kakinya akan mengikat fisik mereka di rumah, untuk mengerjakan tugas utama mereka: mengurus urusan rumah tangga. Mereka tidak akan bisa bekerja di luar rumah, sehingga mereka akan memiliki ketergantungan secara ekonomi pada keluarganya. Dengan kondisi ini, perempuan hanya bisa menjadi objek seksual suaminya, dan memenuhi tuntutan suami untuk memperoleh anak laki-laki sebanyak mungkin (Whitefield, 2008).

Perempuan Tiongkok tradisional pun tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan bagi perempuan tradisional terbatas pada mengajarkan etika dan tradisi keluarga, dengan tujuan untuk mengajarkan bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik (Wong, 1995) Bahkan, ada sebuah anggapan yang menyatakan Nǚzǐ wú cái biàn shì dé; 女子无才便是德. Artinya, bagi perempuan, tidak adanya pengetahuan adalah suatu kemuliaan.

Rendahnya nilai perempuan dalam tradisi Tiongkok inilah yang menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, terutama bagi perempuan. Apalagi sejak Kebijakan Satu Anak diberlakukan di Tiongkok. Banyak orangtua yang karena merasa malu telah memiliki anak perempuan atau merasa terbebani atas keberadaan anak perempuan, memilih untuk membunuh darah dagingnya sendiri. Perempuan sering disiksa oleh orang tua atau suami karena mereka dianggap memiliki "nilai" yang rendah.

Selain itu, kasus penjualan dan pengabaian anak pun sering terjadi. Inferioritas perempuan dalam tradisi masyarakat Tiongkok ini, bisa disimpulkan menjadi penyebab perempuan mendapatkan efek negatif Kebijakan Satu Anak di Tiongkok.

EFEK POSITIF KEBIJAKAN SATU ANAK BAGI KEHIDUPAN PEREMPUAN TIONGKOK

Walaupun terdapat efek negatif yang diakibatkan oleh kebijakan ini, tidak dipungkiri, Kebijakan Satu Anak ini juga telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Terlebih di daerah perkotaan, di mana status anak perempuan hampir sama dengan laki-laki (Wen, 2014). Kebijakan Satu Anak telah membuka kesempatan perempuan di beberapa aspek, mulai dari pendidikan, pekerjaan, eksistensi di rumah, pernikahan, bahkan perceraian.

Dengan diimplementasikannya Kebijakan Satu Anak, setiap keluarga hanya memiliki satu kesempatan untuk memiliki anak. Satu-satunya anak yang dimiliki sebuah keluarga adalah satu-satunya kesempatan untuk memiliki anak yang dapat dibanggakan. Orang tua akan memusatkan seluruh perhatian mereka pada anak satu-satunya yang mereka miliki. Didukung oleh kondisi ekonomi Tiongkok yang meningkat pada sekitar tahun 1980-an, orang tua Tiongkok, terlebih di perkotaan, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak tunggal mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pendidikan bagi anak tunggal sangat penting, agar anak tersebut nantinya mampu menjamin orangtua mereka yang sudah tua, dan agar kedudukan keluarga mereka menjadi lebih baik (Dicker, 2014). Bila pada Konfusianisme perempuan hanya diperbolehkan untuk belajar mencuci dan memasak, anak perempuan tunggal yang terlahir pada masa Kebijakan Satu Anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Banyak orang tua yang mengarahkan anak perempuan mereka untuk mengambil ekstrakurikuler di sekolah, agar mendapatkan kemampuan dan pengalaman yang lebih baik. Tidak sedikit pula orang tua yang rela mengeluarkan uang lebih demi memanggil guru les pribadi ke rumah untuk membantu anak perempuan mereka belajar. Jika dulu perempuan

tidak diperkenankan mendapatkan pendidikan, kini para orangtua di Tiongkok terus mendorong anak perempuan mereka untuk bersekolah yang tinggi, bahkan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebelum kebijakan ini diterapkan, hanya 30% perempuan yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Angka ini meningkat menjadi 50% pada 1990-1992 (Ye, 2015). Hal tersebut melahirkan anak perempuan yang lebih berpendidikan, mandiri dan bebas.

Dalam kebudayaan tradisional, perempuan menjadi pihak yang bertugas untuk merawat anak dan keluarga suami. Mereka tidak berhak untuk bekerja di luar rumah. Setelah tahun 1978, kebijakan Reformasi Ekonomi yang dicanangkan Partai Komunis Tiongkok membuat perempuan bisa bekerja di luar rumah (Fung, 2014). Karena dibesarkan dalam lingkungan yang patriakat, perempuan terbentuk menjadi pribadi yang kuat dan pekerja keras. Perempuan siap untuk menerima gaji rendah, dan jarang ada perempuan yang mengeluh atas pekerjaan apapun yang mereka dapatkan. Ini membuat perempuan Tiongkok mudah diterima dalam pekerjaan. Terlebih, sejak kebijakan Satu Anak diterapkan, jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit. Ini membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan. Banyak perempuan di usia produktif kini berani pergi mencari kerja ke luar daerah asal mereka demi menafkahi orangtua. Selain itu, Kebijakan Satu Anak membuat tingkat kesuburan perempuan menjadi terbatas, sehingga mereka lebih leluasa untuk bekerja kembali karena tidak perlu menghabiskan waktu mereka untuk mengurus banyak anak. 72% ibu berusia 25-34 tahun dengan anak berusia di bawah 6 tahun kini memilih untuk bekerja lagi (*All-China Women's Federation & National Bureau of Statistics in China*, 2011). Disokong oleh peningkatan pendidikan yang diterima, kian hari perempuan Tiongkok bisa kian mudah mendapatkan pekerjaan. Bila pada 1940-an perempuan hanya menempati 7% total pekerja di Tiongkok (Lei, 1995), pada 1999 45,2% pekerja di Tiongkok adalah perempuan (*National Bureau of Statistics*, 2001). Tercatat, pada tahun 2011 terdapat 556.670.000 orang perempuan dan 690.980.000 orang laki-laki di China, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 764.000.000

orang. Dari jumlah itu, perempuan berjumlah 351.000.000 orang, atau sebesar 45,9% dari total tenaga kerja, sementara laki-laki yang bekerja mencapai 413.000.000, atau 54,1% dari total tenaga kerja (*National Bureau of Statistics of China*, 2012). Bahkan, tidak jarang perempuan memperoleh jabatan dan pendapatan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh *Grant Thornton International*, perempuan Tiongkok menempati 21% posisi penting di perusahaan-perusahaan di Tiongkok (He, 2014). Semangat perempuan dalam mencari penghasilan saat ini, mengindikasikan perubahan status perempuan menjadi tulang punggung keluarga.

Kombinasi antara penurunan angka kelahiran akibat Kebijakan Satu Anak, serta peningkatan ekonomi dan standar hidup setiap penduduk Tiongkok menciptakan kondisi *Ageing Society* (Settles, dkk. 2013). Menurut PBB, sebuah masyarakat dikatakan menua (*Ageing Society*) jika rasio penduduk lansia (65 tahun ke atas) mencapai 7% dari total populasi (Setyaningsih, 2011). Saat ini penduduk lansia di Tiongkok mencapai 13,3% dari total penduduknya. Yang berarti, Tiongkok menghadapi kenyataan pahit: jumlah lansia yang banyak, sementara jumlah anak yang bisa merawat orang tua sangat terbatas. Maka, peran lain yang dimiliki oleh perempuan sejak diterbitkannya Kebijakan Satu Anak adalah merawat orangtua. Pada kebudayaan tradisional Tiongkok, anak perempuan hanya diwajibkan untuk merawat mertua dan keluarga pihak suami, sementara keluarganya sendiri dirawat oleh istri-istri dari saudara laki-laki mereka. Tapi, sejak berkurangnya angka kelahiran anak akibat Kebijakan Satu Anak, anak-anak perempuan tunggal mulai banyak yang membantu mengurus orang tua kandung mereka juga, selain juga mengurus mertua mereka. Di kota-kota besar, lebih banyak pasangan muda yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan orangtua istri, atau paling tidak tinggal di dekat rumah orang tua istri. Setiap anak memiliki tanggungjawab ganda, merawat orangtua kandung dan mertua mereka. Hal ini mengindikasikan eksistensi anak perempuan di dalam keluarganya sendiri. Bila dulu perempuan yang sudah menikah hanya disuruh untuk merawat orangtua suami, kini

mereka bisa memiliki pengaruh di dalam keluarga kandung mereka.

‘Menghilangnya’ perempuan dari Tiongkok, menjadi beban tersendiri bagi laki-laki. Laki-laki tidak hanya sulit mencari pasangan hidup, tapi juga sulit memenuhi tuntutan calon pasangan hidup mereka (Fung, 2014). Dewasa ini, perempuan Tiongkok semakin realistis dan selektif dalam memilih pasangan hidup. Laki-laki yang ideal bagi perempuan Tiongkok saat ini adalah yang memiliki empat hal yang dikenal dengan sebutan *sān zǐ yī běn* (三子一本), yakni rumah (房子; Fángzi), mobil (车子; Chēzi), uang (票子; Piàozi) dan pendidikan (学历本; Xuélì běn) (Xu, 2014). Meskipun di satu sisi hal ini membuat perempuan Tiongkok sulit untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriterianya, namun di sisi lain, kondisi ini mengindikasikan peningkatan ‘nilai jual’ perempuan di mata laki-laki. Bila dulu perempuan hanya bisa menerima perjodohan yang telah diatur oleh ayah mereka, kini perempuan bisa menentukan dengan siapa dan orang seperti apa mereka akan menikah. Sebagai contoh, beberapa dekade lalu di Beijing, orang tua akan mengirimkan informasi mengenai anak perempuan mereka ke “mak comblang” (pencari jodoh), kemudian para laki-laki bujang dan orang tua mereka memilih perempuan yang tepat dari beberapa kandidat yang ada. Sementara saat ini, di Jade Lake Park Beijing, para laki-laki bujang mempersiapkan data diri mereka dan memajangnya di dinding. Perempuan-perempuan lajang datang ke tempat tersebut untuk melihat-lihat dan mencatat laki-laki mana yang bisa mereka hubungi (Poston, 2013).

Pada masyarakat Tiongkok tradisional, para ayah akan menjodohkan anak perempuan mereka sedini mungkin. Tidak jarang, anak-anak perempuan usia di bawah 10 tahun sudah dinikahkan. Hal ini dilakukan, karena anak perempuan dianggap sebagai beban bagi keluarga. Semakin cepat anak perempuan tersebut dinikahkan maka akan semakin baik untuk keluarga. Namun sejak Kebijakan Satu Anak diterapkan, perempuan mendapatkan haknya untuk mengembangkan karir dan pendidikan. Perempuan semakin lama semakin mandiri dan bebas untuk menentukan pilihan.

Sensus menyebutkan bahwa satu dari lima orang perempuan berusia 25-29 tahun di Tiongkok masih lajang (Magistad, 2013). Bahkan, di Beijing sendiri, pada 2010 terdapat 500.000 perempuan di atas 30 tahun yang belum menikah (Li, 2010). Fenomena ini kemudian disebut “*leftover women*”, atau “*sheng nu*” (剩女), merujuk pada perempuan di usia akhir 20-an hingga 30-an, dengan pendapatan yang tinggi dan karir yang stabil yang masih melajang (Wang, dkk., 2015). Mereka juga biasa disebut *3S Women*, kependekan dari “*Single, Seventies*” (karena sebagian besar dari mereka lahir pada tahun 70-an), dan *Stuck*” (Schott, 2010).

Ketika akhirnya menikah, para perempuan yang sudah sukses ini pun telah memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada suami. Tentu saja, kenyataan ini berpengaruh pada status mereka di rumah. Bila dulu laki-laki berperan sebagai pusat dari sebuah keluarga, kini perempuan sudah bekerja dan memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri, sekaligus bisa menjadi pengatur keuangan di rumah. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 7.700 responden dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh sebuah portal website Tiongkok, *Qq.com*, 59,55% responden menyatakan istri mengatur keuangan rumah tangga, 14,5% menyatakan yang mengatur adalah suami, dan 25,95% menyatakan istri dan suami mengatur uang mereka secara terpisah (Wang, 2013). Perempuan juga memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai segala bentuk pengambilan keputusan di rumah tentang berbagai hal, mulai dari barang-barang belanjaan, hingga pendidikan, pekerjaan, dan pasangan hidup untuk anak mereka (Sheng, 2004). Hal ini mengindikasikan perempuan telah menduduki posisi penting dalam keluarga.

Dari sisi perceraian, sebelum Kebijakan Satu Anak diimplementasikan, jumlah rata-rata kasus perceraian berada di bawah angka 5%. Tapi, kasus ini meningkat hingga lebih dari 15% pada 2001 (Dicker, 2014). Dalam Konfusianisme, perempuan yang sudah menikah diharuskan tunduk pada suaminya seumur hidup. Ia harus tetap mempertahankan pernikahannya selamanya, meskipun ia harus menghadapi penderitaan panjang dalam pernikahan tersebut.

Perempuan juga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada suaminya, sehingga kasus perceraian yang dituntut oleh pihak istri hampir mustahil terjadi. Perceraian dalam masyarakat tradisional baru bisa terjadi jika laki-laki yang menuntut. Namun, dengan hanya memiliki seorang anak, berpendidikan dan memiliki penghasilan sendiri, perempuan Tiongkok saat ini merasa mampu menyokong dirinya sendiri tanpa bantuan suami mereka. Ketika masalah terjadi dalam rumah tangga mereka, banyak perempuan yang akhirnya berani memutuskan perceraian sebagai jalan keluar terbaik. Meskipun peningkatan angka perceraian sebenarnya merupakan hal yang negatif, tapi dari sini bisa dilihat bahwa sejak Kebijakan Satu Anak diimplementasikan, perempuan Tiongkok merasa dirinya lebih mampu menunjang hidup mereka sendiri, dan bisa lebih bebas menentukan pilihan.

Dalam Konfusianisme, perceraian dianggap sebagai kesalahan istri. Seorang suami menceraikan istrinya disebabkan oleh ketidakmampuan istri dalam melayani suami. Norma sosial berbasis Konfusianisme pada masa lalu beranggapan bahwa istri yang sudah dicerai suaminya akan memiliki status sosial yang rendah di masyarakat. Sehingga kecil kemungkinan bagi perempuan yang berstatus janda untuk menikah lagi. Pernikahan kedua setelah perceraian menjadi lebih terbuka setelah Kebijakan Satu Anak diimplementasikan di Tiongkok (Dicker, 2014). Semakin sedikitnya jumlah perempuan di Tiongkok telah membuka kesempatan bagi perempuan Tiongkok yang sudah bercerai untuk menikah kembali.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa kehidupan perempuan dalam masyarakat Tiongkok kini sudah berubah ke arah yang lebih positif. Kini perempuan sudah lebih memiliki nilai dalam masyarakat Tiongkok, menjadi pribadi yang berpendidikan, mapan, kuat, dan bebas. Perubahan dalam memandang perempuan ini paling tidak berimplikasi terhadap ekspektasi orangtua terhadap jenis kelamin anak mereka. Apabila sebelum hingga awal penerapan Kebijakan Satu Anak orang tua lebih mengidam-idamkan memiliki anak laki-laki, tren mulai bergeser. Kini orangtua lebih menginginkan memiliki anak perempuan, karena perempuan

dianggap lebih tangguh dalam menghadapi rintangan. Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah di Shanghai mengungkapkan bahwa dari 3.500 pasangan suami istri, lebih dari 15% menginginkan anak perempuan, sementara hanya 12% yang menginginkan anak laki-laki (Chau, 2009).

PENUTUP

Kesimpulan

Sejak 2.500 tahun lalu, Konfusianisme telah menciptakan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan di Tiongkok. Ajaran ini kemudian menjadi tradisi yang mendarah daging dalam masyarakat Tiongkok hingga saat ini, membentuk inferioritas perempuan. Sistem nilai ini kemudian diperkuat dengan Kebijakan Satu Anak yang diimplementasikan sejak tahun 1979. Di balik kesuksesannya menekan populasi di negaranya, Kebijakan Satu Anak telah membelenggu hak asasi perempuan, baik secara fisik, emosional dan spiritual. Anak-anak perempuan ditelantarkan oleh keluarga kandung mereka, diadopsi secara ilegal, bahkan menjadi korban penjualan anak. Perempuan-perempuan yang sedang mengandung terpaksa harus melakukan aborsi terhadap janin perempuan dalam kandungan mereka. Tidak sedikit pula perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, prostitusi dan penculikan. Di lain pihak, Kebijakan Satu Anak telah berkontribusi pada peningkatan status perempuan. Dengan hanya memiliki satu orang anak perempuan, orang tua menjadi fokus terhadap anak perempuan mereka, memberikan segala hal yang terbaik untuk anak tersebut. Selain itu, berkurangnya populasi perempuan di Tiongkok menyebabkan nilai tawar perempuan semakin tinggi di mata masyarakat. Kedua hal ini menjadikan perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, dan pada gilirannya akan membentuk eksistensi perempuan di keluarga dan masyarakat. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kebijakan Satu Anak selama 30 tahun lebih telah mempengaruhi kehidupan perempuan Tiongkok, bahkan hingga saat ini, pengaruh kebijakan ini terhadap perempuan di satu sisi merupakan pengaruh buruk, namun ironisnya pengaruh

buruk tersebut justru juga telah menghasilkan pengaruh yang baik bagi perempuan.

Sebuah Catatan Kecil untuk Indonesia

Tidak berbeda jauh dengan Tiongkok, Indonesia pun menerapkan Kebijakan Keluarga Berencana, yang dikenal dengan istilah KB sejak 1970.⁷ Meskipun gaungnya tidak sesanter dulu, namun kebijakan ini masih diterapkan hingga saat ini. Sebagai negara yang masih terus menerapkan Kebijakan Keluarga Berencana, banyak yang harus dipelajari oleh Indonesia dari penerapan Kebijakan Satu Anak di Tiongkok, terlebih dari sisi persamaan hak terhadap perempuan. Hal ini penting, agar perempuan Indonesia bisa memperoleh sisi positif dan menghindari sisi negatif dari penerapan Program Keluarga Berencana.

Terlebih, kondisi perempuan Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi perempuan di Tiongkok. Tradisi gender di Indonesia secara garis besar sama seperti Tiongkok. Mayoritas masyarakat Indonesia menilai perempuan sebagai makhluk inferior yang lemah dan tidak berdaya. Menurut Thung (2015), status perempuan dalam kebudayaan tradisional, hukum (adat), dan agama di Indonesia selalu berada di bawah laki-laki. Melihat kondisi ini, perempuan Indonesia menjadi rentan mendapatkan dampak negatif dari Program Keluarga Berencana, sama seperti yang dialami oleh perempuan Tiongkok. Berkaca pada Tiongkok, Pemerintah Indonesia harus mengawasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dan membuat regulasi-regulasi untuk menjaga perempuan Indonesia. Misalnya dengan mengawasi praktik aborsi, adopsi, perdagangan manusia, prostitusi, dan lain sebagainya. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan perempuan bisa terhindar dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kriminalitas.

Belajar dari Tiongkok, tidak ada salahnya juga bila pemerintah Indonesia melihat peluang perbaikan kehidupan perempuan melalui dampak positif Program Keluarga Berencana. Pemerintah

⁷ Di Indonesia, program Keluarga Berencana resmi diterapkan di Indonesia pada tanggal 29 Juni 1970, dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (Departemen Kesehatan RI, 2014; Robinson & Ross, 2007).

bisa ikut meningkatkan nilai perempuan di mata masyarakat, misalnya dengan gencar mengedukasi masyarakat mengenai persamaan nilai antara laki-laki dan perempuan. Langkah pertama adalah menjangkau keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, dengan memupuk kesadaran para orang tua bahwa memiliki anak perempuan dan laki-laki sama saja. Berawal dari orang tua yang adil memperlakukan anak-anak mereka, pada akhirnya akan tercipta lingkungan yang memiliki kesadaran akan kesetaraan gender. Dari sini diharapkan perempuan bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, baik dari segi pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Dengan penanganan yang baik, kehidupan perempuan Indonesia bisa terangkat melalui penerapan Program Keluarga Berencana.

PUSTAKA ACUAN

- Adler, J. A. (2011). *Confucianism in China today*. Pearson Living Religions Forum. New York: Kenyon College.
- All-China Women's Federation & National Bureau of Statistics in China. (2011). *Report on major results of the third wave survey on the social status of women in China*. Dari <http://landwise.resourceequity.org/record/228>.
- BBC. (16 Februari 2014a). *China expands abandoned baby hatch scheme*. Dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-26219171>.
- BBC. (2014b). *Female infanticide*. Dari http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion/medical/infanticide_1.shtml.
- Chai, C. & Chai, W. (1973). *Confucianism*. Newyork: Barron's Educational Series.
- Chau, V. (3 Agustus 2009). *Chinese parents hope for daughters after glut of sons*. Dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/5960673/Chinese-parents-hope-for-daughters-after-glut-of-sons.html>.
- Cleland, J., dll. (2006) Family Planning: the Unfinished Agenda. *The lancet sexual and reproductive health series*. Dari <https://www.researchgate.net/publication/6685271>.
- Departemen Kesehatan RI. (29 Juni 2014). *Situasi dan analisis keluarga berencana*. Dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-harganas.pdf>.
- Department of Economic and Social Affairs. (2001). *Abortion policies: a global review*. Dalam Hemminki, Elina, dkk. (2005). *Illegal births*

- and legal abortions - the case of China. *Reproductive Health*, 2 (5). dari <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5>.
- Dicker, L. (2014). *4 Grandparents, 2 parents, 1 daughter: the one child policy's restructuring of Chinese families and its positive impact on gender equality*. (University of Tennessee Honors Thesis Projects). University of Tennessee, Knoxville.
- Ertelt, S. (18 February 2009). *More than 13 million abortions a year in China, 55 percent of women have one*. Dari <http://www.lifenews.com/int1091.html>.
- Euan, M. (18 Februari 2014). *China's "Baby hatch" number set to increase*. Dari <http://edition.cnn.com/2014/02/17/world/asia/china-baby-hatch/>.
- Feng, W. dkk. (2016). The end of China's one-child policy. *Studies in Family Planning*, 47(1).83-86.
- Fung, E. (2014). The rise of women in China and the one child policy. *TCNJ Journal Of Student Scholarship*, 16.
- Hardee K., Xie Z., Gu B. (2004). Family planning and women's lives in rural China. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 30(2), 68-76
- He, D. (24 Maret 2014). *Career women in China take charge*. Dari http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-03/24/content_17372123.htm.
- Hemminki, E., dkk. (2005). Illegal births and legal abortions - the case of China. *reproductive health*, 2(5). Dari <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5>.
- Institute for International Cooperation, Japan International Cooperation Agency. (2005). *japan's experiences in public health and medical systems towards improving public health and medical systems in developing countries*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency (JICA).
- Jiang, C. C. (30 September 2013). *What happens when only 1.2% of Chinese women take the pill: 13 million abortions*. Dari <http://world.time.com/2013/09/30/what-happens-when-only-1-2-of-chinese-women-take-the-pill-13-million-abortions/>.
- Johnson, K. (1996). The politics of the revival of infant abandonment in China, with special reference to Hunan. dalam Settles, B. H. dkk. (2013). the one child policy and its impact on Chinese families. *International Handbook of Chinese Families (627-646)*. Newyork: Springer Science+Business Media.
- Joshi, S. (2011). *How effective are family-planning programs at improving the lives of women? some perspectives from a vast literature (preliminary and incomplete draft)*. Dari http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/FPPrograms_Impact_Review.pdf.
- Lei, S. (18 Juli 1995). Zhongguo Funü Jiefang Jishi [The history of Chinese women's liberation]. Chinese women's daily, 1. Dalam Sheng, X. (2004). Chinese Families. *Asia and the South Pacific Journal*, 99-128.
- Li, S. (9 Maret 2010). *Beijing's 'leftover ladies' estimated at 500,000*. Dari <http://www.globaltimes.cn/content/510975.shtml>.
- List, S. B. A (1 Juli 2013). *The one child policy drives human trafficking in China*. Dari <http://www.sba-list.org/suzy-b-blog/one-child-policy-drives-human-trafficking-china>.
- Magistad, M.K. (21 Februari 2013). *China's 'leftover women', unmarried at 27*. Dari <http://www.bbc.com/news/magazine-21320560>.
- Ministry of Civil Affairs of China, Department of Finance and Administration. (1992). *China civil affairs' statistical year book*. Beijing: China Statistical Press.
- Ministry of Civil Affairs of China, Department of Finance and Administration. (2001). *China civil affairs' statistical year book*. Beijing: China Statistical Press.
- Moeliono, A. M. (1993). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- National Bureau of Statistics of China. (2001). Guoji Tongji Nianjian: 2001 [international statistical yearbook: 2001]. Beijing: China Statistical Press. Dalam Sheng, X. (2004). Chinese Families. *Asia and the South Pacific Journal*, 99-128.
- National Bureau of Statistics of China. (2012). *Women and men in China: facts and figures 2012*. Beijing: China
- Panggabean, V. A. (17 Februari 2014). *Pemerintah China buka 25 bangunan tempat orangtua buang bayi*. Dari <http://www.merdeka.com/dunia/pemerintah-china-buka-25-bangunan-tempat-orangtua-buang-bayi.html>.
- Population Research Institute. (1 Juni 2011). *"Illegal children" abducted by Chinese authorities and trafficked abroad*. Dari <https://www.pop.org/content/illegal-children-abducted-chinese-authorities-and-trafficked-abroad>.
- Poston, D. L. & Li, Z. (2009). China's unbalanced sex ratio at birth: how many surplus boys have been born in China since the 1980s?. *The*

Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis, 22, 57-69.

- Poston, D. L. (2013). China's changing demography is changing the world. Dalam Dicker, L. (2014). *4 Grandparents, 2 parents, 1 daughter: the one child policy's restructuring of Chinese families and its positive impact on gender equality*. (University of Tennessee Honors Thesis Projects). University of Tennessee, Knoxville.
- Rigdon, S. M. (1996). Abortion law and practice in China: an overview with comparisons to the United States. Dalam Hemminki, Elina, dkk. (2005). Illegal births and legal abortions - the case of China. *Reproductive Health*, 2(5). Dari <http://www.reproductive-health-journal.com/content/2/1/5>.
- Robinson, W. C. & Ross, J. A. (2007). *The global family planning revolution: three decades of population policies and programs*. Washington: The World Bank.
- Schott, B. (15 Maret 2010). "Leftover ladies & 3S women". Dari http://schott.blogs.nytimes.com/2010/03/15/leftover-ladies-3s-women/?_r=0.
- Settles, B. H. dkk. (2013). the one child policy and its impact on Chinese families. Dalam Chan Kwok-bun (Ed.), *International Handbook of Chinese Families* (627-646). Newyork: Springer Science+Business Media.
- Setyaningsih, R. P. (2011). *Job satisfaction of Indonesian workers in Taiwan*. (Tesis di International Master's Program yang Tidak dipublikasikan). National Chengchi Unviersity, Taiwan.
- Sheng, X. (2004). Chinese families. *Asia and the South Pacific Journal*, 99-128.
- Thung, J. (2015). Perempuan dan modernisasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17 (1), 17-28.
- Tiefenbrun, S. & Edward, C. J. (2008). Gendercide and the cultural context of sex trafficking in China. *Fordham International Law Journal*, 32 (3), 731-780.
- UNRIC. (3 April 2012). *Illegal adoption*. Dari <http://www.unric.org/en/human-trafficking/27450-illegal-adoption>.
- Wang, H. C., dkk. (2015). Gender imbalance and urban "leftover women". *Chinese Studies*, 4, 127-130.
- Wang, L. (11 April 2013). *Holding the household purse strings*. Dari <http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/features/family/15/6043-1.htm>.
- Wen, T. (1 Juli 2014). *As China's one-child policy relaxes, girl children no longer stigmatized*. Dari <http://www.thedailybeast.com/articles/2014/01/07/as-china-s-one-child-policy-relaxes-girl-children-no-longer-stigmatized.html>
- Whitefield, B. (2008). The Tian Zu Hui (Natural Foot Society): Christian women in China and the fight against footbinding. *Southeast Review of Asian Studies*, 30, 203-212.
- Wong Y. L. (1995). Women's education in traditional and modern China. *Women's History Review*, 4 (3), 345-367.
- Xu, X. (2014). Chinese wedding: marriage in transition, values stay. *Confucius Institute Magazine*, 32 (3). Dari <http://confuciusmag.com/chinese-wedding>.
- Ye, L. (4 November 2015). *China's one-child policy helped women make a great leap forward – so what now?*. Dari <https://theconversation.com/chinas-one-child-policy-helped-women-make-a-great-leap-forward-so-what-now-50143>.
- Yuan, L. J. (2001). China's population policy: aging, gender, and sustainability. *Journal of Research on Women and Gender*, 3, 39-55.
- Zhang, W. G. (2006). Child adoption in contemporary rural China. *Journal of Family Issues*, 27 (3), 301-340.
- Zhu, Y. (2013). *One child policy and women's challenging sosial situation in China*. (Tesis di Welfare Policies and Management). Lund University. Swedia.

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

KOMODIFIKASI AGAMA-AGAMA DI KOREA SELATAN

Saiful Hakam, Cahyo Pamungkas dan Erni Budiwanti

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: hakam9@gmail.com

Diterima: 31-11-2016

Direvisi: 3-1 2017

Disetujui: 10-1-2017

ABSTRACT

The commodification of religions in South Korea reveals how religious aspects are commercialized and become a very dynamic marketplace. The commodification of religions reinforces the notion that religions is still strongly significant in the era of post-modern and neo-liberalism. Religions increasingly present in the public space and marketplace in South Korea. In the context of Buddhism, the commodification of religions has changed Buddhist temples, monasteries, and rituals become attractive and massive tourist destination. In the context of Christianity, commodification shows how church institutions utilize science of marketing and management in managing the churches and the rituals in line with the interests of congregation. Thirdly, in the context of Islam, the doctrine of halal increasingly to be institutionalized in the Islamic world has prompted the Korean food industries producing halal products for export to Islamic countries that are a potential and big market.

Keywords: *Commodification of religions, religiosity, and marketplace.*

ABSTRAK

Komodifikasi agama di Korea Selatan mengungkapkan bagaimana aspek-aspek agama dikomersialkan dan menjadi pasar yang menarik. Komodifikasi agama memperkuat pandangan bahwa agama masih signifikan dalam era *post-modern* dan *neo-liberalisme*. Agama semakin hadir di ruang publik dan ruang pasar di Korea Selatan. Dalam konteks agama Budha, komodifikasi agama telah mengubah vihara, kehidupan vihara dan ritual Budha menjadi obyek pariwisata menarik sehingga menopang pariwisata Budha secara masif. Dalam konteks agama Kristen, komodifikasi memperlihatkan bagaimana institusi gereja memanfaatkan ilmu manajemen dan *marketing* dalam mengelola gereja dan menjalankan ritual sehingga lebih sesuai dengan minat jemaat. Ketiga, dalam konteks Islam, doktrin halal di dunia Islam telah mendorong industri makanan Korea Selatan memproduksi produk-produk halal untuk diekspor ke negara-negara Islam yang merupakan pangsa pasar potensial.

Kata kunci: komodifikasi agama, religiusitas, dan ruang pasar.

PENDAHULUAN

Kajian ini mendeskripsikan tentang dinamika dan kehidupan kontemporer agama-agama di Korea Selatan dalam relasinya dengan konteks sosial ekonomi untuk mengetahui komodifikasi agama meliputi komersialisasi rumah-rumah peribadatan, ritual, dan institusi keagamaan di Korea Selatan.

Dulu, Korea Selatan adalah negeri semenanjung yang kecil, miskin, tidak memiliki sumber daya alam potensial, padat penduduk, dan porak poranda akibat Perang Korea 1950-1953. Negeri ini mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang sangat hebat karena menjadi medan dan kancha pertama dan utama dari perang dingin yang berlarut-larut antara Blok Kapitalis

di bawah Amerika Serikat dan Blok Komunis di bawah Uni Soviet dan Tiongkok.

Sekarang, Korea Selatan telah berubah. Ia menjadi negara maju dengan kekuatan kokoh di bidang ekonomi, sains, dan teknologi. Produk-produk teknologi tinggi negara semenanjung itu yakni otomotif, komputer, dan telepon seluler merajai pangsa pasar dunia dan disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, ini menjadi sangat menarik, kemajuan ekonomi dan keberhasilan pembangunan Korea Selatan terutama keberhasilan pembangunan infrastruktur, teknologi, dan *sains* tidak menjauhkan masyarakat dari agama. Sebaliknya, modernitas-modernitas itu semakin mendorong masyarakatnya untuk teguh memeluk dan menjalaskan kehidupan keagamaan. Kehidupan agama atau religiusitas sangat mewarnai dan merasuk dalam kehidupan modern masyarakat Korea Selatan. Kuil-kuil Budha dan gereja-gereja berdiri sejajar dengan pusat-pusat bisnis, pemukiman modern apartemen, dan senantiasa ramai dengan pengunjung untuk mengheningkan cipta dan berdoa.

KOMODIFIKASI AGAMA

Istilah komodifikasi berasal dari salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Komodifikasi menggambarkan suatu bentuk transformasi dalam relasi-relasi sosial yang pada awalnya tidak bersifat komersial menjadi bersifat sangat komersial. Relasi sosial hasil dari transformasi menjadi tereduksi menjadi hubungan pertukaran yang bersifat komersial. Komodifikasi mengubah relasi sosial yang pada awalnya bersifat humanis menjadi relasi bisnis. Tentu saja, manusia dilihat sebagai objek, benda, dan sesuatu yang diperdagangkan. Jean Baudrillard dalam studi *post-modernisme* menjelaskan bahwa masyarakat yang terkomodifikasi adalah masyarakat di mana di dalamnya relasi-relasi sosial telah berubah menjadi komoditas. Ini adalah masyarakat di mana hal-hal material maupun nonmaterial diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karl Marx menyebut komodifikasi sebagai pembayaran

tunai yang tidak berperasaan. Hal ini merujuk pada kaum borjuis dalam sistem sosial yang kapitalis melakukan kontrol atas masyarakat dan mengubah nilai-nilai personal mejadi nilai tukar. Mengubah relasi keluarga menjadi relasi komersial. Akibatnya, segala sesuatu tidak ada nilainya jika ia tidak memiliki nilai tukar.

Jika dikaitkan dengan agama dan aspek-aspek keagamaan, komodifikasi adalah suatu bentuk transformasi yang bermuara pada perubahan simbol-simbol keagamaan menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ini dapat dilihat dalam dunia *fashion*, tempat-tempat ibadah, dan simbol-simbol keagamaan. Ketika konsep komodifikasi digunakan dalam ranah keagamaan, maka aspek-aspek tertentu dari agama diubah menjadi sebuah komoditas yang dijual di pasar. Dengan kata lain, komodifikasi agama adalah upaya mengkomersialisasikan agama atau upaya mengubah aspek-aspek agama, dan simbol-simbol keagamaan menjadi komoditas yang diperdagangkan.

Pasar umat beragama, *religious markets*, di Korea Selatan berkembang pesat sesudah Perang Korea berakhir. Di masa kini hampir setiap kelompok agama besar, terutama Budha dan Kristen, melakukan komodifikasi agama.

Dalam pandangan Kitiarsa, komodifikasi tidak menyebabkan menurunnya religiusitas. Komodifikasi mewarnai relasi antara pasar dan agama. Ada keberlanjutan pengaruh agama di Asia di modernisasi dan fenomena posmodernis. Komodifikasi agama di Asia merupakan konstruksi budaya dan sejarah. Proses komodifikasi agama tertanam dalam jejak global ekonomi pasar. Komodifikasi agama tidak menyebabkan krisis keagamaan atau produksi agama baru. Menurut Kitiarsa bahwa komodifikasi tidak berarti agama hilang dalam ruang publik tetapi bagaimana respon agama adaptif terhadap modernitas.

Pattana Kitiarsa (2008) pada buku, "*Religious commodification in Asia, Marketing Gods*", menjelaskan dengan komprehensif mengenai konsep komodifikasi agama dalam diskursus ilmu sosial di negara-negara Barat. Menurutnya, pemikiran dominan dalam sosiologi

agama, seperti dijelaskan Berger (1967) mengenai *the sacred canopy*, bahwa agama memberikan sekumpulan aturan moral dan perlindungan spiritual kepada umat manusia dan masyarakat yang mengikutinya. Berger menekankan bahwa umat manusia yang mempercayai agama tidak dapat keluar dari langit-langit yang suci karena keluar dari langit-langit ini berarti akan jatuh ke dunia yang penuh dengan kegelapan, ketidakteraturan, ketidaktertiban bahkan kegilaan (Berger, 1969, 134). Terminologi yang suci ini menurut Durkheim dimaknai sebagai sesuatu yang membantu manusia mengatasi masalah-masalah mendasar mengenai keberadaan manusia (Geertz, 1973).

Konsep Berger mengenai langit-langit yang suci ini dapat kita lacak dari pandangan Durkheim bahwa salah satu unsur agama adalah sekumpulan nilai dan keyakinan yang suci, melekat pada suatu komunitas masyarakat. Namun, yang suci menurut Berger adalah merujuk pada sebuah kualitas kekuasaan yang misterius dan menakutkan, melekat pada relasi antarmanusia, dipercaya berada dalam objek-objek pengalaman manusia. Yang suci ini tidak semata-mata berada pada *platform* kosmologis dan kultur yang berbeda, melainkan terpisah dari rutinitas sehari-hari yang bersifat materiil (Geertz, 1973, 27). Penggunaan konsep langit-langit yang suci (*the sacred canopy*) ini banyak digunakan untuk menganalisis perkembangan agama-agama di dunia sebagai berikut. *Pertama*, metafora ini nampaknya menghadirkan kesan adanya individu-individu dan masyarakat yang saleh dalam dunia yang sekalipun sudah terkena gelombang sekulerisasi. Agama dengan demikian telah diakui mempengaruhi kehidupan privat dan publik. *Kedua*, apakah yang akan terjadi ketika agama yang dipahami sebagai sesuatu yang suci ini berinteraksi atau berhadapan dengan ekonomi kapitalis dan kehidupan modern yang sekuler.

Menurut Kitiarsa (2008), bahwa komodifikasi agama memasukkan agama ke dalam pasar dan mengubah sesuatu yang suci menjadi sesuatu yang diperdagangkan. Dengan demikian, fenomena komodifikasi agama seperti ini dapat dilihat sebagai penyesuaian dan respon agama terhadap penetrasi kapitalisme global. Hal ini tentu saja berlawanan dengan

pandangan para pemikir teori-teori sekulerisasi yang memprediksi peran agama akan menurun secara signifikan sebagai determinan penting individu dalam menentukan tindakan dan kesadaran sosial ketua masyarakat, termasuk individu di dalamnya, mengalami modernisasi dan rasionalisasi.

Merujuk Kitiarsa (2008), para pemikir utama sekulerisasi yang membahas mengenai peran agama dalam modernisasi, Misalnya Hammond (1985, 1) menuliskan bahwa ini adalah suatu situasi ketika masyarakat bergerak dari kondisi agama yang suci menjadi kondisi sekuler di mana yang suci mengalami penurunan sebagaimana dibuktikan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Tuhan, menurunnya keanggotaan dalam gereja dan berkurangnya kehadiran untuk misa ke gereja. Pemikiran *mainstream* ahli sosiologi agama termasuk Berger dalam karyanya yang baru (1999, 2) menekankan bahwa modernisasi secara tidak terhindarkan menyebabkan menurunnya peran agama baik dalam masyarakat maupun individu. Berbeda dari para pemikir *mainstream*, Wilson (1985, 14) berpandangan bahwa model sekulerisasi tidak mendasarkan pada hilangnya keagamaan (*religiosity*) atau agama yang diorganisir. Namun model tersebut hanya mengindikasikan menurunnya agama dalam bekerjanya sistem sosial, secara signifikan mengurangi kesadaran sosial. Menurut Wilson, teori-teori sekulerisasi memfokuskan pada bekerjanya sistem sosial dan fungsi-fungsi tindakan sosial dalam sistem sosial ini. Sistem sosial memiliki mekanisme rasionalisasi dan sekulerisasi sendiri yang meningkat. Misalnya kepercayaan pada kekuatan supranatural tidak sepenuhnya hilang baik sebagai ekspresi retorika publik atau sebagai preferensi individu, tetapi mereka berhenti untuk menjadi penentu dalam tindakan sosial. Umat manusia belajar untuk mengatur perilaku mereka menyesuaikan terhadap bangunan-bangunan rasional yang membentuk tatanan sosial, tindakan tidak lagi ditentukan oleh agama tetapi oleh hitungan, sistematis, diatur, dan menjadi rutin.

Berger (1999, 2) mengatakan bahwa pandangan mengenai sekulerisasi cenderung keliru dan bebas nilai. Pemikir teori sekulerisasi cenderung melihat ketahanan dan kebaikan

(*subtlety*) agama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan modernitas yang penuh kuasa, terutama naiknya negara bangsa modern dan ekonomi pasar kapitalis dunia. Menurut Kitiarsa, kritik terhadap teori-teori sekularisasi telah dilakukan sejak berakhirnya perang dunia kedua, oleh para peneliti yang mengkaji perkembangan ekonomi kapitalis di Amerika Serikat dan Asia Timur. Argumentasi utama untuk melawan teori sekularisasi adalah pandangan Weber (1947, 155) mengenai kepekaan dunia (*disenchantment of the world*) hanya benar sebagian. Weber dan para ilmuwan yang mengikutinya tidak memprediksi menurunnya peran agama di tangan modernisasi melainkan hanya pemisahan antara yang sekuler dengan yang religius dan hilangnya pengaruh agama terhadap ruang publik (Beckford, 1985, 127). Agama dengan demikian merespon kekuatan-kekuatan modernitas dengan cara yang berlawanan. Semakin masyarakat menjadi modern secara rasional, terdiri secara ilmiah, meningkat penguasaan teknologinya, makur secara ekonomi, semakin besar kecenderungan orang-orang untuk terpesona atau terpesona kembali oleh keyakinan mereka. Dengan demikian, teori sekularisasi agama dihadapkan oleh karya Berger pada tahun 1999 "*desecularization of the world*," yang menjelaskan kesalahan teori sekularisasi dan kebangkitan agama secara luas pada akhir abad ke-21.

Secara umum, proposisi yang diangkat adalah komodifikasi agama sebagai bagian dari fenomena sekularisasi tidak menghilangkan agama dalam ruang publik namun sebaliknya memperkuatnya. Pandangan ini dikumandangkan oleh Pattana Kitiarsa (2011, 1). Kitiarsa menyebutkan bahwa komodifikasi hal-hal yang bersifat sakral tidak menyebabkan menurunnya religiusitas secara kritis seperti yang diperdebatkan oleh ahli-ahli teori sekularisasi seperti Hammond (1985) dan Wilson (1996). Komodifikasi pada realitasnya mewarnai cara-cara terbentuknya relasi antara pasar dan agama. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa terdapat kontinuitas pada pengaruh agama secara signifikan di negara-negara Asia di tengah kecenderungan modernisasi yang penuh kuasa dan juga ketidakteraturan budaya yang dimunculkan oleh fenomena *post-modernisme*.

Komodifikasi agama di Asia merupakan hasil dari konstruksi budaya dan sejarah yang bersifat kompleks. Dengan demikian, komodifikasi agama dihasilkan dalam konteks budaya yang bersifat tertentu dan oleh karenanya memerlukan sebuah pemahaman mengenai kerangka kebudayaan untuk membuka signifikansi sosial ekonomi dan simboliknya. Proses komodifikasi agama adalah bukan sesuatu yang bersifat *take for granted* tetapi ditemukan dan tertanam secara spesifik dalam jejak global-lokal dalam ekonomi pasar dan ledakan *post-modernisme*. Komodifikasi agama tidak menyebabkan krisis keagamaan atau memproduksi bentuk-bentuk dan gerakan-gerakan agama baru yang menentang kepercayaan, praktik-praktik, dan organisasi-organisasi keagamaan yang telah terlembagakan. Pada intinya dapat disimpulkan dari Kitiarsa bahwa komodifikasi tidak berarti mengarah pada hilangnya agama dalam ruang publik tetapi lebih pada bagaimana respon agama yang adaptif terhadap gelombang modernitas sehingga tetap eksis.

PEMBAHASAN

Ajaran Budha, Pariwisata, dan *Temple Stay Programme*

Komodifikasi agama Budha terjadi dalam ranah pariwisata mengunjungi tempat-tempat keramat vihara-vihara Budha di Korea Selatan. Komodifikasi agama Budha di Korea Selatan mengubah kuil Budha, patung Budha, ritual peribadatan, meditasi, kehidupan bersahaja biksu, dan bahkan kehidupan harmoni, keteduhan dan kesunyian vihara menjadi obyek pariwisata yang sangat menarik. Mustahil mendiskusikan vihara Budha di Korea Selatan tanpa menghubungkannya dengan dunia pariwisata. Dapat dideskripsikan bahwa semua situs sejarah Budha memberikan kontribusi besar pada perkembangan industri pariwisata. Begitu pula sebaliknya industri pariwisata memberikan kontribusi besar dalam pemugaran situs-situs Budha. Dalam konteks pariwisata modern, peziarah menjadi seperti turis. Dalam perspektif keagamaan wisatawan nampak menjadi seperti penziarah. Studi pariwisata keagamaan, dikenal dengan *spiritual tourism*, mendeskripsikan perjalanan dimotivasi oleh agama atau situs

dikunjungi wisatawan berhubungan dengan agama. Pariwisata keagamaan meliputi ziarah tempat suci, melihat, rekreasi, dan ritual. Pariwisata keagamaan memasukkan konsumsi kebudayaan di situs keagamaan.

Badan pariwisata, pelaku bisnis pariwisata, dan para rahib Budha bekerja sama mengembangkan *Temple Stay Programme* (TSP). Realitas sosial ekonomi ini mendeskripsikan dengan singkat betapa komodifikasi agama terjadi pada komunitas Budha di Korea Selatan. TSP mendapat dukungan dari Pemerintah terutama dari Presiden Park. Pemerintah mensponsori pemugaran dan pembangunan situs-situs Budha di Korea. Presiden Park secara pribadi memimpin pemugaran kembali kawasan bersejarah Kyongju, merenovasi kuil, dan monumen Budha termasuk Kuil Pulguk menjadi simbol nasional. Pemerintah mempromosikan Kuil dan Monumen Budha mendatangkan masyarakat ke tempat-tempat ini. Hasil dari perbaikan sistem transportasi dan pertumbuhan ekonomi, pengunjung kuil-kuil meningkat sehingga perlindungan dan pemugaran cagar budaya menjadi kebutuhan. Tiket diberlakukan berdasarkan *Cultural Assets Preservation Law* untuk mengumpulkan dana dengan tujuan dana pemeliharaan cagar budaya. Selama periode 1960-1980, sejumlah kuil memberlakukan tiket. Sekarang kurang lebih 67 kuil berafiliasi dengan *Jogye Order* menerapkan tiket masuk. Antara tahun 2001 dan 2005 lebih dari 31 juta dolar berasal dari tiket masuk sedangkan 1,3 juta dolar subsidi pemerintah (Kaplan, 2010). Salah satu alasan meningkatnya wisatawan Budha ke Korea Selatan adalah dibukanya *Korean National Parks System* pada tahun 1967. Kebanyakan tujuan wisata diubah menjadi taman nasional oleh Pemerintah Korea. Kebanyakan candi dan biara Budha di daerah pegunungan berada di taman nasional pusat menarik para pendaki gunung. Kaplan (2010) melakukan studi mengenai *brand of Buddhist temples in Korea*. Program ini menawarkan wisatawan tinggal di biara Budha dan sentuhan tradisional Budha. Studi Kaplan meneliti bagaimana Pemerintah dan lembaga agama Budha berpartisipasi membentuk *brand* secara personal. Studi Kaplan menunjukkan bahwa pembuatan *brand* kuil dan biara Budha

berkontribusi terhadap perubahan identitas biara-biara dari pusat komunitas Budha menjadi tempat dengan pelayanan publik seperti Pusat Warisan Agama Nasional.

TSP adalah sebuah program pariwisata yang dikembangkan di Korea menjadi salah satu sektor andalan. Program ini telah menyediakan akomodasi dan pelayanan kepada para turis dalam biara Budha dan memberikan mereka pengalaman 1700 tradisi Budha dan kebudayaan Korea. Secara resmi program ini, merupakan kerjasama dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan dan *Jogye Order*, diluncurkan pada tahun 2002 pada saat penyelenggaraan Piala Dunia 2002 dalam rangka menarik turis internasional. Selama 10 tahun kemudian, program ini berkembang dengan pesat dan TSP menjadi fenomena khusus serta berhasil membentuk identitas budaya dan pariwisata Korea yang bersifat unik sekaligus memperluas pengaruh agama Budha Korea.

TSP menjadi pilihan tradisional penziarah. Kuil Budha menawarkan kepada wisatawan bukan beragama Budha selama ziarah dan juga kepada pemeluk Budha yang mencari ketenangan (*retreat*) dalam ibadah. Tinggal sementara di Kuil bertransformasi menjadi tujuan turis. Program ini diluncurkan pada 2002, Piala Dunia Sepak Bola, karena khawatir kekurangan hotel, Pemerintah Korea bekerjasama dengan *Jogye Order* memberikan akomodasi pada pengunjung piala dunia di biara-biara Budha. Sejak saat itu program TSP menjadi tempat wisata utama di Korea. Para turis datang di biara-biara Budha di seluruh Korea dan mengalami gaya hidup di biara Budha. Selama piala dunia 2002, 33 biara berpartisipasi dalam program dan memberikan akomodasi untuk 991 wisatawan manca negara. Pada tahun 2006, 50 biara berpartisipasi dengan 70,914 tamu. Dalam 10 tahun, 100 biara bergabung dengan pengunjung 455,092. Program ini menjadi contoh pariwisata agama berhasil di dunia. TSP tidak hanya menyediakan pengunjung dengan akomodasi saja tetapi juga mendorong berkembangnya industri lain, pendidikan, dan juga pemerintah yang ikut memikirkan bahwa memelihara dan memajukan kebudayaan nasional

dan tradisi dengan bekerjasama dengan industri pariwisata.

TSP merupakan program pengalaman budaya membantu masyarakat memahami budaya Korea. Program ini menawarkan praktik keagamaan seperti *yebul* (*ceremonial service involving chanting*), *chamseon* (*Zen meditation*), *dahdoh* (*tea ceremony*) and *balwoo gongyang* (makan hidangan bersama). Peserta menemukan harmoni ketika tinggal di biara. Kehidupan di biara dirancang untuk membantu masyarakat memahami agama Budha di Korea dan kehidupan biarawan. Agama Budha di Korea menyerap kepercayaan asli seperti Shamanisme dan berevolusi dengan cara unik. Biarawan Korea yakin bahwa kepercayaannya berasal dari Cina namun dalam perjalanannya mereka mengembangkan pendekatan holistik Korea melibatkan tiga elemen yakni meditasi, mempelajari sutra (kitab), dan lafal mantra (*chanting*). Ketiga prinsip Budha Korea menjadi penarik wisatawan mancanegara.

MEMASARKAN IMAN

***Megachurch* atau Gereja Besar di Korea Selatan**

Megachurch dalam Agama Kristen di Korea Selatan meniru, meminjam, dan memanfaatkan ilmu manajemen dan teknik *marketing* dalam menyebarkan kebenaran dan Yesus Kristus dan menjalankan praktik-praktik ritual atau kebaktian baru yang lebih sesuai dengan minat jemaat. *Megachurch* bukan sekedar gereja biasa namun sebuah supermall yang menawarkan berbagai produk keagamaan yang sesuai dengan selera dan minat jemaat. Kebaktian, musik, dan kotbah diselenggarakan untuk berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.

Komodifikasi Agama Kristen terjadi di ranah ritual keagamaan atau ibadah dalam hal ini kesaksian, ekspresi keimanan, musik, dan ritual kebaktian biasa dilakukan secara komunal. Gereja Yoido Full Gospel sebuah gereja besar dengan bangunan agung memiliki dua belas ribu kursi dan manajemen korporasi. Gereja ini adalah gereja Pantekosta. Gereja besar ini berafiliasi dengan Sidang Jemaat Allah di Yoido di Seoul,

Korea Selatan. Gereja ini berada di jantung kota Seoul, berdiri berseberangan dengan Gedung Majelis Nasional Korea. Bangunan gereja ini sangat besar karena bisa menampung 12.000 anggota jemaat dan jemaat yang membludak hadir dalam kebaktian diarahkan dan ditempatkan ke gedung-gedung terdekat untuk mengikuti kebaktian gereja utama melalui *telescreens*. Pada tahun 2015, gereja besar memiliki kurang lebih 480.000 anggota jemaat. Gereja Yoido merupakan gereja Kristen Pentakosta terbesar di Korea Selatan. Gereja ini didirikan oleh David Yonggi Cho pada tahun 1958. Sekarang ini dipimpin oleh Young Hoon Lee.

Untuk merekrut anggota jemaat baru dan mengelola anggota jemaat lama, David Yonggi Cho, Pendiri Gereja, menetapkan pembagian zona pada kota Seoul. Kota Seoul dibagi ke dalam beberapa zona. Setiap zona terdapat satu sel terdiri dari beberapa anggota jemaat kecil. Setiap sel mengadakan pertemuan seminggu sekali pada hari kerja untuk ibadah bersama dan studi Alkitab di rumah pemimpin sel. Setiap anggota sel didorong untuk mengundang teman mereka untuk menghadiri pertemuan sel untuk belajar dan membaca dan memahami sejarah dan riwayat Yesus Kristus. Setiap pemimpin sel dianjurkan untuk melatih asisten. Ketika anggota jemaat sel mencapai jumlah tertentu maka sel itu akan dibagi dengan setengah dari anggotanya bergabung dengan sel baru yang dipimpin oleh orang yang pernah menjadi asisten. David Yonggi Cho kemudian menulis sebuah buku dalam bahasa Inggris tentang konsep multiplikasi sel yang kemudian ditiru oleh gereja di seluruh dunia. Gereja Yoido Full Gospel memberikan peran penting kepada jemaat perempuan. David Yonggi Cho mendorong perempuan menjadi pemimpin sel di bawah naungan kelembagaan gereja. Ia yakin bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin sel yang ideal karena memiliki waktu luang dan keinginan untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah anggota jemaat lain. Sistem sel mendapatkan sukses yang luar biasa besar. Dari 125 sel pada tahun 1967 gereja ini berhasil mengembangkan ribuan sel. Selain itu, Gereja membuat *A Women Fellowship* dimulai pada tahun 1960 dan disusul dengan *A Man Fellowship* bertujuan untuk mencari jemaat awam terlibat

dalam pelayanan gereja dalam kapasitas sebagai relawan. Gereja ini juga menerbitkan majalah bernama memuat pelajaran Alkitab, kesaksian, dan kabar. Majalah bulanan ini segera tersebar luas bahkan di luar Kota Seoul.

Organisasi Gereja Yoido Full Gospel bukan sekedar organisasi keagamaan mengurus kegiatan ritual dan kebaktian namun juga organisasi sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang pendidikan gereja ini memiliki dua perguruan tinggi yaitu International Theology Institute dan Hansei University. Di ranah sosial kemanusiaan gereja ini memiliki *Elim Welfare Town* dan NGO *Good People World Family*. Di ranah publikasi gereja ini memiliki satu surat kabar dan dua majalah yaitu *Kukmin Daily*, *Sinangge*, dan *Full Gospel Family Newspaper*. Di ranah misionaris atau dakwah Kristen gereja ini membawahi *David Cho Evangelistic Mission* dan *Church Growth International*. Gereja ini juga mengadakan kegiatan ziarah bersama dan kebaktian bersama bernama *Onsari Choi Ja-sil Memorial Fasting Prayer*. Di sini boleh dikatakan bahwa organisasi keagamaan besar dan masif tidak hanya sibuk mengurus manajemen berhubungan dengan Tuhan namun juga sibuk menghadapi urusan personalia dan terutama finansial.

KOMODIFIKASI AGAMA ISLAM

Islam dan Produk Halal di Korea Selatan

Halal, doktrin keagamaan Islam, dalam konteks masyarakat konsumsi telah berubah menjadi *marketplace* yang sangat dinamis karena memberikan kesempatan besar bagi pelaku industri makanan untuk memproduksi hidangan makanan, minuman, dan kosmetik yang halal dan sesuai syariah. Pelaku industri melakukan riset dan kerja sama yang erat dengan Otoritas Keagamaan Islam untuk memahami dan bahkan memproduksi teknik-teknik baru dalam merumuskan syarat-syarat dan sertifikat Halal. Umat Islam tidak lagi dipandang sebagai penganut agama yang kolot melainkan sebuah pasar besar yang menghendaki produk-produk halal yang islami dan tergabung dalam arus deras masyarakat konsumsi. Mengonsumsi produk-produk halal selain kewajiban menjalankan

doktrin teologi juga mengungkapkan adanya realitas keagamaan baru di mana orang Islam di masa kini mendapatkan nuansa “pengalaman” (*experience*) yang lebih kongkrit dalam menjalankan perintah Tuhan.

Halal adalah doktrin keagamaan dimuat dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Halal diartikulasikan oleh pasar bebas melalui sertifikat halal yang kemudian menjamin suatu produk memiliki *brand* halal. Dengan *brand* halal maka perilaku ekonomi konsumsi mendapatkan artikulasi keagamaan sehingga konsumen Muslim mendapatkan produk halal dan sesuai dengan doktrin agama dalam *scriptural texts*.

Pasar telah menjadi ruang publik dengan atmosfer sosial ekonomi yang mampu mengartikulasikan kebutuhan primer—primer dan material sekaligus kebutuhan identitas—agama. Pasar memberikan ruang keagamaan eksklusif bagi konsumen Muslim memberikan produk halal. Produk halal ditentukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan uji laboratorium. Selain memberikan keuntungan material, pasar juga menyediakan ruang spiritualitas keagamaan dengan mensuplai produk halal, memenuhi *scriptural standard*, dan mempertegas ritual keagamaan.

Korea jelas bukan negara Islam tetapi sangat dikenal sebagai salah satu tujuan wisata halal, sekaligus pemasok produk halal ke negara-negara Islam terbesar di Asia. Kunjungan wisatawan dan kalangan bisnis dari negara-negara Islam mendorong badan pariwisata pemerintah Korea dan pelaku pariwisata terutama hotel dan restoran menyajikan hidangan halal. Selain itu, kalangan industri makanan memiliki ketertarikan besar pada produk-produk makanan halal karena potensi pasar begitu besar dan masih terbuka luas di negara-negara Islam. Dalam perspektif ekonomi bisnis, kehadiran industri halal menjelaskan dengan baik betapa agama di masa kini menjadi pasar sangat potensial dan memberikan kesempatan besar bagi pelaku industri makanan untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Perintah makan hidangan halal dalam ajaran Islam sangat mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 185.

Dalam kasus produk makanan halal Korea Selatan, pasar nampak mengartikulasikan kewajiban agama dalam objek ekonomi dan bisnis bernama sertifikasi halal. Perilaku ekonomi mendapatkan artikulasi keagamaan. Produsen mendapatkan jaminan menguasai pangsa pasar dan mendapat profit sedangkan konsumen mendapatkan jaminan halal dari suatu produk. Pasar menjadi ruang publik dan mengartikulasikan kebutuhan primer dan religius. Pasar memberi ruang ekspresi keagamaan dan kesalehan beribadah bagi konsumen Muslim. Dalam tataran praktis, kebutuhan produk halal mendorong kelahiran lembaga khusus yang berhak mengeluarkan sertifikat halal untuk pelaku bisnis. MUI di Indonesia. JAKIM di Malaysia. KMF di Korea Selatan. Dalam perspektif ekonomi keagamaan, pasar bukan saja menjanjikan keuntungan material bagi pelaku bisnis tapi juga menyediakan ruang spiritual dan ekspresi keagamaan kuat bagi konsumen. Pasar memberikan produk halal memenuhi standard skriptual dan memperkuat iman sebagai orang Islam. Sertifikat halal tidak saja terkait dengan doktrin keagamaan namun juga terkait dengan *branding* dan manajemen pemasaran yang lazim berlaku dalam industri makanan dan kesehatan.

Seperempat dari populasi dunia adalah Muslim. Jumlah mereka telah mencapai hampir 1,8 milyar. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi Muslim, kebutuhan akan produk halal bertambah. Menurut suatu riset pasar, omset perdagangan makanan halal tahun di pasar internasional cukup mengejutkan, mencapai angka yang mengejutkan, yakni 700 milyar dolar. Menurut beberapa ahli, peningkatan produk halal di pasar global naik dua kali lipat dari 1,28 milyar dolar pada tahun 2013 menjadi 2,56 milyar dolar AS pada tahun 2015. Sejalan dengan *trend* pasar global, para pelaku bisnis di Korea pun turut memainkan peran penting dalam mensuplai kenaikan konsumsi produk halal dalam pasar global. Semakin banyak pengusaha-pengusaha Korea yang berkecimpung dan terlibat langsung dalam mata rantai produksi dan distribusi produk-produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan yang berlabel halal. Keterlibatan bisnis mereka ini sebagian juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata Muslim

ke Korea yang berasal dari Malaysia, Abu Dhabi, Yordania, dan Saudi Arabia. Kunjungan wisata di kalangan Muslim ke Korea meningkat dari 384.000 orang pada 2010 menjadi 751.000 orang pada tahun 2014. Ketersediaan sajian halal yang ditawarkan oleh *diasphoric people* merupakan salah satu daya tarik Korea, di samping daya tarik lainnya, yang mengundang gelombang turis Muslim ke negeri ini. Tentu saja daya tarik utama pariwisata Korea, di samping karena faktor alamnya (*eco-tourism*), dipicu oleh kesuksesannya dalam mengglobalisasikan *K pop culture (hallyu)* yang mendunia -- dari tayangan musik-musik pop (*K musical pop*), dan film-film Korea (*K film*) yang digemari tua dan muda.

Nongshim, perusahaan pembuat makanan ringan dan mie instant, membangun fasilitas produksi dan pabrik pabrik di Busan dan memperoleh sertifikat halal untuk dua produk mie instan: *Shin Ramyun* dan *Yukejang Noodle Soup* pada tahun 2011 dari *Korea Federation Muslim Committee*. Nongshim mencatat penjualan senilai USD 0,9 juta pada tahun pertama setelah peluncuran mie instan halal. Produk ini diekspor ke Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Pada November 2014, Nongshim mencatat asset penjualan produk-produk halalnya senilai USD 2,5 juta.

Di tahun 2013 Cheiljedang (CJ) perusahaan bergerak dalam *food-processing* berhasil memperoleh sertifikat halal dari JAKIM-Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi 433 produk-produknya, di antaranya adalah produk *snack* yang krispi, *kimchi* (sayuran yang difermentasi), nasi matang. Atas kesuksesan mendapatkan sertifikasi halal dari JAKIM bagi produk *kimchinya*, perwakilan CJ membuat pernyataan:

Kami melewati semua prosedur pengujian laboratorium yang sangat bervariasi, mulai dari uji bumbu racikan seperti kecap ikan yang difermentasi sampai pada proses produksi, manajemen penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman via kapal. Produk yang berhasil memenangkan sertifikat halal dipandang sebagai produk makanan yang bersih dan aman untuk dimakan.

Melalui sertifikasi halal, CJ telah berhasil mengeksport makanan berlabel halal masuk dalam arus pasar luar negeri dan merebut konsumen, penggemar produk-produknya di Malaysia dan Singapore. Perusahaan ini berencana untuk menembus pasaran ke lebih banyak lagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia dan Timur Tengah.

Perusahaan makanan Our Home juga berhasil memperoleh sertifikasi halal untuk produk *kimchi*nya dari *Korea Muslim Federation* (KMF). KMF merupakan satu-satunya institusi keagamaan di Korea yang mengeluarkan sertifikasi halal. Pada tahun 2014, perusahaan ini mendapatkan sertifikasi halal dari KMF untuk produk rumput laut. Juru bicara perusahaan ini mengekspresikan kebanggannya ketika berhasil mendapatkan label halal atas produk dagangannya.

“Dengan produk-produk bersertifikat halal, perusahaan kami sekarang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan Muslim, khususnya di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara. Agar lulus dalam uji laboratorium, dan permohonan akan sertifikat halal diloloskan, kami sengaja tidak menambahkan saus udang yang sudah difermentasi selama proses pembuatan *kimchi*. Kami tidak menambahkan unsur metanol beralkohol sebagai langkah akhir memasak rumput laut.”

Perusahaan Crown yang memproduksi kue kering dan roti, Kuk He, yang menggunakan krim coklat sebagai bahan baku utama juga menerima sertifikat halal. Begitu juga perusahaan Orion Group di Korea yang memproduksi *Choco Pies* berhasil memperoleh sertifikat halal setelah mengganti gelatin, yang mengandung minyak babi, dengan bahan dari tumbuhan dalam produknya.

Perusahaan kosmetik *K Pop Cosmetic* berhasil menembus pasar di Malaysia setelah mendapatkan sertifikasi halal dari JAKIM. Produk alat-alat rias dari *K Pop Cosmetic* digemari konsumen Malaysia. *Sunwoo SV909 Syn-ake Skin Lotion*, *Sunwoo SV909 Syn-ake Eye cream*, *Hand Cream*, *Repairing Eye Cream*.

Korea yang dikenal sebagai *non-Muslim country* menjadi salah satu negara pengekspor terbesar produk halal, mengalahkan Indonesia

yang dikenal sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ini merupakan suatu ironi bagi Indonesia dan Malaysia yang mayoritas populasinya beragama Islam, tetapi tidak mampu menyaingi Korea yang kini telah menjadi pemasok terbesar dari produk-produk halal di pasar global.

PENUTUP

Komodifikasi agama di Korea Selatan menunjukkan dengan jelas kelemahan dari sekulerisasi yang menyatakan bahwa akan hilang dari ruang publik karena modernisasi. Sebaliknya, komodifikasi agama di Korea Selatan memperkuat pandangan bahwa kedudukan agama dalam era *post-modern* dan *neo-liberalisme* semakin penting bahkan sangat signifikan. Agama semakin hadir di ruang publik dan ruang pasar. Komodifikasi agama selain mengungkapkan bagaimana aspek-aspek keagamaan dikomersialkan juga mengungkapkan bagaimana agama telah menjadi *marketplace* baru yang sangat dinamis.

Agama berubah dari berserah diri, ketataan, dan kepatuhan kepada komitmen pribadi. Kenyataan ini bahkan telah berlaku, terjadi, dan meresap dalam agama-agama dunia. Agama dan keyakinan menjadi bersifat operasional. Hal ini karena agama lebih terikat pada eskatologi realisasi dan perwujudan pribadi. Individu menjadi sangat penting dalam bentuk keagamaan ini. Dalam situasi ini individualisasi mengarah menuju realitas *solipsistic* (ide filosofis bahwa hanya pikiran pribadi adalah yang benar-benar ada), terfragmentasi, terderegulasi, dan heterogen.

Di masa sekarang ini teknik *marketing* dan teknik manajemen diterapkan dalam organisasi keagamaan sehingga memicu perubahan besar. Organisasi-organisasi keagamaan mulai menginvestasikan nama-nama dan logo agar mudah dikenali dalam ruang pasar yang makin padat. Dengan mengadopsi strategi-strategi tersebut, ‘tawaran’ agama berevolusi menjadi *faith brand*, merek-merek kepercayaan. Merek-merek keagamaan, *faith branding*, membantu konsumen menciptakan dan mempertahankan hubungan personal dengan produk. Dengan memperkenalkan *marketing*

ke dalam kategori sosial, Einstein mengubah kategori sosial menjadi kategori produk pasar. Agama bersaing dengan produk kebudayaan lain. Agama diarahkan untuk lebih menyenangkan, melayani konsumen, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan menghibur. Batas antara yang suci dan yang profan, sakral dan sekuler menjadi kabur.

Sementara konsumsi yang hadir dan ada dalam kehidupan sehari-hari, namun sifat asli, proses, dinamika, dan pengaruhnya masih diperdebatkan termasuk relasinya dengan agama. Munculnya konsumsi sebagai etos sosial dan ideologi pada pertengahan kedua abad kedua puluh bersamaan dengan transformasi radikal agama-agama. Bentuk-bentuk tradisional agama telah mengalami penurunan secara dramatis. Gereja-gereja resmi mendapati dirinya dilawan oleh bentuk-bentuk gereja transnasional, global, dan lebih disukai karena kemajuan teknologi komunikasi. Agama-agama baru bermunculan seiring dengan gelombang imigrasi. *Trend-trend* baru keagamaan seperti spiritualitas holistik dan gerakan-gerakan karismatik muncul sebagai roman baru, fenomena baru dan sanggup bertahan lama. Meskipun perdebatan dalam sosiologi agama masih berputar pada isu keruntuhan agama selama beberapa dasawarsa, ide bahwa agama telah mengalami rekonfigurasi dan rekomposisi ke dalam bentuk-bentuk baru pada akhirnya mendapatkan penerimaan secara meluas mayoritas. Meskipun masih studi agama terus dikerahkan sebagian besar di dalam paradigma sekularisasi. Paradigma ini makin lama makin menunjukkan keterbatasan terkait dengan beberapa perubahan paling kentara sejak tahun 1980-an, yakni gerakan menuju ke arah lebih praktis dalam pengalaman ketimbang bentuk-bentuk keagamaan berbasis kepercayaan, dengan kata lain, suatu gerak perpindahan dari rezim *orthodoxy* menuju ke rezim *orthopraxy*. Rekonfigurasi agama terkait dengan identitas dan etika. Erosi negara bangsa sebagai kerangka komprehensif untuk memahami agama dan bangkitnya rekonfigurasi transnasional dalam komunitas-komunitas keagamaan, dan kritik radikal pada otoritas kelembagaan dalam kebudayaan kontemporer, memberikan tantangan pada metodologi ilmu-ilmu sosial untuk fokus pada dinamika institusional dalam arah lebih

cair, istilah *Zygmunt Bauman*. Realitas menonjol dalam ranah institusi yang kabur dan terbentuk kembali, dampak internet dan media elektronik pada tata keagamaan, komunitas, komunikasi, dan kemunculannya sebagai sumber primer untuk informasi pada agama, transformasi multidimensional dan bervariasi dalam institusi-institusi agama tradisional dalam kaitan dengan perubahan-perubahan. Proses-proses itu mungkin dilihat sebagai formasi keagamaan baru seperti *megachurch*/gereja besar dan spiritualitas baru, akan tetapi juga merepresentasikan agama-agama baru dan kelompok-kelompok radikal. Bagaimanapun juga, otentisitas dan pengalaman keagamaan makin lama makin dilegitimasi melalui sarana-sarana atau alat-alat baru.

PUSTAKA ACUAN

- Arudson, A. (2006). *Brands: meaning and value in media culture*. London and New York: Routledge.
- Atkin, D. (2004). *The culting of brands: when customers become true believers*. New York: Penguin Group.
- Berger, L. (1967). *The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion*. Garden City. New York: Anchor Doubleday.
- Berger, L. (1969). *A Rumor of angels: modern society and the rediscovery of the supernatural*. Garden City, New York: Anchor Doubleday.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: selected essays*. New York: Basic Books.
- Hammond, P.E. (ed). (1985). *The sacred in a secular age*. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.
- Kitiarsa, P. (eds.). (2008). *Religious commodifications in Asia: marketing Gods*. London ; New York, Routledge.
- Martin, D. (2005). *On secularization: towards a revised general theory*. New York. Routledge
- Lury, C. (2011). *Consumer culture*. Cambridge: Polity Press.
- Roof, C. (1999). *Spiritual marketplace: baby boomers and the remaking of American religion*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new ummah*. New York. Columbia: University Press.

TINJAUAN BUKU

“HERB FEITH: AKADEMISI DAN AKTIVIS”

DARI WINA KE YOGYAKARTA: KISAH HIDUP HERB FEITH

Purdey, Jemma. 2014. *Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith*. Diterjemahkan oleh Santi Budiman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hal: xxi+586

Dina Srirahayu

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: dina_srirahayu@yahoo.com

Diterima: 12-1-2017

Direvisi: 3-2-2017

Disetujui: 7-2-2017

PENDAHULUAN

Buku *Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith* merupakan buku terjemahan dari buku asli yang berjudul, “*From Vienna to Yogyakarta: The Life of Herb Feith*”, karya Jemma Purdey pada tahun 2011. Pertama kali diterbitkan oleh *University of New South Wales (UNSW) Press*. Sedangkan, buku versi bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Santi Budiman dan diterbitkan pada tahun 2014 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Foto pada sampul buku Purdey edisi bahasa Inggris, melukiskan hubungan keakraban Herb dengan masyarakat biasa di Indonesia (Basuki, 2014) Sementara, foto sampul pada buku edisi bahasa Indonesia, menggambarkan kesederhanaan Herb yang suka mengendarai sepeda *onthel*. Buku biografi karya Purdey ini merupakan buku yang berusaha menceritakan kisah hidup Herb Feith dengan tebal 586 halaman. Terdiri dari sepuluh bab yang mengupas secara lengkap perjalanan hidup Herb, dari mulai masa kecil Herb, masa muda, perjalanan karir Herb, masa pensiun, dan sedikit gambaran tentang kronologis kematian Herb serta *requiem*.

Buku dari *Wina ke Yogyakarta*, tidak hanya menggambarkan kisah hidup Herb Feith, tetapi juga menggambarkan perjalanan

awal hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Herb memulai karirnya dengan bergabung pada program pengiriman sukarelawan internasional Australia di Indonesia. Herb menjadi sukarelawan pertama dari Australia yang datang ke Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia dengan menjadi tenaga ahli. Herb termasuk dalam salah satu perintis dalam studi bahasa, politik, dan masyarakat Indonesia dari Australia. Herb juga menjadi perintis aktivis perdamaian dan pengajarannya melintasi batas Australia Herb dikenal sebagai orang yang sangat ramah, murah hati, sangat baik dan sangat peduli terhadap orang lain, terutama bagi orang-orang yang mengenalnya. Kemampuan Herb dalam bidang akademis, serta gaya hidupnya yang sederhana, menjadikan Herb seorang ilmuwan yang langka dan sosok pemimpin yang patut diteladani.

DARI WINA KE YOGYAKARTA: KISAH HIDUP HERB FEITH

Buku biografi Herb yang ditulis oleh Jemma Purdey, merupakan dokumen atas perjalanan hidup Herb Feith yang sangat luar biasa. Kisah ini diawali pada era 1930-an, berawal dari kisah masa kecil Herb yang hidup

dan tumbuh dalam sebuah keluarga bahagia di Wina, Austria. Hingga akhirnya seorang Herb kecil harus merasakan dan melihat kekejaman yang dilakukan oleh Nazi di Wina melalui peristiwa *Kristallnacht* (History, tanpa tahun). Pendudukan Jerman atas Austria yang dikenal dengan peristiwa *Anchluss* (Anonim. Tanpa tahun; BBC. 2014) tersebut, telah membawa Herb dan keluarganya sampai ke Australia pada awal tahun 1940-an, di kota Melbourne, di mana Herb dan keluarganya mendapatkan suaka. Di Australia jugalah, Herb mengenal Indonesia, negara yang menjadi fokus kerja, keilmuan dan pergerakan Herb selama 50 tahun (Purdey, 2014, xviii).

Pertautan Herb dengan Indonesia dimulai pada tahun 1951, ketika Herb menginjakkan kakinya pertama kali di Indonesia. Herb datang ke Indonesia sebagai sukarelawan, bekerja sebagai pegawai negeri di Kementerian Penerangan (Kempen) dan digaji dengan gaji lokal. Perjalanan Herb selama di Indonesia dan interaksi Herb dengan kehidupan di Indonesia, yang tertuang dalam bab “Perjalanan ke Atas: Indonesia (1951-53)”, merupakan bagian buku yang paling menarik. Dalam bab tersebut, mengulas tentang babak baru kehidupan Herb, yang telah berhasil mewujudkan impiannya untuk pergi ke Indonesia dan segera merealisasikan semua angan dan cita-cita Herb untuk membantu Indonesia, negara yang baru saja merdeka. Sebagaimana etos sukarelawan *Volunteer Graduate Scheme* (VGS) yang didasarkan atas nafas idealisme dan kepercayaan bahwa para sukarelawan dapat melibatkan diri dalam sejarah dan proses pembentukan bangsa baru.

Dalam bab ini juga diperlihatkan kepewayaan Herb sebagai seorang asing dalam berinteraksi, membaur dan berkomunikasi dengan orang dari berbagai kalangan di Indonesia. Herb mengerti tentang bagaimana dia harus bertindak dan berperilaku, apa yang harus Herb lakukan ketika dia masuk dan berbaur dengan lingkungan baru, dengan tetap mempertahankan kepribadiannya. Pengalaman lintas-kultural Herb, telah membekalinya dengan seperangkat keahlian dalam berinteraksi dan bersosialisasi, yang oleh Herb disebut dengan *craft skill* (keahlian untuk berkreasi) (Purdey, 2014, xix). Herb menganggap

keahlian tersebut memberinya kemampuan untuk menembus atau mengakali berbagai perbedaan sosial maupun kultural. Hal tersebut terlihat jelas dalam corak hubungan interpersonal Herb yang bersifat terbuka, tulus, penuh hormat dan murah hati. Maka tidak mengherankan meskipun Herb baru pertama kali ke Indonesia, masuk dalam sebuah lingkungan baru yang asing dan seorang diri, Herb dapat dengan cepat menyesuaikan diri bahkan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerjanya dan pemimpin tim. Herb mampu membangun sebuah jaringan pertemanan yang luas yang kelak akan sangat membantu Herb dalam perjalanan karirnya.

Selain memperlihatkan keahlian Herb dalam bersosialisasi dengan orang lain, dalam bab ini juga memperlihatkan sisi lain dari diri Herb yaitu kepedulian sosial yang tinggi. Sejak masih bersekolah di bangku SMA di *Melbourne High School* (MHS), jiwa kepedulian sosial Herb yang tinggi sudah terlihat. Herb rajin mengumpulkan bantuan untuk korban perang di Eropa. Ketika Herb telah di Indonesia, jiwa penolong dan kepedulian sosialnya semakin tergugah karena melihat kondisi masyarakat bawah Indonesia yang sangat memprihatinkan. Persoalan moralitas dan etika terkait kemiskinan di Indonesia yang sering dilihat Herb, telah membuat Herb merasa frustrasi dan merasa tidak berdayanya Herb sebagai orang asing untuk memperbaiki situasi tersebut. Herb selalu ikut terbawa oleh perasaannya ketika dia melihat ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, dan merasa Herb ikut andil atas apa yang terjadi. Sikap Herb yang terlalu serius menghadapi tanggung jawabnya dan ketidakmampuan Herb dalam menguasai perasaannya, menjadikan Herb seringkali mengalami depresi dan berdampak terhadap kesehatannya hingga ke depan. Herb memiliki penyakit lesu dan capai kambuhan (disebut oleh Herb sebagai “*energylessnee*”), sebagai akibat beban moral dan tanggung jawab pekerjaannya yang tinggi. Ketika penyakitnya tersebut kambuh, maka Herb akan meminta diri, berjalan menjauh beberapa meter dan berbaring di tanah selama beberapa menit. Itu merupakan metode yang dipakai Herb untuk menyembuhkan diri disaat

Herb mengalami stress dan kelelahan yang luar biasa, dan dipakai oleh Herb seumur hidupnya.

Jiwa kepedulian sosial Herb yang tinggi dan gaya hidupnya yang sederhana, menjadikan Herb terlihat lebih Indonesia dibandingkan dengan orang Indonesia asli. Herb termasuk salah satu orang yang menganut paham kesetaraan. Maka, Herb sering kali merasa tidak nyaman bahkan frustrasi ketika statusnya sebagai orang asing membuat Herb mendapatkan perlakuan yang istimewa apabila dibandingkan dengan orang lokal. Herb mengkritik kebiasaan tersebut sebagai wujud memalukan pengaruh budaya *Hollywood* yang berhasil merusak tradisi Indonesia. Herb berusaha menghilangkan jurang pemisah antara dirinya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dimanapun Herb berada. Salah satu contohnya adalah ketika Herb tinggal di rumah keluarga Soendoro, di Jalan Halimun, Jakarta Pusat. Herb memperlakukan pembantu di rumah tersebut sebagai kawan tinggal yang setara, dan berusaha mengenal mereka sebagai teman. Herb berusaha menyempitkan jurang sosial pemisah yang sangat lebar antara dia dan pembantu di rumah tersebut, dan Herb menginginkan perubahan positif yang bisa bertahan seterusnya.

Bagian lain yang menarik dari bab ini adalah deskripsi yang diberikan oleh Herb atas kebiasaan atau budaya masyarakat Indonesia. Apabila dibandingkan dengan orang di Australia, Herb menyebutkan bahwa orang-orang di Indonesia bergerak lebih lambat dan sering membuat Herb merasa frustrasi karena tempo kehidupannya juga berubah berjalan lambat, terutama di dunia kerja. Serta fakta bahwa birokrasi di Indonesia sangat rumit, ternyata telah diwariskan dari masa ketika negara Indonesia baru saja terbentuk. Sebagaimana dalam pamflet yang dituliskan Herb untuk para lulusan baru yang akan melamar menjadi sukarelawan, disebutkan bahwa birokrasi di Indonesia lambat, santai, penuh ketidakjelasan, kekurangan dana, peralatan, tenaga ahli serta banyak korupsi. Sehingga dalam praktiknya keadaan tersebut sangat menyulitkan terutama ketika sedang berusaha menyelesaikan suatu pekerjaan yang penting dan merugikan masyarakat bawah. Maka tidak mengherankan apabila hingga saat ini,

birokrasi di Indonesia terkenal sangat berbelit-belit dan banyak aparat pemerintahan yang melakukan korupsi. Karena sejatinya budaya tersebut telah ada di Indonesia sejak zaman awal terbentuknya negara ini.

Tambahan pula, dari penugasan Herb yang diberikan oleh Kempen untuk mengawasi persiapan pemilihan regional di Yogyakarta, telah memberikan ide kepada Herb untuk tesisnya. Herb memutuskan fokus penelitiannya pada pemilihan umum di Indonesia. Selain itu juga, kesempatan yang diperoleh Herb untuk tinggal di desa setelah masa tugasnya di Kempen selesai, telah mempertemukan Herb dengan keluarga Pak Kromo dan desa Pendoworedjo, yang menjadi rumah kedua bagi Herb ketika di Indonesia, selain di Melbourne. Bahkan dalam 50 tahun kedepan sejak kunjungan Herb yang pertama di Pendoworedjo, Herb dan keluarganya masih rajin berkunjung ke Pendoworedjo. Herb menyebut warga Pendoworedjo sebagai “keluarga saya” dan Pendoworedjo sebagai “desa saya”.

KONTRIBUSI HERB TERHADAP ILMU PENGETAHUAN DAN DUNIA

Tahun 1970-an merupakan masa gemilang studi Indonesia. Penelitian tentang Indonesia berdatangan dari Perancis, Amerika, Australia, Belanda, Jerman, dan Rusia. Para pemerhati Indonesia tersebut sangat mencintai Indonesia. Mereka menyelami berbagai bidang di Indonesia, dari sosial, budaya, kuliner, religi, sejarah, dan politik Indonesia serta mampu menyajikan data dan analisis yang mengagumkan (Tempo, 2011: 54). Herb Feith sendiri adalah salah satu Indonesianis yang terkenal dari Australia. Dapat dikatakan bahwa Herb hampir mendedikasikan seluruh tenaga, waktu, dan pikirannya untuk Indonesia, bahkan hingga akhir hayatnya. Sebagaimana dikatakan dalam pembukaan, Herb merupakan perintis program sukarelawan internasional Australia yang memulai pelibatan hubungan antar-masyarakat dalam menjalin hubungan antara Australia dan Indonesia. Herb juga memotori lahirnya studi Indonesia di Australia.

Sejak awal, Herb sangat tertarik dengan politik, khususnya masalah demokrasi di

Indonesia. Selama melakukan penelitian dan tinggal di Indonesia, Herb banyak melahirkan tulisan-tulisan yang ditujukan untuk mengkritik pemerintahan Indonesia dan kondisi sosial politik Indonesia pada masa itu. Dua karya Herb yang terkenal adalah tesis Herb yang berjudul *Political Developments in Indonesia in the Period of the Wilopo Cabinet, April 1952-June 1953* serta disertasi Herb yang berjudul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Tesis Herb merupakan penelitian besar pertama oleh cendekiawan Australia mengenai politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Tesis Herb tersebut menjadi perhatian luas. Bahan-bahan yang digali Herb dari dalam berkat posisinya, dan kemahiran Herb dalam berbahasa Indonesia, membuat isinya basah-dan tampil dalam gambar tiga dimensi (Tempo, 2011, 87). Begitu juga dengan disertasi Herb yang terbit pada tahun 1962 tersebut, merupakan hasil penelitian intensif Herb tentang perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca-Perang Dunia II. Buku tersebut membuktikan perhatian Herb terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia serta perdamaian dunia (Tempo, 2011:76). Buku Herb tersebut menjadi rujukan utama para pakar Asia Tenggara di mancanegara dan masih relevan hingga saat ini.

Selain dua buku yang fenomenal tersebut, masih banyak karya-karya Herb yang lain yang ditujukan untuk memperjuangkan keadilan sosial, kritik atas kebijakan pemerintah maupun upaya perdamaian dunia. Sebagai contoh, artikel Herb berjudul, "Indonesia's political symbols and their wielders", (Simbol-simbol politik Indonesia dan para pengendalinya) yang ditulis pada tahun 1963-64, ditujukan Herb untuk mengkritik Presiden Sukarno ketika mendeklarasikan dirinya sebagai "Presiden Seumur Hidup". Artikel berjudul, "President Sukarno, the Army and the Communist: the triangle changes shape (Presiden Sukarno, Angkatan Bersenjata, dan Komunis: hubungan segitiga yang berubah bentuk), merupakan analisis Herb tentang situasi politik Indonesia yang melihat Presiden Sukarno semakin mendekat ke haluan kiri dan munculnya militer sebagai kekuatan politik yang dominan dan memperlakukan PKI sebagai musuh. Artikel berjudul, "Soeharto's search for a political

format" (Pencarian format politik Soeharto) yang diterbitkan di *Australian Neighbours* dan *Indonesia*, bertujuan untuk mengkritik penguasaan militer dan kerasnya pemerintah dalam menghadapi protes sesi MPRS tahun 1968.

Tulisan Herb yang lain sebagai respon terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan adalah esai yang dimuat dalam *Nation* berjudul, "Killings in Indonesia: to moralise or analyse? a dialogue", sebagai keprihatinan Herb atas kisruh di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kudeta dan pembantaian pada tahun 1965. Herb juga menulis, "Aftermath of the coup that failed: Indonesia's Gestapu prisoners still live in hope", (Setelah kudeta yang gagal: tahanan Gestapu Indonesia masih hidup dalam harapan) yang diterbitkan dalam *The Times* di London pada 20 Maret 1967 dan "From a correspondent lately in Indonesia" (Dari seorang koresponden yang baru saja berada di Indonesia) yang diterbitkan oleh surat kabar *Australian* serta *Sun* di Melbourne. Kedua artikel tersebut merupakan hasil perjuangan Herb ketika menjadi perantara distribusi dana bantuan ke Indonesia bersama Gereja Kristen Indonesia (GKI) untuk para tahanan politik pada masa Orde Baru. Melalui kegiatan tersebut Herb menjadi narasumber rahasia yang memberitakan kondisi tahanan beserta penghuninya, untuk memperjuangkan nasib dan bantuan asing bagi para tahanan politik.

Herb juga menulis artikel berjudul, "*Indonesia-Blot on the New Order*" (Indonesia-Coreng Orde Baru) dan terbit di *The New Republica*, mengulas penderitaan yang menimpa tahanan Gestapu-PKI di Indonesia. Sebagai bentuk sikap yang lebih tegas, Herb juga menulis "Surat terbuka untuk Soeharto" pada halaman opini *The Age* berjudul, "*Mr. Soeharto, Your Critics are Your Friends*", bertujuan untuk mengkritik rezim Soeharto yang berfokus pada persoalan tahanan politik serta peran militer dalam pemerintahan. Herb juga menulis artikel berjudul, "Bihari Sorro, (Duka Bihari) yang dimuat dalam *Far Eastern Economic Review*, menjelaskan penderitaan para pengungsi Bangladesh. Selain beberapa tulisan yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi karya-karya Herb yang mengagumkan, baik tentang studi Indonesia maupun untuk menjawab persoalan dunia pada masa itu.

Herb menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam lahirnya studi kawasan (*area studies*) yang mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1950-an dan 1960-an, khususnya kajian kawasan atas negara-negara Asia Tenggara. Herb bersama kawan dan koleganya seperti John Legge dari Monash, Cyril Skinner, dan Michael Swift dari jurusan Antropologi bersama-sama membentuk kelompok yang menjadi komunitas peneliti yang penting di *Centre of Southeast Asian Studies* (CSEAS) pada tahun 1964. Ketika menjabat sebagai ketua jurusan Politik di Universitas Monash, Studi Asia diperkenalkan di Monash sebagai konsentrasi utama dengan fokus pada negara-negara Asia Tenggara dan popularitasnya semakin meningkat. Herb sendiri di Monash mengajar beberapa mata kuliah diantaranya: Politik Asia: Asia sejak 1945 pada tahun 1962; Pemikiran Politik Kontemporer pada tahun 1963; Politik Indonesia; Modernisasi Politik; Tradisi dan Revolusi di Asia; *Third World*; *Rich World, Poor World*; Ekonomi Politik Indonesia; *Centre-Periphery Politics*; *Peace: Theories, Strategies and Movements* dan beberapa mata kuliah lainnya. Sebagai Ketua Jurusan, Herb juga mendukung mata kuliah baru Max Teichmann untuk mahasiswa tingkat tiga, *Theories of Peace and War*. Ketika Herb di Indonesia dan mengajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Herb mengajarkan mata kuliah Lembaga-lembaga Internasional untuk mahasiswa S1 dan kuliah pascasarjana Teori Pembangunan Politik

Selain sebagai akademisi, Herb juga memiliki minat yang sangat besar dalam bidang aktivisme. Pada 8 Mei 1970, ketika upacara wisuda, dalam pidato Herb selaku ketua jurusan, Herb mengajak mahasiswa untuk turun ke jalan berdemonstrasi mendukung *The Vietnam Moratorium*. Pada tahun 1971, Herb bersama seorang pastor Jesuit, mahasiswa Monash Mark Raper, dan teman-teman dekat Herb seperti Charles Coppel, mendirikan *Committee to Support Bangladesh*. Komite tersebut bertujuan untuk mendukung pembentukan negara Bangladesh yang merdeka atau pembuatan aturan yang memungkinkan pemberian otonomi untuk Bangladesh di dalam negara Pakistan. Pada tahun 1976, Herb bersama keluarganya juga

melakukan aksi mendukung *Moratorium Uranium* untuk memprotes penambangan uranium di Northern Territory dan memperingatkan bahaya pertambangan dan pengolahan uranium. Herb juga melakukan protes dan demonstrasi di sekolah Argo Street pada tahun 1976, menuntut agar Menteri Pendidikan, Lindsay Thompson tidak menutup sekolah tersebut secara sepihak. Tahun berikutnya, pada 1977, Herb terlibat dalam aksi unjuk rasa di Swanson Dock untuk melawan penambangan dan ekspor uranium serta memblokir kapal *Colombus Australia* yang membawa muatan bahan nuklir *yellowcake* dari Tambang Mary Kathleen ke Amerika Serikat. Pada awal tahun 1980, Herb membentuk kelompok kolektif studi perdamaian dan bersama para koleganya mendirikan *Victorian Association for Peace Studies/VAPS*. Herb juga aktif berkampanye melalui *Action for World Development* (Gerakan Pembangunan Dunia/AWD) untuk mengatasi kemiskinan yang melanda Dunia Ketiga. Bagi Indonesia sendiri, Herb ikut aktif berperan dalam upaya penciptaan perdamaian di Timor Timur dan Irian Barat. Herb bersama Pat Wals dan rekan lainnya membentuk *East Timor Talks Campaign (East Timor: It's Time to Talk)* pada tahun 1991 dan mengajukan proposal kepada PBB untuk Timor Timur agar dapat menentukan nasib sendiri, termasuk turut hadir dan mengawal pemungutan suara di Timor Timur pada 30 Agustus 1998.

PENUTUP

Buku “Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith” menyajikan dengan sangat baik cerita hidup Herb. Membaca buku ini, para pembaca ikut dibawa ke dalam arus yang dibuat oleh Purdey, sang penulis. Purdey sangat lihai dalam menulis dan menceritakan kisah hidup Herb, membuat para pembaca ikut larut dalam kisah yang diceritakan, bahkan seperti berada pada masa tersebut dan ikut merasakan apa yang sedang terjadi. Sehingga tidak jarang apabila perasaan pembaca ikut berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Herb, sebagaimana yang dituliskan oleh Purdey. Suatu saat pembaca akan merasakan semangat bara api yang menyala, kegembiraan dan antusiasisme

untuk menggapai cita-cita dan masa depan, kesedihan karena rindu pada kampung halaman, bahkan kesedihan yang mendalam dan perasaan kehilangan saat tiba pada bagian terakhir buku yang menceritakan tentang kematian Herb. Bahkan untuk pembaca yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal sosok Herb, akan merasa sangat kehilangan sosok yang baik hati dan ramah tersebut.

Sedangkan beberapa kekurangan dari buku ini adalah, selain masih terdapat beberapa salah penulisan kata, Purdey juga menyebut nama beberapa tokoh dengan panggilan yang tidak konsisten, terkadang menggunakan nama depan, terkadang menggunakan nama belakang. Sehingga bisa menimbulkan salah tafsir. Selain itu, beberapa rangkaian peristiwa dituliskan Purdey dalam beberapa sub bab, menyajikannya dengan bagian yang terpisah, sehingga terkadang membutuhkan kecermatan dalam membaca khususnya untuk sebuah kisah hidup. Hal tersebut terjadi, mungkin karena dalam penulisan biografi Herb, tidak hanya menceritakan Herb secara individu, tetapi berhubungan dengan tokoh-tokoh lain, tidak hanya terjadi pada satu negara tetapi juga melibatkan berbagai negara lain dalam waktu yang bersamaan.

Melalui buku biografi Herb yang dituliskan dengan sangat bagus oleh Purdey ini, pembaca dapat belajar tentang etos intelektual yang dimiliki oleh Herb Feith, seorang Indonesianis yang mencintai Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya. Herb memiliki integritas yang tidak tergoyahkan dan tidak pernah berkompromi dengan prinsip-prinsip moralitasnya sendiri, baik dalam hidup maupun secara profesional. Herb juga sebagai contoh akademikus yang unggul dan komitmen yang penuh pada segala hal yang dikerjakannya. Pengalaman dan pengetahuan Herb yang dalam dan intim tidak terbatas pada satu lapangan ilmu. Selain itu, dari buku biografi Herb ini, pembaca juga dapat mengetahui sejarah perjalanan kajian Indonesia yang dilakukan oleh Herb hingga menjadi Indonesianis terkenal asal Australia yang mengaitkannya hingga ke Amerika Serikat bahkan belahan dunia lainnya. Melalui Pusat Studi Asia Tenggara yang didirikan Herb di Monash University, telah melahirkan

banyak Indonesianis terkenal lainnya di bawah bimbingannya.

Bagaimanapun juga, kepergian Herb telah meninggalkan duka yang amat dalam bagi semua keluarga, sahabat dan koleganya. Herb meninggalkan warisan ilmu pengetahuan yang sangat berguna sebagai referensi dalam bidang sejarah perpolitikan di Indonesia dan upaya menciptakan perdamaian di dunia. Kesederhanaan hidup Herb, tingginya nilai moral dan kepedulian sosial serta keadilan terhadap lingkungan sekitar, telah memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabatnya, meskipun mereka mengakui sifat tersebut akan sangat sulit untuk diikuti. Herb selalu bercita-cita sebagai seorang humanis dan internasionalis. Sikap Herb tersebut bukan karena tidak punya cukup uang, melainkan karena mudah jatuh kasihan. Pada bagian akhir buku biografi Herb ini, ditutup dengan beberapa kesan dan komentar para sahabat Herb tentang sosok yang sangat menginspirasi tersebut.

PUSTAKA ACUAN

- Anonim. (Tanpa Tahun). Kristallnacht. Diakses dari <http://www.history.com/topics/kristallnacht> pada 15 Desember 2016.
- Anonim. (Tanpa Tahun). World War II: 1938 Hitler announces an Anschluss with Austria. Diakses dari <http://www.history.com/this-day-in-history/hitler-announces-an-anschluss-with-austria> pada 15 Desember 2016.
- Basuki, (2014). Biografi Herbert Feith: Dari Wina ke Yogyakarta. *Ruang Baca Tempo*. Diakses dari <https://indonesiana.tempo.co/read/18051/2014/06/24/desibelku.1/biografi-herbert-feith-dari-wina-ke-yogyakarta>.
- BBC. (Tanpa Tahun). Anschluss: Revision. Diakses dari <http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/history/roadwar/anschluss/revision/1/> pada 15 Desember 2016.
- Grant, J. (2011). Mind versus heart. The lost Asian moment in Australian universities. *Australian Book Review*: UNSW Press. Hal: 52-53.
- Purdey, J. (2014). Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah hidup Herb Feith. Diterjemahkan oleh Santi Budiman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Tempo. (2011). Merindukan zaman keemasan Herb Feith. Dalam Liputan Khusus Republik di mata Indonesianis: Pasang surut peran peneliti asing dalam sejarah Indonesia. *Majalah Tempo edisi 14-20 November 2011*.Hal: 75.
- Tempo. (2011). Pasang-surut Indonesianis Aussie. Dalam liputan khusus Republik di mata Indonesianis: Pasang surut peran peneliti asing dalam sejarah Indonesia. *Majalah Tempo edisi 14-20 November 2011*.Hal: 76-78.
- Tempo. (2011). Cerita manis Pak Herb. Dalam liputan khusus Republik di mata Indonesianis: Pasang surut peran peneliti asing dalam sejarah Indonesia. *Majalah Tempo edisi 14-20 November 2011*.Hal: 86-89.
- Tempo. (2011). Sepeda tua dan arloji tua itu. Dalam liputan khusus Republik di mata Indonesianis: Pasang surut peran peneliti asing dalam sejarah Indonesia. *Majalah Tempo edisi 14-20 November 2011*.Hal: 89.

TENTANG PARA PENULIS

- **Rostamaji Kornawan** adalah dosen Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia. Bisa dihubungi di email: *Rostamaji_k@yahoo.com*
- **Anggit Verdaningrum dan Muhammad Iqbal** Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Bisa dihubungi di email: *iqbal.ukm@gmail.com*
- **Rita Pawestri Setyaningsih** adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumberdaya Regional - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.. Bisa dihubungi di email: *rita_pawestri@yahoo.com*
- **Iman Zanatul Haeri** dari Komunitas Perpustakaan Kandangbuku. Bisa dihubungi di email: *imanzanatulhaeri91@gmail.com*
- **Wabilia Husnah** adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumberdaya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.. Bisa dihubungi di email: *wabilia_husnah@yahoo.com*
- **Saiful Hakam** adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bisa dihubungi di email: *hakam9@gmail.com*
- **Cahyo Pamungkas** adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bisa dihubungi di email: *cahyopamungkas@gmail.com*
- **Erni Budiwanti** adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bisa dihubungi di email: *budiwanti2002@yahoo.com*
- **Dina Srirahayu** adalah peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bisa dihubungi di e-mail: *dina_srirahayu@yahoo.com*

INDEKS

- Adversity quotient* iii, vii, 101
Ageing society iv, viii, 113, 114, 115, 125
Aktivisme vi, x, 171
Anggit Verdaningrum iii, vii, 101, 178
Apple Inc. iii, vii, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Arab 120, 132, 133, 166
- Barat iv, v, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 151, 160, 175
Branding image 122, 124
- Cultural center* 124
Culture shock iii, iv, vii, viii, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111
- Deng Xiaoping v, ix, 145, 147
Dina Srirahayu 1, vi, x, 171, 178
- Edward Said v, viii, 129, 130, 132, 141, 143
Eksotis v, 129, 132
- Gender 126, 136, 137, 138, 141, 148, 155, 156, 157, 158
Globalisasi iv, v, 129, 130
Google Inc 89, 94, 95
- Herb Feith vi, x, 171
Holywood 173
Hongkong iii, iv, vii, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112
Hyper-aged society 114
- Imajinasi digital iv, 129, 133
Iman Zanatul Haeri 1, iv, viii, 129, 178
Indochina 131, 132, 133
Irlandia iii, 89, 93
Islam vi, x, 110, 123, 124, 132, 133, 159, 165, 166, 167, 169
- Kebijakan ketenagakerjaan iv, 113
Kebijakan satu anak v, 145, 146, 148, 152
Keluarga berencana 147, 157
Kepuasan kerja iii, 101
Keunggulan komparatif 120
Kisah hidup, vi, 171
Komodifikasi agama v, 159, 160, 165
- Mao Zedong 146
Michael Foucault 137
- Muhammad Iqbal iii, vii, 101, 178
- Nawacita 119, 120
- Offshore Financial Center* 90, 91, 92, 95, 97
Orientalisme iv, 129, 131
- Pasca-Orientalisme v, 129
Perempuan iii, 101, 102, 106, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158
- Religiusitas vi, 159, 160, 162
Representasi v, 129, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141
Rita Pawestri Setyaningsih 1, iv, viii, 113, 178
Rostamaji Korniwawan 1, iii, vii, 87, 178
Ruang pasar vi, 159, 167
- Saiful Hakam 1, v, ix, 159, 178
Simon de Beauvoir 137
Stereotip v, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141
Super aged society 114
- Taiwan iv, viii, 114, 119, 122
Tax evasion iii, vii, 89
Tenaga kerja asing iv, 113, 121, 124, 125
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) iii, 101
Theater 130
Timur v, 90, 110, 115, 129, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 142, 162, 167, 175
Tiongkok v, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160
- Vietnam iv, viii, 113, 117, 118, 121, 123, 124, 139, 175
- Wabilia Husnah 1, v, ix, 178
Wanita Asia iv, 129, 137
Wina 1, vi, x, 171
Wulun 151
- Yinyang 151
Yogyakarta vi, x, 171
- Zheng Ming 151